



Dasar-Dasar Teori
Ekonomi Kependudukan



**JUNAIDI
HARDIANI**

Hamada Prima
2009

**DASAR-DASAR TEORI
EKONOMI KEPENDUDUKAN**

Untuk anak-anak kami: Wawa, Ikra dan Dila

*Teruslah belajar, karena kehidupan juga terus bergulir
dengan segala tantangannya.*

**DASAR-DASAR TEORI
EKONOMI KEPENDUDUKAN**

**JUNAI
HARDIANI**

**Hamada Prima
2009**

Judul : DASAR-DASAR TEORI EKONOMI
KEPENDUDUKAN
Penulis : Junaidi
Hardiani
Setting & Layout : Junaidi
ISBN : 978-979-19971-2-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh : HAMADA PRIMA

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopi, merekam, atau menggunakan sistem penyimpanan lainnya tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas terbitnya buku *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan* ini. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis mengajar mata kuliah Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.

Ekonomi Kependudukan merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan di jenjang Strata Satu (S1) pada sebagian Fakultas Ekonomi di Indonesia khususnya di Departemen/Jurusan Ilmu Ekonomi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan fenomena kependudukan dengan menggunakan analisis teori ekonomi.

Tujuan mata kuliah ini dapat dicapai dengan dukungan literatur atau bahan ajar yang komprehensif dan lebih aplikatif. Namun demikian, karena masih terbatasnya literatur di bidang ekonomi kependudukan menjadi kendala bagi sebagian besar mahasiswa untuk mendalami mata kuliah ini.

Berdasarkan hal tersebut, dengan memaksakan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya buku ini dapat juga diselesaikan. Dengan harapan mudah-mudahan dapat membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah Ekonomi Kependudukan. Dengan harapan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang memiliki minat yang sama untuk lebih mengembangkan literatur dan bahan ajar yang jauh lebih komprehensif dan aplikatif dibandingkan buku ini.

Sebagai catatan, dapat penulis sampaikan bahwa pendekatan ekonomi untuk menjelaskan dinamika penduduk pada dasarnya dapat menggunakan pendekatan mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Namun demikian, buku ini lebih difokuskan pada pendekatan makro

ekonomi dalam menjelaskan dinamika penduduk. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya, kajian ekonomi mikro dari dinamika penduduk dapat kami susun sebagai pendamping buku ini.

Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan perhatian, partisipasi dan dorongan sehingga buku ini dapat tersusun.

Jambi, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. KONSEP DASAR EKONOMI KEPENDUDUKAN	
1.1. Pengertian Demografi	1
1.2. Demografi Formal Versus Demografi Sosial	4
1.3. Pengertian Ekonomi Kependudukan	7
BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN MODEL TRANSISI DEMOGRAFI	
2.1. Kependudukan Dunia	12
2.2. Kependudukan Indonesia	15
2.3. Model Transisi Demografi	18
BAB III. PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	
3.1. Teori Pre Malthusian	28
3.2. Teori Malthus	30
3.3. Aliran Sosialis	40
3.4. Teori-Teori Lain di Era Modern	41
3.5. Posisi Penduduk dalam Berbagai Teori Pertumbuhan Ekonomi	49
3.6. Pembangunan Berwawasan Kependudukan	56

BAB IV. FERTILITAS DAN PEMBANGUNAN

4.1. Pengertian dan Pengukuran Fertilitas.....	59
4.2. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas	68
4.3. Fertilitas dan Pembangunan: Kajian Empiris	71

BAB V. MORTALITAS, MORBIDITAS DAN PEMBANGUNAN

5.1. Pengertian dan Istilah Dasar.....	77
5.2. Ukuran-Ukuran Mortalitas	78
5.3. Ukuran-Ukuran Morbiditas.....	81
5.4. Teori Transisi Epidemiologi.....	82
5.5. Keterkaitan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	87

BAB VI. MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

6.1. Pengertian dan Pengukuran Mobilitas Penduduk.....	91
6.2. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan.....	96

BAB VII. ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:**Indikator Kualitas Penduduk**

7.1. Pengertian Kualitas Penduduk	111
7.2. Indikator-Indikator Kualitas Penduduk.....	113

BAB VIII. ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:**Ketimpangan Gender**

8.1. Pengertian Gender	123
8.2. Diferensiasi Gender	124
8.3. Gender dalam Dunia Kerja	128

BAB IX. ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:**Penuaan Penduduk**

9.1. Batasan Lanjut Usia dan Pengertian Penuaan Penduduk.....	133
9.2. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Maju	136
9.3. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Berkembang	138

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1.1	Tipe Studi Demografi dan Studi Kependudukan	6
Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Dunia (Juta Jiwa)	13
Tabel 2.2.	Sebaran Penduduk Dunia pada Tahun 2005 (Juta Jiwa)	14
Tabel 2.3.	Perkembangan Penduduk Indonesia	16
Tabel 2.4.	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2005	17
Tabel 4.1.	Contoh Perhitungan ASFR Propinsi A Tahun 2005	64
Tabel 4.2.	Contoh Perhitungan GRR Propinsi A Tahun 2005	66
Tabel 4.3.	Contoh Perhitungan NRR Propinsi A Tahun 2005	67
Tabel 5.1.	Contoh Perhitungan ASDR Propinsi A Tahun 2005	80
Tabel 7.2.	Perkembangan HDI Indonesia Berdasarkan Propinsi Selama Tahun 1999 - 2005	119
Tabel 9.1.	Kriteria Penduduk Tua, Dewasa dan Muda	136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gbr. 1.1. Skema Studi Kependudukan	7
Gbr. 2.1. Model Dasar Transisi Demografi	20
Gbr. 2.2. Pengembangan Model Dasar Transisi Demografi	23
Gbr. 3.1. Jebakan Kependudukan Malthus	32
Gbr. 3.2. Dampak Teknologi Terhadap Jebakan Kependudukan Malthus	38
Gbr. 3.3. Penduduk Optimal	42
Gbr. 4.1. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas	70
Gbr. 4.2. Hubungan Antara Fertilitas dan TPAK Wanita	74
Gbr. 5.1. Model Transisi Epidemiologi (Klasik dan Dipercepat)	84
Gbr. 5.2. Model Transisi Epidemiologi (Tertunda dan Transisi)	86
Gbr. 5.3. Keterkaitan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	88
Gbr. 6.1. Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk	93
Gbr. 6.2. Faktor Daerah Asal dan Daerah Tujuan serta Penghalang Antara dalam Migrasi	98
Gbr. 6.3. Model Migrasi Lewis-Fei-Ranis	101

KONSEP DASAR EKONOMI KEPENDUDUKAN

Bab ini akan memberikan pemahaman dan penjelasan konsep dasar ekonomi kependudukan yang dikaitkan dengan ilmu dasarnya yaitu demografi serta posisi ekonomi kependudukan terhadap bagian-bagian dari studi kependudukan lainnya.

1.1. Pengertian Demografi

Demografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos yang artinya penduduk dan graphein yang artinya menggambar atau menulis. Dengan demikian, demografi menurut kata asalnya berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk. Penduduk dalam hal ini diartikan sebagai orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Istilah Demografi pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1885 dalam karyanya “Elements de Statistique Humanie, ou Demographic Comparee” atau “Elements of Human Statistics or Comparatives Demography”. Guillard mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moral.

Dalam perkembangannya, berbagai definisi demografi telah dikemukakan diantaranya:

1. Ilmu yg mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, komposisi penduduk, dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena natalitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas sosial. (Hauser & . Duncan, 1959).
2. Demografi terkait dengan tiga tugas utama: menentukan jumlah, karakteristik dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah tertentu; menentukan perubahan dalam jumlah, karakteristik dan distribusi dari waktu ke waktu; dan menjelaskan faktor-faktor utama dari perubahan tersebut (Mayer, 1962)
3. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi spasial dari penduduk dan perubahan-perubahan aspek tersebut sepanjang masa, melalui berprosesnya lima komponen yaitu (1) kelahiran (fertilitas); (2) kematian (mortalitas); (3) perkawinan; (4) migrasi; dan (5) mobilitas sosial. (Bogue,1969)
4. Penduduk adalah hasil tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan tingkat kematian. Demografi adalah studi tentang sifat dan interaksi ketiga tingkat tersebut, serta pengaruh perubahan

ketiganya terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk (Hawthorn, 1970)

5. Ilmu yang mempelajari penduduk suatu wilayah dari segi jumlah, struktur (komposisi) dan perkembangannya (perubahannya), Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP, 1982).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

Perhatian tentang masalah penduduk telah lama dilakukan oleh para cendekiawan sejak para filosof China, Plato, Aristotle dari Yunani, Ibn Khaldun dari Arab. Namun demikian, penelitian empirik tentang data demografi baru dilakukan pada abad 17. John Graunt, seorang pedagang di London, menganalisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian (*bills of mortality*) yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja. Graunt merumuskan "hukum-hukum" tentang pertumbuhan penduduk melalui karyanya *Natural and Political Observations, Made Upon the Bills of Mortality* yang diterbitkan pada tahun 1662. Berdasarkan usaha dan karya John Graunt tersebut, dia dianggap sebagai Bapak Demografi.

Kemudian pada abad 18, Malthus merumuskan teori pertumbuhan penduduk dalam karyanya *Essay on the Principle of Population* pada tahun 1798. Malthus mengemukakan proposisi dasar tentang manusia dan sumberdaya. Penduduk bila tidak dicegah akan mengalami kenaikan secara geometrik (1,2,4,8,16,32) sedangkan penghidupan (*means of subsistence*) hanya naik dalam rasio aritmatik (1,2,3,4,5,6,7), (Kammeyer, 1971).

Pemikiran Malthus telah mempengaruhi perkembangan demografi modern yang ilmiah. Oleh karenanya Thompson dan Lewis (1965) menyatakan Malthus sebagai “...*the real father of modern population study*...”. Thomlinson (1976) juga mengemukakan bahwa “jika Graunt dapat disebut bapak demografi, maka Malthus dapat disebut ahli pertama dalam bidang tersebut”

1.2. Demografi Formal Versus Demografi Sosial/ Studi Kependudukan

Demografi dapat dibedakan atas: (1) Demografi formal (Formal Demography/Pure Demography) dan (2) Demografi Sosial (Social Demography). (Bogue, 1969). Demografi formal memberikan berbagai teknik-teknik untuk menghitung angka-angka demografi dan memberikan penafsiran yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan oleh statistik penduduk. Dengan teknik-teknik dan pemahaman tentang hubungan-hubungan antar unsur-unsur demografi (kelahiran, kematian, migrasi dan sebagainya) dapat dibuat perkiraan-perkiraan jumlah penduduk untuk masa yang akan datang (forward projection) dan juga untuk masa yang lalu (backward projection). Demografer terutama tertarik pada pertumbuhan penduduk dan reproduksi dari sudut pandang matematik dan penaksiran tidak langsung (quasi-actuarial) dalam studinya mengenai perubahan komponen tersebut.

Demografi Sosial, atau sering dikenal dengan studi kependudukan, dipandang sebagai suatu istilah yang lebih luas, mencakup tidak hanya apa yang dikemukakan demografi, tetapi juga studi yang “kurang matematis” dari komposisi dan distribusi penduduk. Studi kependudukan ini adalah suatu studi yang berusaha mengaitkan antara unsur/variabel demografi dengan variabel-variabel non-demografi.

Dengan kata lain, untuk memahami karakteristik penduduk suatu wilayah, faktor-faktor non-demografipun (seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut) ikut dipertimbangkan. Misalnya, tinggi rendahnya fertilitas di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh jumlah wanita dalam usia subur, tetapi juga ditentukan oleh budaya masyarakat tentang idealnya punya anak lengkap (laki-laki dan perempuan),

Demografi pada awalnya dianggap sebagai suatu bagian dari studi kependudukan yaitu sebagai bagian dari pembahasan studi kependudukan secara lebih matematis. Namun demikian, tulisan-tulisan, artikel dan buku-buku menggunakan istilah studi kependudukan dan istilah demografi, dimana penggunaan kedua istilah tersebut sering saling dipertukarkan. Kemungkinan percampuran dari terminologi ini didorong oleh penggunaan matematik yang lebih luas dalam semua cabang ilmu sosial dan melalui temuan bahwa proses vital berhubungan erat dengan komposisi penduduk dan juga dengan ilmu-ilmu sosial umumnya.

Studi kependudukan adalah suatu disiplin, suatu antar disiplin, dan suatu subdisiplin. Sebagai suatu disiplin adalah jelas karena dalam studi kependudukan terdapat struktur saling keterkaitan antara konsep, teknik, journal, bagian lembaga atau organisasi (departement) dan asosiasi profesional. Studi kependudukan juga bidang antar disiplin karena pokok bahasan dan metodenya berasal dari berbagai disiplin, termasuk ilmu sosiologi, ekonomi, biologi, geografi, sejarah dan kesehatan. Studi kependudukan juga dipandang sebagai suatu subdisiplin dalam beberapa disiplin utama ini. Di banyak universitas, mata pelajaran kependudukan diberikan dalam kurikulum sosiologi, mungkin karena fenomena penduduk selama ini memiliki keterkaitan dengan proses sosial. (McFall,2003)

Studi kependudukan dapat pula dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama menjadikan variabel non-demografi sebagai variabel bebas dan variabel demografi sebagai variabel terikat. Tipe kedua menjadikan variabel non-demografi sebagai variabel terikat dan variabel demografi sebagai variabel bebas.

Untuk membedakan antara demografi, studi kependudukan tipe pertama dan tipe kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Tipe Studi Demografi dan Studi Kependudukan

Tipe Studi	Variabel Bebas	Variabel Terikat
Demografi formal (contoh)	<u>Variabel demografis</u> Komposisi umur Tingkat kelahiran	<u>Variabel demografis</u> Tingkat kelahiran Komposisi umur
Studi Kependudukan (Contoh tipe I)	<u>Var.Non Demografis</u> Faktor sosiologis (misal: kelas sosial) Faktor ekonomi (misal: kesempatan kerja)	<u>Variabel Demografis</u> Migrasi keluar
Studi Kependudukan (Contoh tipe II)	<u>Variabel demografis</u> Tingkat kelahiran Migrasi masuk Tingkat kematian	<u>Var.Non Demografis</u> Kebutuhan pangan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi

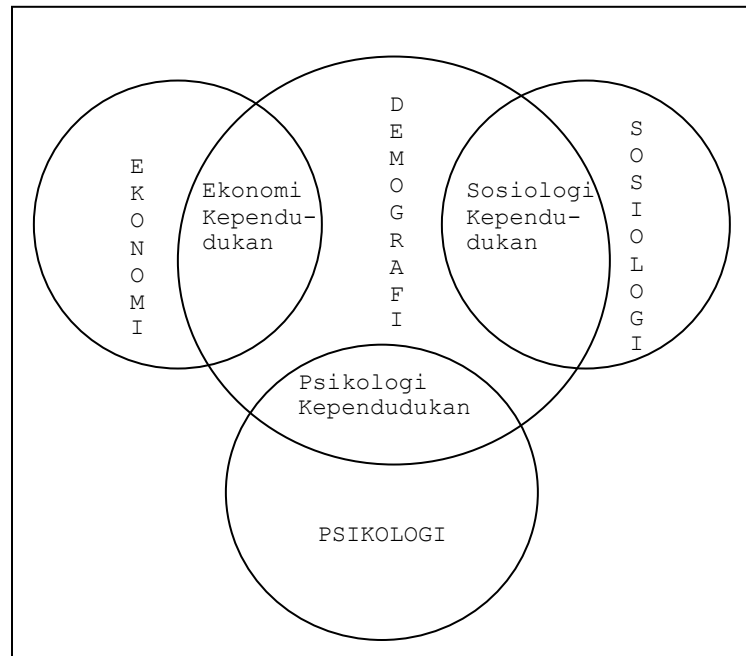
(Sumber: Kemmeyer, KCW, 1971)

Selanjutnya, variabel non-demografis ini dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu. Mengaitkan variabel dari disiplin ilmu sosiologi dengan demografi akan melahirkan studi sosiologi kependudukan, mengaitkan variabel dari disiplin ilmu psikologi dengan variabel demografi akan melahirkan studi psikologi kependudukan, mengaitkan

variabel ekonomi dengan variabel demografi akan melahirkan studi ekonomi kependudukan, dan seterusnya.

Gambar berikut memberikan skema studi kependudukan tersebut:

Gambar 1.1. Skema Studi Kependudukan



1.3. Pengertian Ekonomi Kependudukan

Terdapat dua aspek pengertian ekonomi kependudukan (Ananta, A, dkk, 1986). *Pertama*, ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang mengkaji keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi, (sebagaimana yang telah dinyatakan pada sub bab 1.2.)

Dalam pengertian ini ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. **Kedua**, ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan teori, pendekatan dan alat analisis ekonomi. Pengertian dinamika penduduk mencakup perubahan jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mobilitas dan mortalitas.

Dalam *pengertian pertama*, pada prinsipnya ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, penduduk dapat diposisikan sebagai pelaku (input produksi) pada proses pembangunan dan sebagai penikmat (konsumen) dari output (hasil-hasil) pembangunan.

Sebagai input produksi, penduduk merupakan penyedia tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Perubahan-perubahan dalam variabel demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) akan mempengaruhi perubahan-perubahan kuantitas, kualitas dan sebaran tenaga kerja. Pada tahap selanjutnya perubahan-perubahan kuantitas, kualitas dan sebaran tenaga kerja akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa analisis ekonomi ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari ekonomi kependudukan.

Dalam posisi penduduk sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan, kajian ekonomi kependudukan dapat dibedakan atas:

1. Kajian tentang dampak pembangunan ekonomi dan perubahan-perubahan sumberdaya alam/ekonomi terhadap dinamika penduduk (perubahan-perubahan jumlah, struktur dan persebaran penduduk).

Dalam perkembangannya, khususnya kajian ekonomi terhadap terbatasnya sumberdaya alam jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kemudian lebih banyak dibahas dalam ekonomi lingkungan.

2. Kajian mengenai dampak pembangunan ekonomi terhadap karakteristik ekonomi penduduk. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagainya pada awalnya juga merupakan kajian ekonomi kependudukan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut kemudian terus berkembang sampai akhirnya muncul sebuah kajian tersendiri yang dinamakan dengan ekonomi pembangunan (*development economics*).

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pada pengertian pertama, ekonomi kependudukan pada dasarnya mencakup topik-topik yang dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan. Namun karena kajian tentang ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan sudah berkembang demikian pesatnya, maka topik-topik yang dibahas dalam ekonomi kependudukan menjadi lebih spesifik ke arah variabel dinamika penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi, penuaan penduduk dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat berbagai topik-topik yang diangkat dalam penelitian ekonomi kependudukan belakangan ini. Diantaranya adalah: (1) dampak ekonomi terhadap penurunan mortalitas dan fertilitas; (2) penyebab dan konsekuensi dari penurunan kelahiran dan dampak dari perubahan struktur umur dan komposisi demografi terhadap perekonomian; (3) keterkaitan antara siklus perekonomian dan perkawinan, fertilitas, mortalitas dan migrasi, dan (4) berbagai studi

mengenai keluarga dan pasar kerja, pola migrasi, isu-isu kematian dan kesehatan.

Pada *pengertian kedua*, penduduk tidak hanya sebagai bagian pasif dari analisis ekonomi melainkan sebagai subyek yang dikaji dengan menggunakan peralatan ekonomi. Dalam pengertian kedua ini, ekonomi kependudukan menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan peralatan ekonomi. Misalnya kajian fertilitas melalui analisis permintaan dan penawaran dengan memanfaatkan diantaranya konsep ekonomi tentang marginal utility dan marginal cost. Misalnya juga kajian mortalitas melalui kajian-kajian ekonomi kesehatan dengan memanfaatkan konsep benefit-cost ratio.

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN MODEL TRANSISI DEMOGRAFI

Perhatian dan penelaahan tentang jumlah dan perkembangan penduduk secara global merupakan usaha yang sebenarnya baru meluas pada abad 20. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa pemahaman informasi dasar dalam sumberdaya manusia akan lebih bermanfaat bila disertai dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan penduduk dunia dan Indonesia yang merefleksikan keadaan masa lalu sebagai cikal bakal lahirnya sumberdaya manusia masa kini. Dengan demikian diharapkan akan dapat disusun proyeksi masa depan yang lebih baik dalam kerangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi sebagai akibat pertumbuhan penduduk tersebut. Selanjutnya, pada bab ini juga akan dibahas mengenai teori transisi demografi yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perkembangan penduduk tersebut.

2.1. Kependudukan Dunia

2.1.1. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Dunia

Manusia diperkirakan sudah ada di dunia kira-kira dua juta tahun yang lalu. Pada waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan pada 10.000 tahun sebelum masehi, diperkirakan jumlah penduduk dunia tidak lebih dari 5 juta jiwa. Namun demikian, pada tahun pertama Masehi, jumlahnya telah berkembang hampir mencapai 250 juta jiwa. Dari tahun pertama Masehi, sampai kepada masa permulaan revolusi industri sekitar tahun 1750, populasi dunia telah meningkat tiga kali lipat menjadi 728 juta jiwa. Selama 200 tahun berikutnya (1750 – 1950) tambahan penduduk sebanyak 1,7 milyar jiwa. Tetapi dalam 25 tahun berikutnya (1950 – 1975), bertambah lagi 1,5 milyar jiwa, sehingga pada akhir tahun 1975 jumlah penduduk dunia telah mencapai hampir 4 milyar jiwa.

Pada tahun 1986, populasi dunia sudah mendekati angka 5 milyar, dan kemudian tepat pada tanggal 11 Juli 1987 diperingati secara simbolis dengan kelahiran salah satu bayi di negara Yugoslavia tepat pada tanggal 11 Juli 1987. Selanjutnya, pada tahun 2005 jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 6,45 milyar.

Berdasarkan pertambahan absolut populasi dunia ini, dapat dikemukakan bahwa sejak tahun 1650 Masehi sampai tahun 2005 Masehi, pertambahan penduduk dunia persatuan waktu adalah sebanyak 15,69 juta orang pertahun atau 1,31 juta orang perbulan atau 43,6 ribu orang perhari atau 1.816 orang perjam atau 30 orang permenit. Berdasarkan tingkat pertumbuhan (dalam persentase), dari tabel 2.1. terlihat bahwa pada awalnya populasi manusia berkembang setiap tahun dengan tingkat pertumbuhan hampir nol, yaitu hanya 0,002 persen. Pada tahun 1750 tingkat pertumbuhan penduduk menjadi lebih cepat sampai

150 kali dari 0,002 persen menjadi 0,29 persen pertahun. Pada tahun 1950, tingkat pertumbuhan ini lebih cepat lagi, yaitu mencapai tiga kali lipat, menjadi hampir 1 persen pertahun.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Dunia (Juta Jiwa)

Tahun	Populasi	Pertumbuhan pertahun (%)
10.000 th sebelum masehi	5	0,002*
Tahun pertama setelah masehi	250	0,04
Tahun 1650	545	0,05
Tahun 1750	728	0,29
Tahun 1800	906	0,44
Tahun 1850	1171	0,51
Tahun 1900	1608	0,64
Tahun 1950	2486	0,88
Tahun 1970	3632	1,91
Tahun 1975	3978	1,84
Tahun 1986	4942	1,99
11/7/1987	5000	-
Tahun 2000	6057	1,58**
Tahun 2005	6477	1,35

Keterangan : * = pertumbuhan dari permulaan adanya manusia

** = pertumbuhan dari 1986-2000

Sumber : Duran (1967), Todaro (1983), UN (2001), PRB (2005)

Setelah tahun 1950, tingkat pertumbuhan penduduk ini terus mengalami peningkatan. Dari tahun 1950 sampai ke tahun 1986, rata-rata pertumbuhan penduduk dunia sudah mendekati angka 2 persen pertahun. Meskipun demikian, dari tahun 1986 sampai pada periode-periode berikutnya tingkat pertumbuhan penduduk dunia terus

mengalami penurunan. Pada periode tahun 2000 – 2005, pertumbuhan penduduk dunia sebesar 1,35 persen pertahun.

2.1.2. Persebaran Penduduk Dunia

Dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2005 yaitu sebanyak 6,48 milyar, lebih separuhnya (60,52 persennya atau 3,9 milyar) berada di Benua Asia. Sisanya dari jumlah penduduk dunia tersebut tersebar di Benua Afrika (906 juta atau 13,99 persen), Benua Amerika (888 juta atau 13,71 persen), Benua Eropa (730 juta atau 11,27) dan Oceania (33 juta atau 0,51 persen).

Tabel 2.2. Sebaran Penduduk Dunia pada Tahun 2005 (Juta Jiwa)

Penduduk	Jumlah	%
<i>Dunia</i>	6477	100.00
Benua		
Afrika	906	13.99
Amerika	888	13.71
Asia	3920	60.52
Eropa	730	11.27
Ocenia	33	0.51
<i>Kategori Pembangunan</i>		
Negara Maju	1211	18.70
Negara Berkembang	5266	81.30

Sumber: PRB,2005

Selanjutnya jika dilihat dari sebarannya berdasarkan kategori kemajuan pembangunan suatu negara, dari total penduduk dunia

sebanyak 5,27 milyar (81,30 persen) berada di negara-negara sedang berkembang dan sisanya sebanyak 1,21 milyar (18,70 persen) berada di negara-negara maju.

2.2. Kependudukan Indonesia

2.2.1. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Sebelum abad 19, data statistik mengenai penduduk di Indonesia masih relatif belum lengkap, karena belum adanya pencacahan jiwa berupa sensus. Perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh para ahli demografi mengenai jumlah penduduk di Indonesia terutama untuk Pulau Jawa/Madura pada masa-masa tersebut hanya didasarkan pada berbagai catatan administrasi dari penguasa penjajah.

Catatan yang relatif lebih cermat mengenai jumlah penduduk di Indonesia baru dapat diperoleh pada tahun 1930, melalui pelaksanaan Sensus Penduduk. Dari SP 1930 tersebut, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan sebanyak 60,7 juta jiwa. Periode berikutnya, sensus baru dilaksanakan pada tahun 1961. Berdasarkan sensus ini, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 97,0 juta.

Setelah tahun 1961 ini, pencacahan penduduk telah dilaksanakan secara lebih teratur dengan cakupan wilayah yang sudah relatif lengkap, baik melalui Sensus Penduduk maupun melalui SUPAS (Survai Penduduk Antar Sensus). Berdasarkan pencacahan tersebut, pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa, kemudian bertambah menjadi 147,5 juta pada tahun 1980, menjadi 179,4 juta pada tahun 1990, bertambah lagi menjadi 206,3 juta pada tahun 2000 dan 213,4 juta pada tahun 2005.

Dari perkembangan pertumbuhan penduduk Indonesia ini memperlihatkan bahwa secara umum angka pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif tinggi diatas rata-rata pertumbuhan penduduk dunia. Dari kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduknya menunjukkan bahwa dari tahun 1930 sampai tahun 1980 terlihat kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan penduduk, tetapi setelah tahun 1980 telah terjadi penurunan tingkat pertumbuhan yang cukup berarti. Selama periode 1930 – 1961 tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,51 persen pertahun. Mengalami peningkatan menjadi 2,08 persen pertahun pada periode 1961-1971. Selama periode 1971-1980 tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia kembali meningkat menjadi 2,40 persen pertahun. Namun demikian, pada periode 1980 – 1990 tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan menjadi 1,98 persen pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 1,35 persen pertahun pada periode 1990-2000, dan 1,31 persen pertahun pada periode 2000 – 2005.

Tabel 2.3. Perkembangan Penduduk Indonesia

Tahun	Jumlah (000.000)	Pertumbuhan/tahun (%)
1930	60,9	
1961	97,0	1.51
1971	119,2	2.08
1980	147,5	2.40
1990	179,4	1.98
2000	205,1	1.35
2005	218,9	1.31

Sumber: <http://www.datastatistik-indonesia.com> (data diolah)

Dari pertambahan absolut penduduk Indonesia selama tahun 1930 sampai tahun 2005 ini, dapat diringkaskan pertambahan penduduk persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun lahir = 2.106.667 orang pertahun atau, 175.556 orang perbulan atau 5.852 orang perhari atau 244 orang perjam atau 4 orang permenit.

2.2.2. Persebaran Penduduk Indonesia

Berdasarkan SUPAS 2005, terlihat bahwa dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2005 yaitu sebanyak 218,9 juta, lebih separuhnya (58,70 persennya atau 128,5 juta) berada di Pulau Jawa dan Bali. Meskipun luas Pulau Jawa-Bali hanya 7,04 persen dari total wilayah Indonesia.

Tabel 2.4. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2005

Pulau	Luas Wilayah		Penduduk		Jiwa per Km2
	Km2	%	Juta Jiwa	%	
Jawa Bali	133.202	7.04	128.5	58.70	965
Sumatera	480.847	25.43	46	21.01	96
Kalimantan	574.194	30.37	12.1	5.53	21
Sulawesi	191.671	10.14	15.8	7.22	82
Pulau Lainnya	510.840	27.02	16.5	7.54	32
Indonesia	1.890.754	100	218.9	100	116

Sumber: <http://www.datastatistik-indonesia.com> (data diolah)

Sisanya dari jumlah penduduk tersebut tersebar di Pulau Sumatera (46,0 juta atau 21,01 persen), Pulau Kalimantan (5,53 persen

atau 12,1 juta), Pulau Sulawesi (7,22 persen atau 15,8 juta), dan pulau-pulau lainnya (7,54 persen atau 16,5 juta).

Tingginya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa-Bali menyebabkan tingkat kepadatan penduduk pulau ini jauh lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali pada tahun 2005 mencapai 965 jiwa per km², sedangkan di pulau-pulau lainnya hanya berada pada kisaran dibawah 100 jiwa per km². Misalnya untuk Pulau Sumatera adalah 96 jiwa per km², Kalimantan 21 jiwa per km², Sulawesi 82 jiwa per km².

2.3. Model Transisi Demografi

2.3.1. Model Dasar Transisi Demografi

Ide dasar mengenai transisi demografi pertama kali dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Berdasarkan pengamatan Thomson terhadap data dari beberapa negara pada periode 1908-1927, ditemukan adanya tiga pola pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut, yaitu :

Kelompok A (Eropa Barat, Eropa Utara dan AS), negara-negara yang mengalami perubahan pertumbuhan alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah

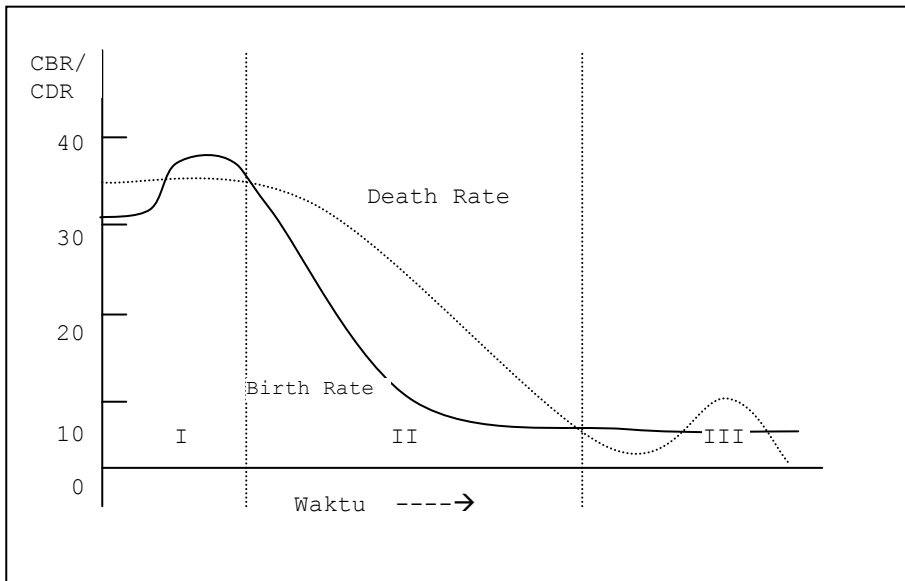
Kelompok B (Italia, Spanyol dan kelompok "Slavia" di Eropa Tengah), negara-negara yang mengalami penurunan baik kelahiran maupun kematian, tetapi penurunan kematian adalah sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan kelahiran. Kondisi ini dialami oleh negara-negara kelompok A pada 30 sampai 40 tahun tahun sebelumnya.

Kelompok C (negara-negara lainnya selain kelompok A dan B) yaitu negara-negara dimana kelahiran maupun kematian belum mengalami perubahan. Dalam artian lain kelahiran dan kematiannya masih sangat tinggi.

Enam belas tahun kemudian, yaitu pada tahun 1945, Frank Noteisten kemudian memberikan penjelasan tentang ketiga pola yang ditemukan oleh Thomson tersebut. Untuk kelompok A, diberi nama dengan “incipient decline”, kelompok B adalah “transitional growth”, dan kelompok C adalah “high growth potential”. Pada saat inilah diperkenalkan istilah transisi demografi (*demographic transition*), sebagai suatu proses penurunan mortalitas dan fertilitas penduduk suatu daerah dari tingkat yang tinggi (high growth potential) menuju ke tingkat yang rendah (incipient decline).

Teori transisi demografi pada prinsipnya ingin memperlihatkan dampak kemajuan dalam pembangunan ekonomi pada penurunan fertilitas dan mortalitas. Teori ini mencoba menerangkan mengapa suatu masyarakat mengalami perubahan dari angka fertilitas dan mortalitas yang tinggi ke angka fertilitas dan mortalitas yang rendah. Teori ini berupaya memperlihatkan bahwa kemajuan dalam pembangunan ekonomi mempunyai sumbangan penting dalam transisi fertilitas dan mortalitas.

Sebagaimana yang dikemukakan Noteisten, terdapat tiga tahapan dalam transisi demografi. Ketiga tahap tersebut diberikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1. Model Dasar Transisi Demografi

Tahap I. (High Growth Potential)

Pada tahap ini ditandai dengan fertilitas tinggi dan mortalitas tinggi. Tingkat mortalitas bervariasi tergantung dari ada atau tidak adanya perang, ada atau tidaknya bencana kelaparan dan ada atau tidaknya faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap mortalitas.

Negara-negara yang berada pada fase transisi ini mempunyai pertumbuhan alami yang rendah atau bahkan mengalami pertumbuhan alami yang negatif. Tahapan ini juga disebut dengan *Malthusian Stage*. Sering juga tahapan ini disebut sebagai *pre-industrial stage* karena masyarakat pada tahap ini berada pada kondisi perekonomian pra-industri (*pre-industrial economy*) dan lingkungan non-perkotaan (*non-urban environment*).

Tahap II. (Transitional Growth)

Pada tahap ini penurunan mortalitas lebih cepat dibandingkan fertilitas. Akibatnya pertumbuhan penduduk tinggi. Tahap ini sering disebut tahap transisi (*transitional stage*) atau celah demografi (*demographic gap*). Negara-negara yang mempunyai perekonomian dalam tahap berkembang biasanya masuk dalam tahap ini.

Tahap III. (incipient decline)

Pada tahap ini fertilitas dan mortalitas berada pada tingkat yang rendah. Pertumbuhan penduduk rendah, tetapi berbeda dengan tahap pertama, rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh fertilitas dan mortalitas yang rendah, bukan fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Tahap ini sering juga disebut dengan *industrial stage*, karena merupakan tahap yang umumnya dialami oleh negara-negara industri.

Terdapat beberapa kritik yang terkait dengan teori transisi demografi ini, yaitu:

1. Teori transisi demografi belum mampu menjelaskan perubahan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, sehingga gambaran yang diberikan masih sangat kasar. Perubahan fertilitas dan mortalitas yang terjadi dalam masyarakat tidak sesederhana teori tersebut. Sebagai contoh adalah pada tahap kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh penurunan kematian, tetapi juga disebabkan meningkatnya fertilitas.
2. Waktu yang dibutuhkan masing-masing tahap sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini sangat tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas ketika transisi dimulai. Oleh karenanya, sulit untuk menggeneralisasi teori ini.

3. Tahapan transisi pada dasarnya masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Hal ini disebabkan, setelah fertilitas dan mortalitas berada pada angka yang sangat rendah, kemungkinan besar pada tahap selanjutnya angka tersebut (terutama fertilitas) akan kembali meningkat.

Dalam rangka inilah Cogwill (Nam dan Philiber, 1986) mengembangkan model transisi menjadi empat tahapan (siklus) sebagai berikut :

Siklus I dicirikan oleh tingkat fertilitas yang stasioner (relatif tetap) dan tingkat mortalitas mengalami penurunan. Tetapi menjelang akhir siklus terjadi peningkatan pada mortalitas. Pola ini merupakan pola yang terjadi pada tahap I model dasar transisi demografi

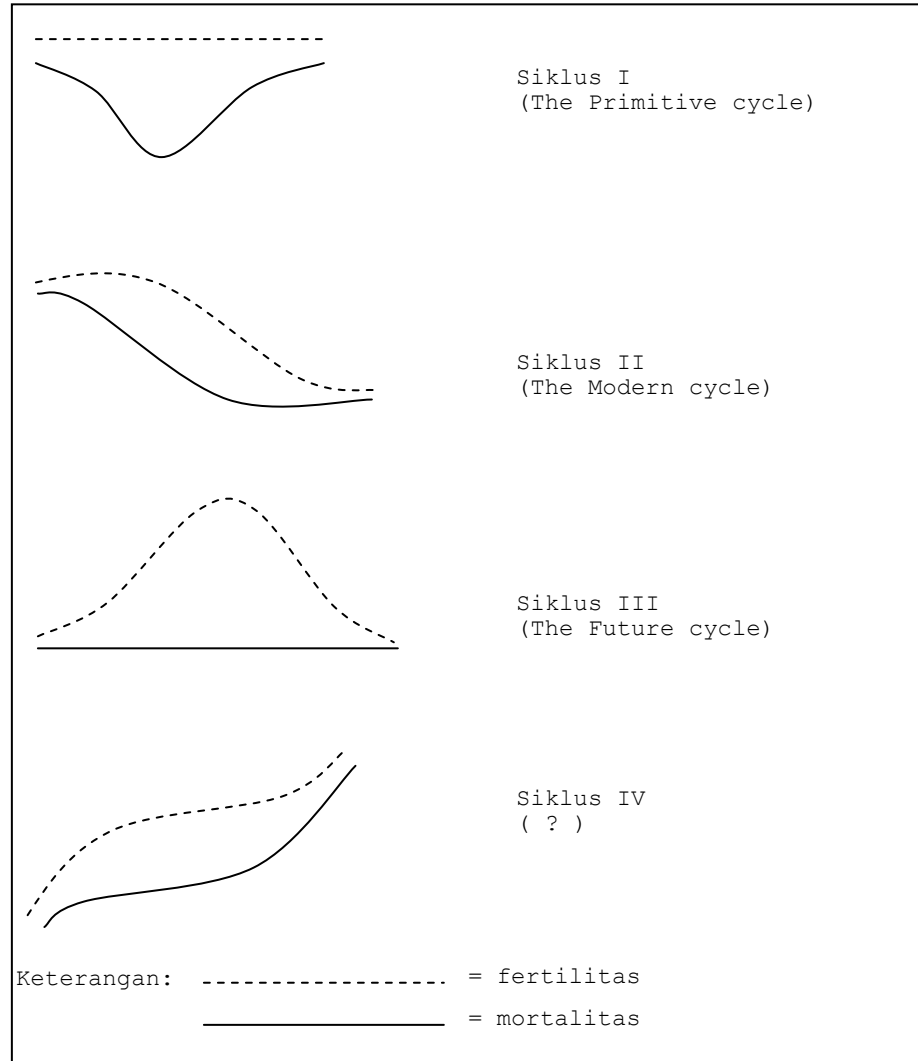
Siklus II dicirikan oleh penurunan fertilitas dan mortalitas, dengan penurunan mortalitas yang lebih cepat dibandingkan fertilitas. Pada akhir siklus mortalitas dan fertilitas bertemu pada satu tingkat yang sama. Pola ini merupakan pola yang terjadi pada tahap II model dasar transisi demografi.

Siklus III merupakan keadaan setelah fertilitas dan mortalitas berada pada level yang rendah. Pada masa ini fertilitas akan naik lagi, sementara itu mortalitas tetap konstan. Kemudian, fertilitas akan turun lagi untuk kembali pada level yang semula. Kondisi semacam ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Salah satu contoh pola ini adalah apa yang telah terjadi setelah perang dunia ke II dengan adanya "baby boom".

Siklus IV dicirikan oleh kenaikan baik fertilitas maupun mortalitas. Pada dasarnya, dalam sejarah manusia siklus ini belum pernah terjadi. Pola ini sejalan dengan pernyataan Malthus tentang

“positive checks” sebagai solusi terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Gambar 2.2. Pengembangan Model Dasar Transisi Demografi



2.3.2. Revisi Teori Transisi Demografi

Menurut Zelinsky (1971), penggunaan istilah transisi demografi yang digunakan adalah kurang tepat. Hal ini karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh perubahan dalam fertilitas dan mortalitas, tetapi juga perubahan dalam migrasi. Faktor ketiga ini sama sekali belum dibahas dalam teori transisi demografi.

Zelinsky selanjutnya mengemukakan bahwa pembahasan-pembahasan transisi demografi yang telah terjadi selama itu lebih tepat disebut dengan “transisi vital” karena hanya membahas mengenai kelahiran dan kematian. Pembahasan mengenai “transisi demografi” akan menjadi lengkap jika pembahasan transisi vital disertai dengan transisi mobilitas yang juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi dinamika penduduk.

Jumlah anak yang makin sedikit, pendidikan yang makin meningkat, pendapatan yang meningkat, dan globalisasi informasi mendorong terjadinya peningkatan aspek ketiga dalam demografi yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini tidak saja dalam lingkup internal (mobilitas dalam negeri), tetapi juga mobilitas internasional.

Menurut Ananta dan Chotib (2002), berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pembangunan ekonomi biasanya memperlihatkan tahapan yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik demografis yang juga berbeda. Pada tahap awal pembangunan di negara-negara maju misalnya, angka kelahiran dan kematian terlihat lebih tinggi. Negara tersebut biasanya akan menghadapi surplus tenaga kerja muda dan tak terdidik, sedangkan modal dan tenaga kerja terdidik masih amat langka. Pada masa itu, terjadi migrasi keluar dari tenaga kerja tidak terdidik tersebut. Namun demikian, pada saat yang bersamaan,

negara-negara maju pada tahap awal pembangunannya juga menerima modal dan tenaga kerja terdidik dari luar negeri.

Selanjutnya, sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi, jumlah tenaga kerja tak terdidik semakin berkurang diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik. Ekspor barang-barang yang semula diproduksi dengan orientasi pada padat karya kini digantikan oleh ekspor barang-barang yang diproduksi dengan orientasi padat modal dan tenaga kerja terdidik. Bahkan, negara ini mampu menanamkan modalnya ke luar negeri. Negara ini akan mencapai tahap titik balik ketika tidak ada lagi migrasi keluar dari tenaga kerja tak terdidiknya dan mulai mengirimkan modalnya ke luar negeri.

Melewati tahap titik balik, pengiriman modal dan tenaga kerja terdidik sudah makin intensif. Ekspor barang-barang yang berorientasi pada padat modal juga makin dominan. Pada tahap ini, angka kelahiran dan kematian biasanya sudah amat rendah. Negara-negara maju ini sudah menyelesaikan tahap transisi vitalnya (transisi kelahiran dan kematian) dalam proses tahapan transisi demografi. Penduduk juga terlihat makin menua sementara jumlah tenaga kerja muda terlihat makin berkurang.

Zelinsky (1971) mencoba melihat kaitan tahapan dalam pembangunan ekonomi dengan besaran dan tipe mobilitas penduduk. Ia membuat lima tahap transisi mobilitas sebagai berikut:

- (1) masyarakat tradisional pra modern (*premodern traditional society*);
- (2) masyarakat transisi awal (*early transitional society*);
- (3) masyarakat transisi akhir (*late transitional society*);
- (4) masyarakat maju (*advanced society*);

- (5) masyarakat supermaju masa depan (*future superadvanced society*).

Skeldon (1990) kemudian menyempurnakan pemikiran Zelinsky di atas dengan menganalisis pola migrasi penduduk di negara-negara sedang berkembang. Skeldon mengembangkan transisi mobilitas menjadi tujuh tahap, yaitu:

- (1) masyarakat pratransi (*pre-transitional society*);
- (2) masyarakat transisi awal (*early transitional society*);
- (3) masyarakat transisi menengah (*intermediate transitional society*);
- (4) masyarakat transisi akhir (*late transitional society*);
- (5) masyarakat mulai maju;
- (6) masyarakat maju lanjut;
- (7) masyarakat maju super.

PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada kebijakan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk ini. Pandangan pertama menyatakan pembangunan mempengaruhi dinamika penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai dependent variabel. Pandangan kedua menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini penduduk menjadi independent variabel.

Memperhatikan hal tersebut, sudah selayaknya apabila pemahaman terhadap teori penduduk terutama yang dikaitkan dengan pembangunan menjadi sangat penting. Oleh karenanya, pada bab ini akan dibahas berbagai teori penduduk dan perkembangannya yang memperlihatkan keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi.

3.1. Teori Pre Malthusian

Sebelum Malthus, hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu bahwa reproduksi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal. Munculnya pandangan ini disebabkan relatif tingginya tingkat kematian penduduk pada masa-masa tersebut.

Meskipun demikian, dalam penerapannya terjadi berbagai perbedaan, baik karena perbedaan antar tempat maupun antar waktu. Diantara perbedaan tersebut diberikan sebagai berikut:

- 500 SM (pada zaman Cina Kuno) dipelopori oleh Confusius (seorang pemikir Cina), berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai output per tenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat dan menimbulkan perselisihan. Pemikir-pemikir pada masa ini juga mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang ideal rasio antara manusia dengan luas lahan (*man-land ratio*). Alternatif untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memindahkan penduduk dari daerah yang kelebihan penduduk (overpopulated) ke daerah yang kurang penduduk (underpopulated areas).
- 300 SM. Plato menekankan bahwa kestabilan penduduk (dalam konteks rasio manusia dan lahan) merupakan faktor yang penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Plato merupakan pemikir yang paling awal yang mengemukakan doktrin bahwa kualitas manusia lebih penting daripada kuantitasnya. Selain itu, pada periode yang sama,

optimalisasi ratio manusia dan lahan ini juga dikemukakan oleh Aristoteles

- 50 SM. Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Julius dan Agustus, menganut paham pronatalis. Kaisar berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hal perlu untuk mengganti korban perang dan juga untuk menjamin jumlah penduduk yang cukup untuk menjajah daerah jajahan.
- 354 – 430 M. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, pandangan yang dianut adalah *antinatali*. Augustine percaya bahwa keperawanan merupakan keberadaan manusia yang paling tinggi. Kepercayaan semacam ini mengakibatkan orang menunda atau bahkan tidak melakukan sama sekali hubungan kelamin. Pandangan ini berdampak pada penurunan fertilitas.
- Abad 17. Ditandai dengan munculnya aliran Merkantilisme. Pertumbuhan penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemakmuran negara sama dengan produksi total dikurang dengan upah yang diterima pekerja. Karena tingkat upah cenderung turun sebagai akibat meningkatnya angkatan kerja, maka negara-negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan mendapatkan keuntungan.
- Abad 18. Doktrin pronatalis dari Merkantilis ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah meningkatkan kemiskinan. Kritik terhadap pandangan Merkantilis ini muncul dari aliran *physiocratic*, yang

berpendapat bahwa bukan penduduk, tetapi tanahlah yang menjadi bagian terpenting dari kekayaan suatu negara. Salah satu tokoh terkenal yang menganut paham ini adalah Adam Smith. Dia berpendapat bahwa sesungguhnya ada hubungan yang harmonis dan alami antara pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja (demand for labor) dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas lahan.

3.2. Teori Malthus

Teori Malthus diturunkan dari tulisan-tulisan Thomas Robert Malthus. Melalui tulisan-tulisannya, dapat dikemukakan bahwa Malthus merupakan orang pertama yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara penyebab dan akibat-akibat pertumbuhan penduduk.

Buku Malthus yang pertama adalah “Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of society; With remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writer” yang dipublikasikan tahun 1798. Pada tahun 1803 buku tersebut direvisi dengan judul “An Essay on the Principle of Population; or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal of mitigation of the evils which it occasions”.

Berikut ini diberikan pokok-pokok pikiran Malthus mengenai penduduk yang mencakup model dasar dari teori yang dikemukakannya,

penyebab pertumbuhan penduduk, akibat pertumbuhan penduduk serta kritik-kritik terhadap teori Malthus itu sendiri.

Model Dasar – Teori Jebakan Kependudukan Malthus

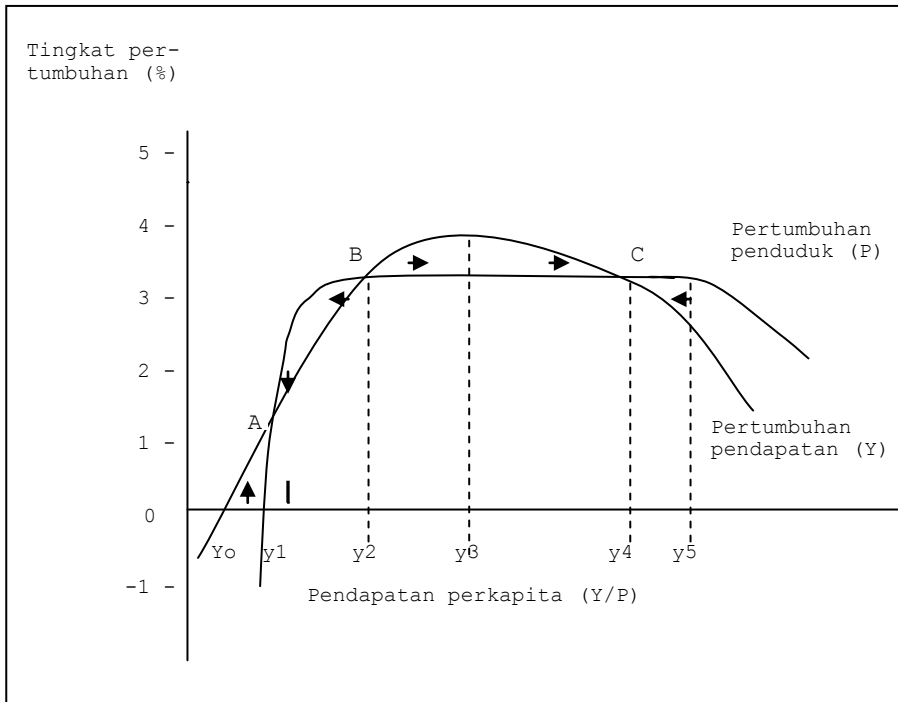
Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan suatu konsep tentang penambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32). Kecenderungan ini menyebabkan penduduk akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumberdaya alam lainnya) maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Menurut Malthus, karena setiap anggota masyarakat hanya memiliki tanah yang sedikit, maka kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin menurun. Pada masyarakat agraris, pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai produksi pangan perkapita. Oleh karenanya, ketika pertumbuhan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat, maka pendapatan perkapita akan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan perkapita ini akan menjadi sedemikian rendahnya sehingga mencapai sedikit di atas tingkat subsisten (kemiskinan absolut).

Gagasan Malthus mengenai penduduk yang terpaksa hidup pada tingkat pendapatan subsisten ini diistilahkan oleh para ekonom modern sebagai “jebakan kependudukan dengan tingkat ekuilibrium yang rendah” (*low level-equilibrium population trap*) atau sering disingkat dengan “jebakan kependudukan Malthus” (*Malthusian population trap*).

Dalam bentuk diagram, model dasar tersebut diberikan sebagai berikut:

Gambar 3.1.: Jebakan Kependudukan Malthus



Sumbu vertikal adalah tingkat pertumbuhan (dalam persen) penduduk (P) dan pendapatan (Y), sedangkan sumbu horisontal adalah pendapatan perkapita (Y/P). Kurva P menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pendapatan perkapita, sedangkan kurva Y menggambarkan hubungan antara pertumbuhan pendapatan nasional (agregat) dengan pendapatan perkapita.

Pada Y_0 , tingkat pendapatan perkapita sangat rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam keadaan stabil (perubahan jumlah

penduduk adalah nol, yang berarti). Y_0 dapat mewakili konsep mengenai “kemiskinan absolut”. Angka kelahiran dan kematian relatif berimbang, sehingga jumlah penduduk juga relatif tetap. Kondisi ini mirip dengan tahap I dari teori transisi demografi. Pada tingkat pendapatan perkapita di atas Y_0 , jumlah penduduk akan mulai meningkat yang disebabkan menurunnya angka kematian. Meningkatnya pendapatan akan mengurangi bahaya kelaparan dan penyakit sehingga menurunkan angka kematian. Namun, angka kelahiran masih tetap bertahan tinggi, yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan jumlah penduduk (seperti Tahap II dalam transisi demografi)

Laju pertumbuhan penduduk akan mencapai laju pertumbuhan maksimum pada tingkat pendapatan perkapita sebesar Y_2 . Pada Y_2 ini, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sekitar 3,3 %. Diasumsikan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan tetap bertahan sampai terjadi perubahan pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan perkapita ke tingkat yang lebih tinggi. Sesudah itu (di sebelah kanan dari Y_5), sejalan dengan Tahap III dari teori transisi demografi, angka kelahiran akan mulai menurun dan kurva pertumbuhan penduduk kemiringannya menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horisontal.

Berdasarkan gambar 3.1., teori Malthus juga menjelaskan hubungan antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat pendapatan perkapita. Terlihat bahwa saat pendapatan agregat naik lebih cepat dari jumlah penduduk, pendapatan perkapita juga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan total, maka pendapatan perkapita akan turun.

Pada awalnya pertumbuhan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan perkapita, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kenaikan pendapatan

agregat juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi juga sehingga lebih banyak investasi dapat dilakukan. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan pendapatan agregat yang lebih tinggi pula. Akan tetapi setelah melewati tingkat pendapatan perkapita tertentu (Y_3), kurva pertumbuhan pendapatan akan mencapai titik maksimum, dan kemudian mulai menurun. Ini adalah titik pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing return*) dalam model Malthus yang terjadi ketika investasi dan tenaga kerja terus bertambah, sementara sumberdaya alam dan tanah relatif tetap. Oleh karenanya, kurva pertumbuhan pendapatan agregat secara konseptual dapat disamakan dengan kurva produk total dalam teori produksi.

Selanjutnya, titik A merupakan suatu titik dengan tingkat pendapatan yang rendah (y_1) yang disertai oleh adanya ekuilibrium dalam pertumbuhan penduduk (*low level-equilibrium trap*). Titik A merupakan titik ekuilibrium yang stabil karena walaupun ada gerakan, baik ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri titik A, tingkat pendapatan perkapita akan kembali ke y_1 . Misalnya, jika pendapatan perkapita naik dari y_1 ke y_2 , tingkat pertumbuhan penduduk akan melebihi laju pertumbuhan pendapatan agregat (kurva P secara vertikal lebih tinggi dari kurva Y). Jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan, maka pendapatan perkapita pasti menurun, yang ditunjukkan oleh arah panah ke jurusan titik A. Pendapatan perkapita akan turun kembali ke tingkat y_1 , untuk semua titik antara y_1 dan y_2 . Demikian pula, untuk daerah sebelah kiri titik A dimana pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari penduduk menyebabkan pendapatan perkapita ekuilibrium akan naik ke tingkat pendapatan y_1 .

Titik B merupakan titik ekuilibrium yang tidak stabil. Jika pendapatan perkapita melonjak cepat dari y_1 ke y_2 (misalnya karena adanya program investasi dan industri besar-besaran), maka pertumbuhan penduduk akan terus berlangsung sampai titik ekuilibrium stabil yang lain (yaitu C). Titik C ini merupakan titik ekuilibrium yang stabil dengan pendapatan perkapita sebesar y_4 . Demikian juga, jika terjadi penurunan pendapatan perkapita (terjadi gerakan ke sebelah kiri titik B), maka pendapatan perkapita akan terus turun sampai titik A dicapai.

Penyebab Pertumbuhan Penduduk

Malthus menyatakan bahwa sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia sebagai makhluk memiliki insting yang sangat kuat untuk menambah jumlah populasinya. Oleh karenanya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikontrol, jumlah manusia akan berlipat ganda dalam jumlah tak terbatas.

Malthus juga mengemukakan bahwa usaha untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan melalui dua cara. ***Pertama***, adalah melalui *positive check*. *Positive check* adalah semua hal yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kehidupan manusia, yang berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk. Sebagai contoh adalah kemiskinan, wabah penyakit, perang, kelaparan dan lainnya. ***Kedua***, adalah melalui *preventive check*. Dalam teorinya, *preventive check* mencakup semua cara yang memungkinkan untuk mengontrol kelahiran, termasuk abstinensi, kontrasepsi dan aborsi. Namun demikian, Malthus hanya menerima cara pencegahan kelahiran melalui *moral restrain*”, dalam bentuk menunda perkawinan, sampai pada waktu dimana orang tersebut yakin bahwa keluarga yang dibentuknya tidak terjebak pada kemiskinan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Cara pencegahan kelahiran yang lain, termasuk kontrasepsi (baik sebelum atau

dalam perkawinan), aborsi, pembunuhan bayi atau cara-cara yang tidak patut lainnya, dipandang sebagai perbuatan jahat yang dapat menurunkan martabat manusia. Menurut Malthus, *moral restraint* merupakan hal yang paling penting, karena dia percaya bahwa mengizinkan pencegahan kelahiran melalui cara-cara yang tidak patut tersebut (prostitusi, kontrasepsi, aborsi atau sterilisasi), akan menghambur-hamburkan energi dengan cara yang tidak produktif secara ekonomi.

Akibat Pertumbuhan Penduduk

Malthus menyatakan bahwa akibat utama dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Hal ini didasarkan atas argumennya bahwa (1) manusia mempunyai kecenderungan alami untuk mempunyai anak (2) pertumbuhan bahan makanan tidak dapat menyamai pertumbuhan penduduk.

Dalam analisisnya, Malthus cenderung sependapat dengan Adam Smith. Selain kebutuhan tenaga kerja (*demand for labor*) sebagai penyebab pertumbuhan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith, Malthus percaya bahwa dorongan untuk ber-reproduksi merupakan faktor yang mendahului sebelum kebutuhan tenaga kerja. Secara implisit ini mengisyaratkan bahwa *over-population* (yang diukur dengan tingkat pengangguran) akan menekan upah menjadi turun sampai titik dimana penduduk tidak sanggup untuk menikah dan membentuk keluarga.

Pada tingkat upah yang rendah, dengan surplus tenaga kerja, petani dapat menggunakan lebih banyak tenaga kerja, sehingga lahan yang digarap bisa lebih luas. Hal ini pada tahap selanjutnya akan meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Malthus percaya bahwa siklus peningkatan produksi pertanian ini (bahan makanan) akan mendorong kembali pertumbuhan

penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bahan makanan, dan selanjutnya kembali meningkatkan kemiskinan.

Kritik terhadap Teori Malthus

Terdapat tiga aspek dari teori Malthus yang umumnya menjadi dasar kritik yaitu :

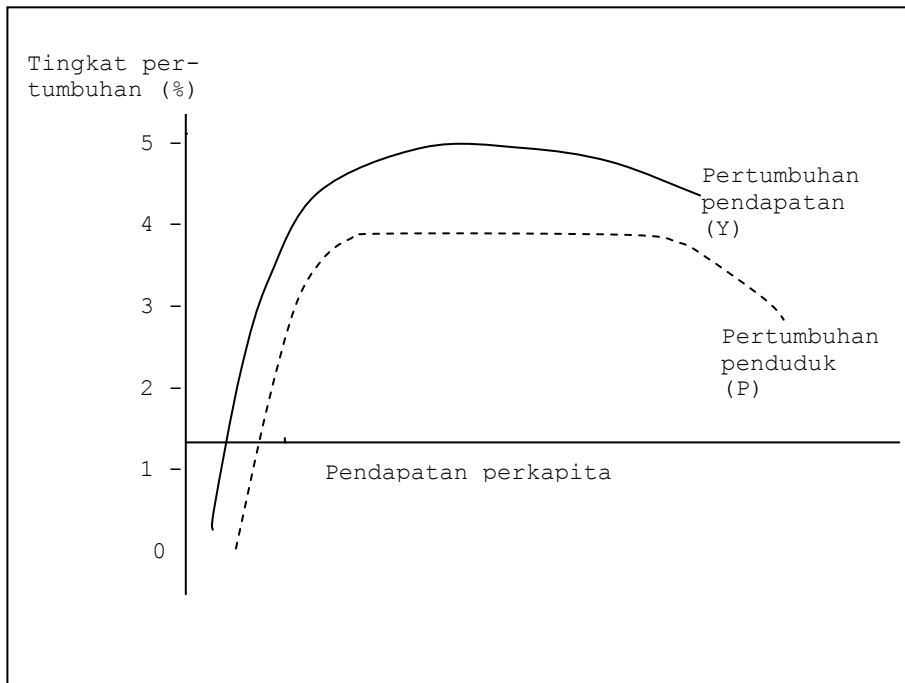
1. Kritik terhadap model jebakan kependudukan.

Model ini yang memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi didasarkan pada sejumlah asumsi yang sederhana dan hipotesis yang tidak tahan uji secara empiris, dengan tiga alasan utama

Pertama, model ini tidak memperhitungkan besarnya dampak kemajuan teknologi dalam menghambat kekuatan-kekuatan yang menyebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan dampak kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan ketersediaan tanah melalui peningkatan kualitas tanah (produktivitas) meskipun secara kuantitas jumlah tanah yang tersedia tetap.

Kemajuan teknologi yang cepat akan menggeser kurva pertumbuhan pendapatan nasional ke atas (dari gambar 3.1.), sehingga untuk tiap tingkat pendapatan perkapita secara vertikal akan lebih tinggi dari kurva pertumbuhan penduduk. Ini berarti semua negara mempunyai kemampuan untuk menghindarkan diri dari perangkap kependudukannya Malthus. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut:

Gambar 3.2.: Dampak Teknologi Terhadap Jebakan Kependudukan Malthus



Kedua, menyangkut asumsi yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk berhubungan langsung secara positif dengan tingkat pendapatan perkapita. Menurut asumsi ini, pada tingkat pendapatan perkapita yang relatif rendah, pertumbuhan penduduk akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Namun demikian, berdasarkan fakta empiris di negara-negara sedang berkembang, ternyata korelasi antara pendapatan perkapita dengan pertumbuhan penduduk tidak terlihat jelas. Meningkatnya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan pengobatan modern telah

menurunkan angka kematian secara cepat tanpa ada hubungannya dengan pendapatan perkapita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukannya pendapatan perkapita yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, akan tetapi bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan.

Ketiga, teori tersebut menitikberatkan pada variabel-variabel yang kurang tepat, yaitu pendapatan perkapita sebagai determinan utama pertumbuhan penduduk. Pendekatan yang lebih baik dan sah (valid) seharusnya menitikberatkan kepada taraf hidup individual, sebagai determinan utama bagi keluarga untuk memutuskan mempunyai anak banyak atau sedikit, bukannya pada taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Menurut Malthus, satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mencegah kelahiran adalah dengan penundaan perkawinan atau dikenal dengan istilah “moral restraint”. Dalam hal ini Malthus tidak mengantisipasi terjadinya pencegahan kelahiran secara massal, baik dari segi penerimaan masyarakatnya, maupun dari segi kemajuan teknologi pencegahan kelahiran (birth control).
3. Malthus percaya bahwa akibat utama dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan.

Dalam hal ini terdapat satu kritik terutama terkait dengan penjelasan logis mengenai kemiskinan sebagai akibat pertumbuhan penduduk. Disatu sisi Malthus berargumen bahwa seorang buruh hanya akan dapat memperoleh standar hidup yang tinggi dengan menunda perkawinan sampai si buruh sanggup melakukannya. Di pihak lain, Malthus juga percaya adalah tidak bisa diharapkan bagi si buruh untuk dapat menunda perkawinan sampai dia memperoleh standar hidup yang tinggi.

3.3. Aliran Sosialis

Karl Marx dan Friederich Engels adalah dua orang dalam aliran sosialis yang sangat terkenal dalam menentang teori Malthus. Mereka berpendapat bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan (*population laws*). Kondisi penduduk, sangat tergantung kepada kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Perbedaan fertilitas dan mortalitas ditentukan oleh variasi tingkat kehidupan dan perbedaan tersebut akan hilang apabila kekayaan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Mereka menentang ide Malthus tentang pertumbuhan bahan makanan. Marx dan Engels mengemukakan bahwa ide pertumbuhan bahan makanan yang mengikuti pola deret hitung tersebut tidak benar selama ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan produksi bahan makanan atau barang-barang lainnya sama seperti pertumbuhan penduduk.

Menurut Marx dan Engels, akibat pertumbuhan penduduk dalam sistem kapitalis adalah kemiskinan dan overpopulation. Tetapi dalam sistem sosialis, pertumbuhan penduduk tidak mempunyai efek sampingan, karena pertumbuhan penduduk akan diserap oleh sistem ekonominya. Pendapat ini dalam kaitannya dengan Malthus, lebih berkaitan dengan akibat pertumbuhan penduduk daripada sebab-sebab pertumbuhan penduduk. Kemiskinan menurut Marx dan Engels disebabkan oleh organisasi masyarakat, khususnya masyarakat kapitalis. Menurut Marx, Malthusian hanya berlaku di masyarakat kapitalis, sedangkan di dalam masyarakat sosialis yang murni tidak akan ada masalah kependudukan.

3.4. Teori-Teori Lain di Era Modern

Setelah Marx dan Engels masih terdapat beberapa teori/pendapat yang mengkaitkan antara penduduk dan pembangunan. Diantaranya adalah:

a. John Stuart Mill

John Stuart Mill, seorang filosof dan ekonom yang sangat berpengaruh pada abad 19, mengemukakan bahwa standar hidup penduduk merupakan determinan utama untuk tingkat fertilitas. Dia percaya bahwa didalam hidup ini orang dapat dan seharusnya secara bebas mencari cita-cita mereka, sehingga Mill menolak pendapat bahwa kemiskinan tidak dapat dielakkan (sebagaimana yang dikemukakan Malthus). Selain itu, dia juga menolak bahwa kemiskinan tersebut merupakan hasil dari penerapan kapitalisme (sebagaimana yang dikemukakan Marx).

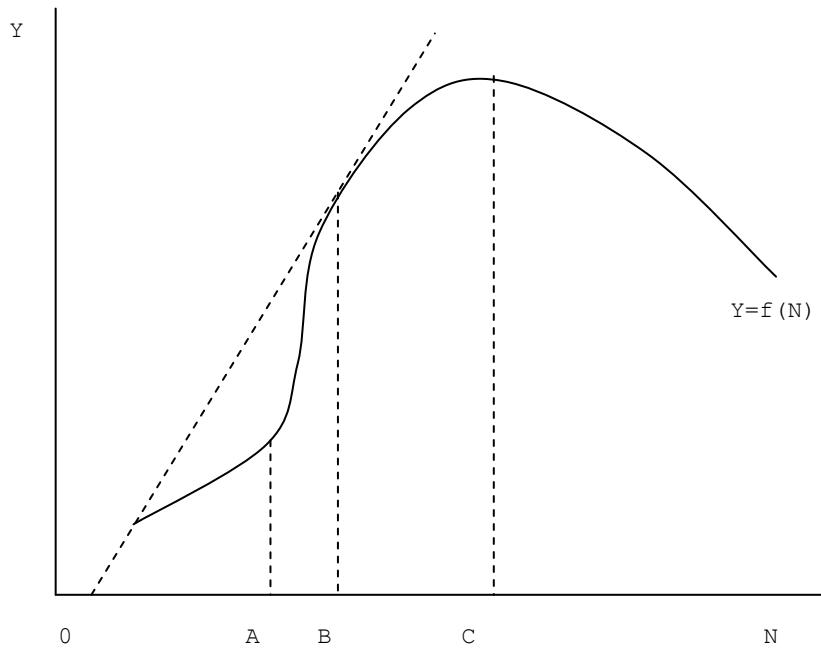
Menurut Mill, negara yang ideal adalah negara dimana semua masyarakat merasa nyaman secara ekonomis. Dia berpendapat bahwa penduduk harus stabil dan harus berkembang baik menurut budaya, moral maupun aspek-aspek sosialnya, disamping juga secara ekonomis harus meningkat. Sebelum penduduk dan produksi bahan makanan stabil, diantara keduanya akan terjadi saling mendahului. Apabila pembangunan sosial ekonomi berhasil, maka akan ada kenaikan pendapatan, yang akan menaikkan standar hidup untuk seluruh generasi dan memungkinkan produksi melebihi pertumbuhan penduduk.

Konsep yang terkenal yang dikemukakan oleh Mill adalah mengenai jumlah penduduk optimal. Jumlah penduduk optimal yaitu jumlah penduduk yang menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam

jumlah maupun mutu sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan tersedianya modal fisik. (Ananta,1990).

Pengertian penduduk optimal dapat diterangkan melalui grafik berikut:

Gambar 3.3. Penduduk Optimal



Keterangan:

Y = jumlah output

N = jumlah penduduk

Gambar tersebut memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan produksi. Sampai titik A, kenaikan jumlah penduduk menyebabkan naiknya jumlah barang dan

jasa dengan tingkat kenaikan yang makin tinggi. Setelah titik A, tetapi belum melewati titik B, kenaikan jumlah penduduk masih diikuti dengan kenaikan jumlah barang dan jasa walaupun peningkatannya mulai turun. Melewati titik B, kenaikan jumlah penduduk masih meningkatkan jumlah barang dan jasa, namun produksi rata-rata mulai menurun. Setelah melalui titik C, kenaikan jumlah penduduk tidak sekedar menurunkan produksi rata-rata, melainkan juga menurunkan produksi total. Titik B pada gambar diatas menunjukkan jumlah penduduk optimal (*optimal population*) yaitu jumlah penduduk yang menghasilkan produksi perkapita yang tinggi. Jumlah tersebut dikatakan optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam jumlah dan mutu *unrenewable resources* maupun tersedianya modal fisik.

Terkait dengan penduduk optimal ini, Sauvy (1974) mengemukakan terminologi-terminologi lainnya yang cukup terkenal yaitu *maximum population*, *minimum population* dan *optimum economy*. Menurut Sauvy, semua kehidupan spesies termasuk spesies manusia akan terus bertambah. Namun demikian bertambahnya spesies dibatasi oleh kemampuan lingkungan. Karena itu spesies tidak dapat bertambah tanpa batas.

Pertumbuhan spesies dibatasi oleh dua jenis pembatas yaitu (a) batas fisik (*physical ceiling*) yang diartikan sebagai *the total weight of the various elements making up the environment cannot be exceeded*; dan (b) batas bio-kimia (*biochemical ceiling*) yaitu bobot materi biologi atau biomass yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh spesies bersangkutan. Batas bio-kimia biasanya jauh lebih rendah dibanding batas fisik

Kedua batas tersebut tidak menghentikan pertumbuhan spesies secara tiba-tiba, melainkan secara perlahan ketika batas itu dilampaui akibat pertumbuhan spesies. Ketika spesies meningkat jumlahnya, kelembaman (*the inert*) lingkungan melawan pertumbuhan tersebut

berlangsung lebih kuat. Tetapi kemudian spesies menggandakan upayanya (melalui eksploitasi berlebihan), sehingga menyebabkan lingkungan bertambah rusak dan menyerah pada tahap subsisten. Namun perlawanan lingkungan terus berlanjut sampai pada batas dimana jumlah makanan yang dibutuhkan spesies tidak lagi mencukupi. Akibatnya, spesies terpengaruh antara lain dengan meningkatnya mortalitas.

Jika diasumsikan benefit yang diberikan lingkungan konstan maka apa yang terjadi dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Pandangan dari aspek ekonomi: ketika penduduk meningkat, jumlah persediaan (supply) per individu menurun disebabkan sumberdaya alam yang terbatas
- b. Pandangan dari aspek biologi: penurunan persediaan menyebabkan mortalitas meningkat dan fertilitas menurun (dengan mengabaikan aspek migrasi).

Kehidupan manusia primitif hampir serupa dengan kehidupan spesies lainnya dimana penduduk terus bertambah sampai pada tingkat maksimum sebatas lingkungan masih mendukungnya (*maximum population*). Ketika lingkungan tidak lagi mendukungnya maka pertumbuhan spesies akan terhambat dengan sendirinya dan tercapailah kondisi penduduk minimum (*minimum population*). Dengan perkembangan teknologi dalam menggandakan sumberdaya alam dan mengontrol mortalitas dan fertilitas maka manusia sebenarnya dapat mengendalikan jumlah populasinya sehingga mencapai tingkat optimum (*optimum population*).

b. Ludwig Brentano

Ludwig Brentano adalah seorang ekonom dari Jerman. Seperti halnya Mill, dia berpendapat bahwa tidak pada tempatnya

mengharapkan orang miskin menurunkan kelahiran tanpa adanya motivasi tertentu. Dia percaya bahwa kesejahteraan/kemakmuran adalah penyebab menurunnya kelahiran.

c. Emile Durkheim

Jika Mill dan Brentano lebih menekankan analisisnya mengenai penyebab pertumbuhan penduduk, maka Emile Durkheim lebih memperhatikan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk. Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan ciri khas masyarakat modern yang semakin kompleks. Kekompleksan masyarakat mempunyai hubungan dengan pertumbuhan penduduk. Menurut Durkheim, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan semakin terspesialisasinya masyarakat yang disebabkan karena usaha untuk mempertahankan keberadaan akan semakin lebih berat apabila jumlah penduduk semakin banyak.

d. Kelompok MIT: Teori Batas Pertumbuhan

Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan sumber daya alam, belakangan ini semakin mendapat perhatian terutama setelah adanya isu global *Limits to Growth*, sebagai hasil penelitian dari kelompok MIT (Massachusetts Institut of Technology) yaitu suatu kelompok kerja dari Roma (Club of Rome). Inti dari isu tersebut (dipublikasi dalam buku yang berjudul *The Limits to Growth A Report for The Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind* yang terbit pada tahun 1972), pada prinsipnya menyatakan bahwa jika kekenderungan-kecenderungan pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia terus terjadi seperti pada masa lampau, maka pertumbuhan bumi ini akan melampaui batas-batas kemampuan. Hal ini akan menimbulkan bencana dalam beberapa generasi mendatang.

Pemikiran tersebut sejalan dengan asumsi Malthus yang menyatakan bahwa penduduk tumbuh menurut deret ukur sementara pangan tumbuh secara deret hitung. Perbedaannya adalah, analisis yang digunakan lebih tajam dan luas serta dilengkapi data dan model analisis yang disebut sebagai “model dunia”. Model dunia tersebut meneliti lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia yaitu (a) industrialisasi yang makin cepat; (b) pertumbuhan penduduk yang makin cepat; (c) kekurangan gizi yang merajalela; (d) makin susutnya *unrenewable resources*, dan; (e) lingkungan hidup yang makin rusak (Meadows, Donella *et.al.*,1982)

Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan makin pendeknya jangka waktu yang ditempuh untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat (*doubling time*). Tahun 1650 penduduk dunia, dengan perkiraan jumlah penduduk 0,5 milyar dengan laju pertumbuhan sekitar 0,3% per tahun, waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat adalah sekitar 250 tahun. Namun pada tahun 1970, dengan jumlah penduduk dunia 3,6 milyar dan laju pertumbuhan sekitar 2,1 per tahun, waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat menjadi hanya 33 tahun. Oleh karenanya, jika pertumbuhan penduduk yang cepat tersebut terus dibiarkan maka akan sampai pada batas-batas pertumbuhan dimana dunia akan mengalami malapetaka. Batas-batas pertumbuhan tersebut antara lain dapat dilihat pada:

1. *Ketersediaan pangan yang makin terbatas*

Semakin terbatasnya persediaan pangan yang disebabkan berkurangnya tanah pertanian. Hasil penelitian MIT menemukan bahwa tanah yang baik untuk pertanian di bumi ini hanya sekitar 3,2 milyar hektar. Sekitar separuh dari jumlah itu, (yang subur dan termudah

dicapai) sudah digarap. Sisanya memerlukan modal yang sangat besar untuk dapat ditanami tanaman pangan, baik untuk mencapainya, membukanya, mengairinya maupun memupuknya. Sementara menurut FAO membuka tanah baru untuk pertanian sekarang ini sudah tidak ekonomis lagi. Akibatnya produksi pangan per kapita makin hari makin mengecil. Untuk tiap tambahan satu orang diperlukan tanah sekitar 0,08 sampai 0,172 hektar untuk rumah, jalan, pembuangan sampah, kawat listrik dan untuk tujuan-tujuan yang pada hakekatnya “meratakan dan mengeraskan” tanah pertanian sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk menghasilkan pangan.

Terkait dengan keterbatasan tanah pertanian ini, batas lain adalah ketersediaan air tawar. Air tawar yang mengalir setiap tahun dipermukaan tanah bumi ini memiliki batas tertingginya. Sementara itu permintaan akan air tawar juga meningkat menurut deret ukur.

2. Semakin Berkurangnya Unrenewable resources

Keterbatasan sumber daya yang tidak dapat diperharui juga merupakan salah satu yang pada akhirnya dapat menjadi pembatas pertumbuhan penduduk. Pada saat ini persediaan platina, emas, seng dan timah hitam tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pada tahun 2050 diperkirakan persediaan beberapa mineral akan habis jika laju pemakaian masih seperti sekarang ini. Cadangan kromium diperkirakan akan habis untuk 95 tahun mendatang (sejak buku ini ditulis, 1970-an). Persediaan tembaga diperkirakan hanya cukup untuk 21 tahun atau 48 tahun kalau cadangan naik lima kali lipat. Keadaan ini juga diikuti oleh ketimpangan pemakaian sumber daya alam tersebut. Negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Jepang menjadi negara pemakai terbesar dari sumberdaya alam yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang.

3. Meningkatnya Pencemaran

Meningkatnya pencemaran merupakan salah satu dari aspek batas-batas pertumbuhan. Hal ini disebabkan adanya fakta yang menunjukkan hampir semua zat pencemar yang pernah diukur mengalami peningkatan menurut deret ukur. Beberapa zat pencemar berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, industri dan kemajuan teknologi. Dewasa ini sekitar 97% energi untuk industri berasal dari bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi dan gas alam). Bila dibakar bahan-bahan tersebut melepaskan karbon dioksida (CO₂) ke udara. Diperkirakan CO₂ yang terlepas setiap tahun akibat pembakaran bahan bakar fosil sekitar 20 milyar ton. Disamping CO₂, timah hitam dan merkuri juga dilepaskan oleh kendaraan, pusat pembakaran sampah, industri dan obat hama ke udara. DDT yang merupakan bahan kimia organik buatan manusia dilepaskan kedalam lingkungan dalam bentuk obat hama kira-kira 100.000 ton setiap tahun. DDT setelah disemprotkan sebagian akan menguap dan dibawa udara jauh sekali sebelum jatuh kembali ke tanah atau lautan.

Adanya keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki bumi tersebut menyebabkan perlunya ditemukan suatu titik keseimbangan baru. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam memilih penggunaan sumber-sumber tersebut menjadi tak terhindarkan. Karena terdapat keterbatasan sumber daya di satu sisi dan besarnya keinginan/kebutuhan di sisi lain maka analisis ekonomi akibat dinamika penduduk menjadi penting dilakukan.

3.5. Posisi Penduduk dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi

3.5.1. Adam Smith

Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sumber-sumber alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah jumlah penduduk dan stok kapital yang ada.

Jika output terus meningkat sehingga sumber-sumber alam akhirnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya maka sumber alam akan membatasi output. Unsur sumber alam akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas dicapai.

Dalam proses pertumbuhan output, unsur jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Berapapun jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk.

Penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistensi yaitu tingkat upah minimum untuk seseorang agar dapat mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upah berada diatas tingkat subsistensi, maka orang-orang akan kawin pada umur lebih muda, kematian anak berkurang dan jumlah kelahiran bertambah. Sebaliknya, jumlah penduduk akan berkurang apabila tingkat upah berada dibawah upah subsistensi. Dalam kondisi ini kematian anak meningkat dan banyak perkawinan akan tertunda.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa tingkat upah memiliki peranan penting sebagai pengatur pertumbuhan penduduk. Tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Jika pertumbuhan permintaan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan penawarannya, maka tingkat upah akan naik. Sebaliknya, apabila permintaan tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk maka tingkat upah turun. Jika tingkat upah berada dibawah tingkat upah subsistensi, maka laju pertumbuhan penduduk itu sendiri berubah menjadi negatif.

Pada tingkat upah subsistensi jumlah penduduk akan relatif konstan. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok kapital (K) dan tingkat output masyarakat (Q). Permintaan tenaga bersumber dari adanya kebutuhan dalam proses produksi. Oleh karenanya, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok kapital (akumulasi kapital) dan laju pertumbuhan output. Tingkat upah yang tinggi hanya dijumpai di negara-negara yang tumbuh cepat, dan tingkat upah yang rendah di negara-negara yang tumbuh kurang cepat.

Proses pertumbuhan ekonomi tidaklah berlangsung tanpa batas. Akhirnya setiap perekonomian akan sampai pada posisi stasionernya. Pada posisi ini kapital dan output tidak lagi tumbuh, permintaan tenaga kerja tidak lagi tumbuh dan tingkat upah akan tertekan turun sampai pada tingkat upah subsistensi. Pada posisi ini penduduk berhenti tumbuh. Jumlah penduduk yang mati sama dengan jumlah yang lahir. Investasi hanya dilakukan untuk mengganti kapital yang rusak. Ini semua terjadi karena perekonomian sudah mencapai perkembangan maksimal yang bisa didukung oleh sumber-sumber alam yang ada.

3.5.2. David Ricardo

Seperti pada Teori Adam Smith, tema dari proses pertumbuhan ekonomi Ricardo masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya menang, dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai posisi stationer. Faktor produksi sumber alam (tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas.

Perekonomian Ricardo ditandai oleh ciri-ciri (a) tanah terbatas jumlahnya; (b) tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung apakah tingkat upah berada diatas atau dibawah upah alamiah (*natural wage*); (c) akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan pemilik kepaital berada diatas tingkat keuntungan minimal; (d) dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, dan; (e) sektor pertanian dominan.

Dengan terbatasnya tanah maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun (the law of deminishing return). Selama buruh yang dipekerjakan menerima tingkat upah diatas tingkat upah “alamiah” maka penduduk akan terus bertambah, dan ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja, dan selanjutnya menekan ke bawah tingkat upah. Proses ini berhenti apabila tingkat upah turun pada tingkat upah alamiah. Apabila tingkat upah turun dibawah tingkat upah alamiah maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik kembali pada tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk kosntan.

Proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya proses tarik menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu (a) the law of deminishing return, dan; (b) kemajuan teknologi, yang pada akhirnya akan

dimenangkan oleh the law of diminishing return. Akhirnya keterbatasan faktor produksi tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Ricardo, *suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber alamnya.*

Ramalan Ricardo mengenai pertumbuhan penduduk ternyata keliru. Perbaikan tingkat upah (dan tingkat hidup) diatas tingkat subsistensi akan merangsang pertumbuhan penduduk, hanya benar bagi masyarakat yang masih pada taraf hidup yang rendah. Tetapi apabila taraf hidup bisa ditingkatkan secara berarti untuk jangka waktu yg lama maka pertumbuhan penduduk tidak lagi terpengaruh oleh tingkat upah. Sejarah menunjukkan pada tingkat upah yang tinggi justru ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk menurun dengan meningkatnya pendapatan. Dan pada tingkat pendapatan yg lebih tinggi lagi penduduk cenderung untuk tidak tumbuh lagi (jumlah penduduk konstan).

3.5.3. Arthur Lewis

Model Lewis dikenal sebagai “model pertumbuhan dengan suplai tenaga kerja yang tak terbatas”. Pokok permasalahan yg dikaji Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dengan dua sektor (a) sektor tradisional, dengan produktifitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah, dan; (b) sektor modern, dengan produktifitas tinggi dan sumber akumulasi kapital.

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja bisa dipertemukan dengan kapital. Di sektor modern tenaga kerja dibayar sesuai marginal product of labour (MPL). Sedang di sektor tradisional karena tenaga kerja berlimpah dan produktivitas rendah maka tenaga

kerja dibawah pada tingkat upah subsistensi (sejalan dengan teori klasik Smith, Malthus dan Ricardo).

Upah yang diterima buruh akan dikonsumsi semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab upah yang mereka terima pada tingkat subsistensi. Tabungan dari kelompok buruh adalah nol. Sementara kelompok kapitalis tidak hidup pada tingkat subsistensi karena itu mereka bisa menabung. Jumlah tabungan (surplus) kemudian diinvestasikan kembali (investible surplus). Investasi akan menambah stok kapital. Stok kapital yg lebih besar di sektor modern akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya jumlah buruh yang dipekerjakan di sektor modern pun bertambah.

Ketika jumlah buruh yang diserap sektor modern makin besar dan karenanya jumlah buruh menjadi makin langka maka kehidupan para buruh mulai membaik. Hal itu bisa terjadi tergantung pada (a) tingkat pertumbuhan penduduk, (b) tingkat akumulasi kapital yang dipengaruhi oleh propensity to save dan propensity to invest dari golongan kapitalis, dan; (c) efektivitas kapital yang diinvestasikan (ICOR).

Lewis (tidak seperti Smith, Malthus & Ricardo) tidak menekankan aspek (a) keterbatas sumber alam (tanah), dan; (b) pertumbuhan penduduk yang dirangsang oleh tingkat upah diatas tingkat subsistensi.

3.5.4. J. Schumpeter

Dalam jangka panjang tingkat hidup orang bisa ditingkatkan terus dengan kemajuan teknologi. Schumpeter tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk dan aspek keterbatasan alam. Laju pertumbuhan penduduk dianggap diketahui dan tidak ditekankan dalam model. Masalah penduduk tidak dianggap sebagai masalah sentral dari

proses pertumbuhan ekonomi. Seperti para ekonom modern, ia optimis akan kemampuan teknologi sehingga “batas-batas pertumbuhan” tidak masuk dalam proses evolusi yang digambarkan.

Schumpeter berpendapat motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses “inovasi” yang dilakukan oleh para “entrepreneur”. Inovasi berbeda dengan invensi. Invensi adalah penemuan. Sedangkan inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia komersial. Inovator tidak harus inventor. Inovator bukan sekedar manajer (yang menjalankan hal-hal rutin) melainkan entrepreneur yang berani mengambil resiko dalam menerapkan hal-hal baru. Pada tahap selanjutnya hasil inovasi akan diikuti dengan imitasi. Dengan imitasi maka monopoli oleh inovator menjadi berkembang.

Schumpeter membedakan antara pertumbuhan (growth) dan perkembangan ekonomi (development). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi tanpa adanya perubahan cara (teknologi) produksi. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur.

3.5.5. Harrod-Domar

Dalam Model Harrod-Domar, terdapat dua fungsi produksi yaitu $Q_p = hK$ dan $Q_n = nN$. Dimana Q adalah output potensi, K kapital, h = output capital ratio, N = jumlah tenaga kerja yang tersedia dan n adalah labour-output ratio.

Fungsi pertama adalah fungsi yang menghubungkan output dan kapital, sedangkan fungsi kedua adalah fungsi yang menghubungkan

output dan tenaga kerja. Kedua fungsi produksi tersebut memiliki koefisien yang tidak bisa berubah.

Harrod-Domar memperkenalkan konsep *warranted rate of growth* dan *natural rate of growth*. *Warranted rate of growth* berkaitan dengan keseimbangan di pasar barang atau keseimbangan antara permintaan agregat dan output potensial yaitu output yang maksimal bisa dihasilkan dari stok kapital yang ada. Output sendiri tidak hanya dihasilkan dengan menggunakan kapital, tetapi juga dengan menggunakan faktor produksi lain seperti tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang tersedia pada suatu waktu juga bisa menentukan output potensial. Jadi selain ada tingkat output potensial dilihat dari stok kapital, ada juga output potensial yang dilihat dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. *Natural rate of growth* diartikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi yang disyaratkan oleh pasar tenaga kerja agar tidak terjadi tenaga kerja yang menganggur (*full employment*). Sebagai contoh, jumlah penduduk meningkat dengan 2% per tahun dan produktivitas setiap buruh meningkat 3% pertahun maka *natural rate of growth* bagi perekonomian tersebut adalah 5%.

Menurut Harrod-Domar, jika laju pertumbuhan lebih kecil dari *warranted rate of growth*, maka perekonomian akan mengalami kelebihan kapasitas yang semakin lama semakin parah. Apabila laju pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dari *warranted rate of growth* maka akan ada kecenderungan bagi permintaan agregat untuk semakin melebihi output potensial sehingga menimbulkan tekanan inflasi yang justru semakin parah.

Dalam jangka panjang keadaan yang paling ideal adalah jika perekonomian tumbuh pada jalur *warranted rate of growth* dan sekaligus juga pada jalur *natural rate of growth*. Dengan demikian pasar barang maupun pasar tenaga kerja ada pada posisi keseimbangannya, atau stok

kapital dan tenaga kerja yang ada semua dimanfaatkan secara penuh (full employment).

3.5.6. Solow-Swan

Model Neo Klasik Solow-Swan, menggunakan fungsi produksi yang lebih umum, yaitu $Q = f(K,L)$ yang memungkinkan berbagai kombinasi penggunaan K (kapital) dan L (tenaga kerja) untuk mendapatkan suatu tingkat output. Ada empat anggapan yang melandasi model Neo-Klasik (a) tenaga kerja (atau penduduk), L , tumbuh dengan laju tertentu; (b) adanya fungsi produksi $Q=f(K,L)$ yang berlaku bagi setiap periode; (c) adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat; (d) semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Dalam model Neo-Klasik (berbeda dengan model Keynesian) tidak lagi mempermasalahkan keseimbangan S dan I . Dengan demikian masalah *warranted rate of growth* tidak lagi relevan.

3.6. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Wacana mengenai pembangunan berwawasan kependudukan pada dasarnya sudah lama menjadi wacana yang berkembang di berbagai negara di dunia. Namun demikian, implementasinya terutama di negara-negara berkembang masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Masih relatif kurangnya implementasi strategi pembangunan berwawasan kependudukan disebabkan masih kuatnya orientasi pemerintah di negara-negara tersebut untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang.

Pada dasarnya, menggunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, akan terdapat suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur.

Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu :

1. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.
2. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. (Tjiptoherijanto,2005)

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan suatu negara. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu

meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.

2. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Oleh karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

FERTILITAS DAN PEMBANGUNAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar fertilitas yang mencakup pengertian dan pengukurannya serta pola hubungan antara fertilitas dan pembangunan

4.1. Pengertian dan Pengukuran Fertilitas

Studi tentang fertilitas merupakan studi yang penting di bidang kependudukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: (1) fertilitas bertanggungjawab atas penggantian secara biologis dan kelangsungan hidup suatu masyarakat; (2) angka fertilitas mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk secara positif, yang berarti kenaikan (penurunan) angka jumlah penduduk; (3) fertilitas yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah sosial dan politik.

Terdapat tiga pengertian dasar dalam fertilitas yaitu (1) Kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara riil untuk melahirkan; (2) Hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan

atau sekelompok perempuan dan (3) Tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup.

Istilah fertilitas berbeda dengan istilah fekunditas. Fekunditas mengacu pada kemampuan fisiologis dari individu atau pasangan untuk memiliki anak. Individu mungkin mengalami ketidak mampuan melahirkan anak (infekun) karena penyakit atau disfungsi genetik.

Selain itu, terdapat beberapa istilah dalam analisis fertilitas yang perlu diketahui

1. Lahir hidup (live birth) : kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan
2. Lahir mati (still birth) : kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan
3. Abortus : kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Ada dua macam abortus yaitu disengaja (induced) dan tidak disengaja (spontaneous)
4. Masa reproduksi (childbearing age) : masa dimana perempuan mampu melahirkan, yang disebut juga usia subur.

Selanjutnya, pengukuran fertilitas dapat dibagi atas dua kelompok utama yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan mencerminkan fertilitas suatu kelompok penduduk/berbagai kelompok penduduk untuk jangka waktu satu tahun dan disebut juga dengan "current fertility". Pengukuran fertilitas kumulatif mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya.

Dalam fertilitas tahunan terdapat beberapa ukuran yaitu :

1. CBR (*Crude Birth Rate*) / *Angka Kelahiran Kasar*

Jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun.

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

B = jumlah kelahiran dalam setahun

P = jumlah penduduk pertengahan tahun

k = konstanta = 1000

Pengukuran fertilitas dengan CBR ini memiliki keunggulan karena perhitungannya relatif sederhana dan hanya memerlukan keterangan atau data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Namun demikian, hasil pengukurannya masih kasar karena tidak memisahkan penduduk yang beresiko melahirkan (*exposed to risk*) yaitu perempuan usia reproduksi (15 – 44 tahun atau 15 – 49 tahun) dengan yang tidak beresiko melahirkan (yaitu laki-laki, serta perempuan diluar usia reproduksi -- anak-anak atau orang tua)

Contoh perhitungan:

Banyaknya kelahiran di Propinsi A pada tahun 2005 adalah 120.885 orang bayi, sedangkan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 2005 sebesar 3.526.900 orang.

Dengan demikian, CBR Provinsi A pada tahun 2005 adalah:

$$\frac{120885}{3526900} \times 1000 = 34,3 \text{ perseribu penduduk}$$

Artinya: terdapat rata-rata 34,2 kelahiran perseribu penduduk di Propinsi A pada tahun 2005

2. *GFR (General Fertility Rate)/ Angka Fertilitas Umum*

Jumlah kelahiran per 1000 perempuan pada usia reproduksi dalam periode tertentu

$$CBR = \frac{B}{P_{f(15-49)}} \times k$$

Pf15-49 = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun

Ukuran GFR ini lebih cermat dibandingkan CBR karena hanya memasukkan perempuan yg berumur 15-49 th atau 15-44 th sebagai penduduk yang beresiko melahirkan (exposed to risk). Namun demikian, ukuran ini masih memiliki kelemahan karena tidak membedakan resiko melahirkan dari berbagai kelompok umur sehingga perempuan yg berumur lebih 40 tahun dianggap sama risikonya dengan perempuan yg berumur 20 th

Contoh perhitungan:

Banyaknya kelahiran di Propinsi A pada tahun 2005 adalah 120.885 orang bayi, sedangkan jumlah perempuan umur 15 – 49 tahun pada pertengahan tahun 2005 sebanyak 1.005.325 orang.

Dengan demikian, GFR Provinsi A pada tahun 2005 adalah:

$$\frac{120885}{1005325} \times 1000 = 120,5 \text{ perseribu penduduk perempuan usia 15-49 tahun}$$

3. *ASFR (Age Spesific Fertility Rate)/ Angka Fertilitas Menurut Umur*

Jumlah kelahiran per 1000 perempuan menurut kelompok umur dalam usia reproduksi pada satu periode tertentu

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_{fi}} \times k$$

B_i = jumlah kelahiran dalam kelompok umur i dalam setahun

P_{fi} = jumlah penduduk perempuan pertengahan tahun kelompok umur i

Ukuran ASFR memiliki keunggulan diantaranya:

- Ukurannya lebih cermat dari GFR karena sudah membagi penduduk yang terpapar ke dalam berbagai kelompok umur.
- Dapat dianalisis perbedaan fertilitas (current fertility) menurut berbagai karakteristik perempuan
- Dapat dilakukan studi fertilitas menurut kohor
- ASFR ini merupakan dasar untuk penghitungan ukuran fertilitas dan reproduksi selanjutnya (TFR, GRR, dan NRR)

Sedangkan kelemahan pengukuran ASFR ini adalah:

- Memerlukan data yang terinci yaitu banyaknya kelahiran untuk tiap kelompok umur.
- Tidak menunjukkan ukuran fertilitas untuk keseluruhan perempuan umur 15 – 49 tahun

Tabel 4.1. Contoh Perhitungan ASFR Propinsi A Tahun 2005

Umur	Penduduk Perempuan	Kelahiran	ASFR
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2) x 1000
15 – 19	228511	10470	46
20 – 24	179456	27128	151
25 – 29	173246	33315	192
30 – 34	140957	32839	233
35 – 39	130400	11898	91
40 – 44	95006	4759	50
45 – 49	57749	476	8
Jumlah	1005325	120885	

Didalam pengukuran fertilitas kumulatif terdapat beberapa ukuran:

1. *TFR (Total Fertility Rate)/ Angka Fertilitas Total*

Yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, jika perempuan tersebut mengikuti angka fertilitas pada tahun yang bersangkutan. Jadi TFR merupakan jumlah ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan 1 tahun

Rumus: $TFR = 5 \sum ASFR_i$

ASFR = angka kelahiran menurut kelompok umur

i = kelompok umur 5 tahun, dimulai dari 15 – 49

Contoh perhitungan:

Dari tabel sebelumnya (tabel 4.1.), TFR Propinsi A dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{TFR} &= 5 (46+151+192+233+91+50+8) \\ &= 5 (772) \\ &= 3859 \text{ per } 1000 \text{ perempuan usia } 15 - 49 \text{ tahun atau rata-rata} \\ &\quad 3,9 \text{ orang anak dilahirkan oleh tiap perempuan usia } 15 - 49 \\ &\quad \text{tahun} \end{aligned}$$

2. *GRR (Gross Reproduction Rate)/ Angka Reproduksi Bruto*

Rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya, dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya.

GRR dapat dihitung dengan cara:

1. Jika diasumsikan rasio jenis kelamin (seks rasio) pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan oleh tiap kelompok usia adalah sama, maka:

$$GRR = \frac{100}{100 + SR_0} \times TFR$$

Dimana: SR_0 adalah seks rasio pada saat lahir.

Contoh perhitungan:

Jika diasumsikan seks rasio waktu lahir di Propinsi A pada tahun 2005 (dalam contoh sebelumnya) adalah 105, maka:

$$GRR = \frac{100}{100 + 105} \times 3859 = 1882,4 \text{ perseribu perempuan usia } 15-49$$

tahun atau rata-rata 1,88 orang anak yang dilahirkan oleh seorang

perempuan selama hayatnya dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya.

2. Jika diketahui banyaknya bayi perempuan untuk masing-masing kelompok usia ibu, maka:

$$GRR = 5 \sum ASFR_{fi}$$

$ASFR_{fi}$ = ASFR yang dihitung hanya untuk kelahiran bayi perempuan pada kelompok umur reproduksi

Tabel 4.2. Contoh Perhitungan GRR Propinsi A Tahun 2005

Umur	Penduduk Perempuan	Kelahiran bayi perempuan	$ASFR_{fi}$
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2) x 1000
15 – 19	228511	5007	22
20 – 24	179456	13233	74
25 – 29	173246	16300	94
30 – 34	140957	16019	114
35 – 39	130400	5603	43
40 – 44	95006	2321	24
45 – 49	57749	210	4
Jumlah	1005325	58693	

$$GRR = 5 (22+74+94+114+43+24+4)$$

$$= 5 (374)$$

= 1872 per 1000 perempuan usia 15 – 49 tahun atau 1,9 tiap perempuan usia 15 – 49 tahun.

Artinya: rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan usia 15 – 49 tahun selama hayatnya dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya adalah sebanyak 1,9 orang

3. *NRR (Net Reproduction Rate)/ Angka Reproduksi Neto*

Rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya, dan akan tetap hidup sampai dapat menggantikan kedudukan ibunya, dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya.

$$\text{Rumus : } NRR = 5 \sum ASFR_{fi} \times {}^5L_x/L_0$$

${}^5L_x/L_0$ = probabilita kematian bayi dalam usia reproduksi (dari tabel kematian)

Tabel 4.3. Contoh Perhitungan NRR Propinsi A Tahun 2005

Umur	ASFR _{fi}	Rasio masih hidup hingga usia ibunya	Bayi yang diharapkan tetap hidup per 1000 perempuan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (3)
15 – 19	22	0.9721	21.300
20 – 24	74	0.9701	71.535
25 – 29	94	0.9623	90.539
30 – 34	114	0.9587	108.951
35 – 39	43	0.9511	40.867
40 – 44	24	0.9402	22.969
45 – 49	4	0.9305	3.384
Jumlah			359.544

Dengan demikian, NRR Propinsi A pada tahun 2005 adalah:

$NRR = 5 \times 359.544 = 1797,72$ perseribu perempuan atau 1,8 perempuan usia 15 – 49 tahun.

Ini berarti bahwa rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan seorang perempuan dan akan tetap hidup sampai dapat menggantikan ibunya adalah sebanyak 1,8 orang.

4.2. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas

Untuk menjelaskan perbedaan fertilitas antar negara maupun antar daerah, terdapat kesepakatan yang diterima oleh sebagian besar ahli dan peneliti dalam bidang kependudukan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi budaya hanya dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap fertilitas melalui variabel antara. Dengan kata lain, keterkaitan pembangunan terhadap fertilitas juga hanya bersifat tidak langsung melalui variabel antara tersebut.

Dalam konteks ini, Davis dan Blake (1956) dalam Lucas (1982) mengemukakan variabel antara tersebut mencakup tiga tahap penting dari proses reproduksi manusia yaitu (1) tahap hubungan kelamin (intercourse); (2) tahap konsepsi (conception) dan (3) tahap kehamilan (gestation). Ketiga tahap tersebut dirinci dalam 11 variabel antara yang berpengaruh secara langsung terhadap fertilitas sebagai berikut:

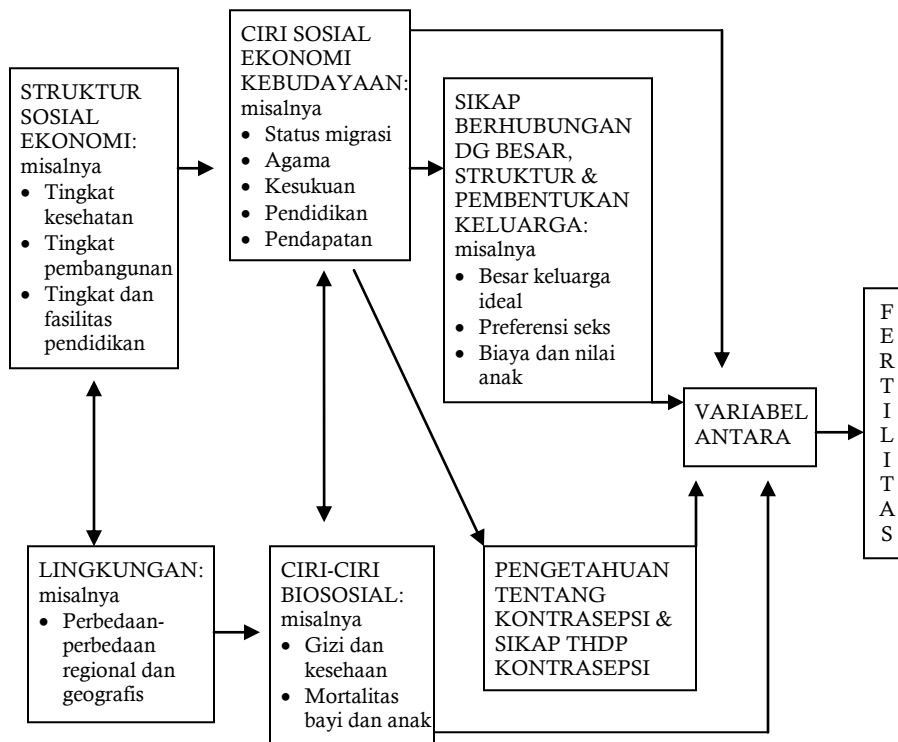
- I. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan seks (intercourse)
 - A. Meliputi dimulai dan diakhirinya hubungan seks (ikatan seksual) dalam usia reproduksi
 1. Usia memulai hubungan seks

2. Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan seks
 3. Perpisahan pada usia reproduksi
- B. Meliputi kemungkinan hubungan seks selama dalam ikatan seksual
4. Abstinensi dengan sengaja
 5. Abstinensi karena terpaksa (karena impoten, sakit, perpisahan yang tak terelakkan tetapi sifatnya sementara)
 6. Frekuensi hubungan seks (tidak termasuk periode abstinensi)
- II. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi (conception)
7. Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang tidak disengaja
 8. Digunakan atau tidaknya kontrasepsi
 9. Kesuburan dan kemandulan yang disengaja (sterilisasi, subinsisi, perawatan medis dan lain-lain)
- III. Faktor-faktor yang mempengaruhi gestasi dan kelahiran dengan selamat (gestation)
10. Mortalitas janin yang tidak disengaja
 11. Mortalitas janin yang disengaja

Dengan menggunakan variabel antara ini, berbagai kerangka pemikiran telah dikembangkan untuk melihat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap fertilitas. Diantaranya seperti yang digunakan dalam Survei Fertilitas Dunia (WFS,1977) sebagaimana gambar berikut:

(Catatan: kerangka yang sama juga dapat dilihat pada Jones (1977) dan Freedman (1975))

Gambar 4.1. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas



Pembangunan yang dilaksanakan akan berdampak pada perubahan struktur sosial ekonomi dan lingkungan. Namun demikian, dari kerangka pemikiran tersebut juga memperlihatkan adanya pengaruh timbal balik antara struktur sosial ekonomi dan lingkungan.

Struktur sosial ekonomi akan mempengaruhi ciri sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan dalam ciri sosial, ekonomi dan kebudayaan ini dapat secara langsung mempengaruhi variabel antara dan selanjutnya variabel antara akan mempengaruhi fertilitas. Namun demikian, perubahan dalam ciri sosial, ekonomi dan kebudayaan ini juga dapat mempengaruhi variabel antara secara tidak langsung melalui perubahan sikap yang berhubungan dengan besar, struktur dan pembentukan keluarga serta melalui perubahan pengetahuan tentang kontrasepsi dan sikap terhadap kontrasepsi.

Perubahan lingkungan selain memiliki hubungan timbal balik dengan struktur sosial ekonomi, juga mempengaruhi variabel antara secara tidak langsung melalui perubahan ciri-ciri bio-sosial. Dalam konteks ini, ciri-ciri biososial juga memiliki hubungan timbal balik dengan ciri-ciri sosial, ekonomi dan kebudayaan.

4.3. Fertilitas Dan Pembangunan: Kajian Empiris

Dalam bagian ini akan dibahas dua hasil penelitian yang berbasis data pada tingkat makro. Penelitian pertama memperlihatkan keterkaitan pembangunan terhadap fertilitas, dan penelitian yang kedua memperlihatkan keterkaitan fertilitas terhadap pembangunan.

4.3.1. Pengaruh Pembangunan Terhadap Penurunan Fertilitas : Kasus Bangladesh

Pembangunan yang dilaksanakan di Bangladesh, secara nyata telah berdampak pada penurunan fertilitas di negara tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan, aspek-aspek pembangunan (terutama pembangunan perdesaan) yang terkait dengan penurunan fertilitas di

Bangladesh diantaranya adalah pendidikan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, organisasi kesejahteraan masyarakat, serta listrik masuk desa. (Robey, 1988)

Pendidikan

Terdapat hubungan negatif antara pendidikan dengan fertilitas. Semakin tinggi pendidikan menunjukkan semakin sedikit jumlah anak lahir hidup. Dari penelitian yang dilakukan di Bangladesh ini menunjukkan bahwa pada perempuan yang berumur 25-29, rata-rata anak lahir hidup (ALH) mereka yang berpendidikan SLTA ke atas adalah 2,4 anak perempuan, sedangkan yang tidak sekolah adalah 4 anak perempuan.

Fakta ini memberikan arti pentingnya upaya-upaya peningkatan pendidikan terutama pendidikan wanita dalam rangka penurunan fertilitas dan usaha-usaha pengendalian pertumbuhan penduduk.

Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan di Bangladesh telah berdampak pada penurunan tingkat fertilitas di negara ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sekelompok perempuan desa yang bekerja, memperlihatkan bahwa pada mereka yang berumur 20-an, rata-rata anak yang dimiliki adalah 3,2. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional (6 anak), maupun rata-rata di kota (4,3 anak).

Organisasi Kesejahteraan Masyarakat

Program pelayanan bagi masyarakat desa telah berhasil meningkatkan prevalensi kontrasepsi. Keberhasilan itu dicapai karena

program dapat menciptakan pekerjaan bagi keluarga yang sangat miskin, serta memberikan pendidikan dalam hal-hal kesehatan (terutama ibu dan anak), gizi, KB dan baca tulis.

Listrik Masuk Desa

Di Bangladesh, program listrik masuk desa merupakan salah program yang mendapat prioritas tinggi dalam rencana pembangunan negara ini. Ketika program tersebut baru berjalan 3 tahun, pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas sudah terlihat nyata. Ditempat-tempat yang sudah terjangkau listrik, penerimaan dan praktek KB lebih besar daripada di tempat-tempat yang belum terjangkau listrik. Elektrifikasi membantu menurunkan fertilitas karena perempuan lebih banyak punya waktu dan kebebasan melakukan diskusi baik dengan keluarga sendiri maupun keluarga lain. Elektrifikasi juga menumbuhkan kepercayaan bahwa kehidupan anak-anak di masa mendatang akan menjadi lebih baik.

4.3.2. Pengaruh Penurunan Fertilitas terhadap Pembangunan : Kasus negara-negara di Asia

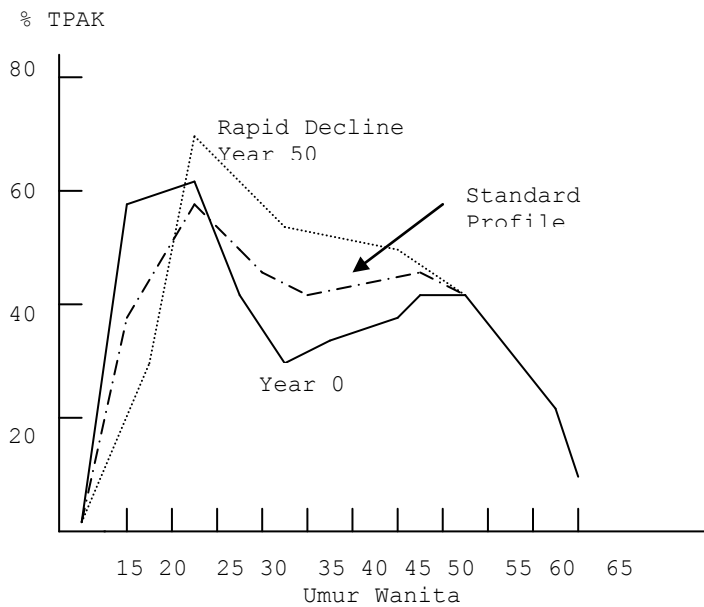
Pengujian data dengan menggunakan model ekonometrik pada negara-negara di Asia, menunjukkan pengaruh yang nyata dari penurunan fertilitas terhadap percepatan pembangunan. Penurunan fertilitas yang cepat telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang terlibat aktif dalam produksi, meningkatkan investasi pendidikan perkapita sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan angka tabungan yang berdampak pada peningkatan investasi, meningkatkan pertumbuhan GNP dan akhir meningkatkan pendapatan perkapita. (Robey, 1987)

Penurunan Fertilitas terhadap Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penurunan fertilitas telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, yang memberikan arti semakin meningkatnya penduduk yang berpartisipasi dalam produksi yang akan meningkatkan pendapatan nasional.

Gambar 4.2. berikut ini menunjukkan bahwa pada permulaan pembangunan (kurva year 0), persentase perempuan umur 25-29 tahun yang masuk pasar kerja hanya sebesar 41 %. Setelah pembangunan berjalan selama 50 tahun (kurva year 50), pada negara-negara yang fertilitasnya turun cepat, partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat menjadi 61 %. Namun, pada negara-negara dengan penurunan fertilitasnya sesuai dengan rata-rata penurunan dunia (standard), partisipasi angkatan kerja perempuannya hanya menjadi 47 %.

Gambar 4.2. Hubungan Antara Fertilitas dan TPAK Perempuan



Pendidikan

Ketika fertilitas turun dengan cepat, penduduk usia sekolah juga akan menurun. Data pada negara-negara di Asia menunjukkan, pada awal pembangunan 14,7 % penduduk terdaftar masuk sekolah. Setelah 20 tahun pembangunan, pada negara-negara dengan fertilitasnya turun sangat cepat, persentase penduduk terdaftar masuk sekolah meningkat menjadi 18,7 % dan setelah 50 tahun turun menjadi 17,9 %. Sebaliknya, pada negara-negara dengan fertilitas turun sesuai dengan rata-rata penurunan dunia, angka tersebut hanya turun 17,7 persen setelah 20 tahun pembangunan dan bahkan mengalami peningkatan menjadi 21,2 % setelah 50 tahun pembangunan.

Penurunan penduduk terdaftar masuk sekolah (yang disebabkan penurunan yang cepat dari fertilitas), akan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan, penurunan penduduk terdaftar masuk sekolah tidak mengurangi anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan meningkat sesuai dengan peningkatan pembangunan.

Angka Tabungan

Pertumbuhan penduduk yang turun tajam (sebagai akibat penurunan fertilitas) merupakan kekuatan utama di balik angka tabungan suatu negara. Hal ini terlihat nyata pada negara-negara di Asia.

Selama 50 tahun pertama pembangunan, negara-negara dengan penurunan fertilitas sesuai dengan rata-rata penurunan dunia memiliki angka tabungan 20,3 persen dari GNP nya. Sebaliknya pada negara-negara dengan fertilitas turun cepat, angka tersebut mencapai 29,8 persen.

Peningkatan yang pesat dari angka tabungan ini akan mendorong percepatan investasi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan GNP menjadi lebih cepat.

Pendapatan Perkapita

Dalam 10 tahun pertama pembangunan, pengaruh penurunan fertilitas yang cepat terhadap peningkatan pendapatan perkapita, tidaklah terlalu besar. Perbedaan antara negara dengan fertilitas kategori turun cepat dan kategori standar hanya 2 dolar. Namun, ketika pembangunan telah berjalan selama 40 tahun, pendapatan perkapita di negara dengan kategori fertilitas turun cepat naik 2 kali lipat lebih besar dibandingkan negara-negara kategori standar. Setelah 50 tahun pembangunan, kenaikan itu mendekati 3 kali lipat yaitu 1468 dolar di negara-negara kategori turun cepat, dan 525 dolar di negara-negara kategori standar.

MORTALITAS, MORBIDITAS DAN PEMBANGUNAN

Bab ini akan memberikan pemahaman dan penjelasan konsep dasar (pengertian dan pengukuran) mortalitas (kematian) dan morbiditas (kesakitan) serta keterkaitan mortalitas dan morbiditas terhadap pembangunan, melalui pendekatan teori transisi epidemiologi

5.1. Pengertian dan Istilah Dasar

United Nation (UN atau PBB) dan World Health Organizations (WHO) mendefinisikan kematian sebagai keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasanya terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Selanjutnya, sakit didefinisikan sebagai keadaan tidak sempurna jasmani, rohani dan sosial. Kejadian kesakitan (*illnes*) dapat diamati melalui keluhan, gejala dan tanda-tanda. Kejadian kesakitan lebih kompleks dibandingkan kejadian kematian, karena ada banyak jenis penyakit yang timbul dari satu keluhan/gejala/tanda-tanda.

Sebaliknya juga ada banyak keluhan/ gejala/tanda-tanda yang timbul dari satu jenis penyakit.

Mortalitas dan morbiditas (secara intrinsik adalah hidup dan kesehatan) adalah subjek dari ekonomi kependudukan yang dapat dipandang secara khusus sebagai suatu aset positif dalam pembangunan (Sen, 1998). Namun demikian, kajian ekonomi terhadap mortalitas, relatif kurang berkembang jika dibandingkan kajian terhadap fertilitas. Ekonomi mortalitas merupakan topik yang relatif kurang dibahas, meskipun terdapat bukti bahwa pola mortalitas juga berubah sedemikian rupa hingga penting artinya bagi kesejahteraan umat manusia.

Relatif kurangnya kajian ekonomi terhadap mortalitas disebabkan bahwa kematian pada dasarnya bukan merupakan suatu “pilihan”. Padahal, dalam konteks ilmu ekonomi, pilihan merupakan hal yang penting. Namun dalam kaitan ekonomi mortalitas, yang menjadi pilihan bukan mati, melainkan sakit atau sehat. Oleh karena itu analisis yang berkembang adalah mengenai ekonomi kesehatan. Dalam ekonomi kesehatan dibahas implikasi ekonomi dari sakit, biaya yang harus dikeluarkan jika seseorang sakit, investasi di bidang kesehatan dan lain sebagainya (Mundiharno,1998)

5.2. Ukuran-Ukuran Mortalitas

Terdapat berbagai ukuran mortalitas. Diantaranya yang umum digunakan adalah:

1. *CDR (Crude Death Rate) / Angka Kematian Kasar*

Jumlah kematian per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun.

$$\text{Rumus: } CDR = \frac{D}{P} \times k$$

dimana:

D = jumlah kematian dalam setahun

P = jumlah penduduk pertengahan tahun

k = konstanta = 1000

Contoh perhitungan:

Banyaknya kematian di Propinsi A pada tahun 2005 adalah 57884 orang, sedangkan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 2005 sebesar 3.526.900 orang.

Dengan demikian, CDR Provinsi A pada tahun 2005 adalah:

$$\frac{57884}{3526900} \times 1000 = 16,4 \text{ perseribu penduduk}$$

2. *ASDR (Age Spesific Death Rate)/ Angka Kematian Menurut Umur*

Jumlah kematian per 1000 penduduk menurut kelompok umur dalam suatu periode tertentu

$$\text{Rumus: } ASDR_i = \frac{D_i}{P_i} \times k$$

dimana:

D_i = jumlah kematian dalam kelompok umur i dalam setahun

P_i = jumlah penduduk pertengahan tahun kelompok umur i

Tabel 5.1. Contoh Perhitungan ASDR Propinsi A Tahun 2005

Umur	Penduduk	Kematian	ASDR
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2) x 1000
0 - 4	342127	6251	18.27
5 - 9	362884	700	1.93
10 - 14	337805	513	1.52
15 - 19	304001	714	2.35
20 - 24	268114	992	3.70
25 - 29	257370	1006	3.91
30 - 34	210576	838	3.98
35 - 39	246340	1261	5.12
40 - 44	201551	1098	5.45
45 - 49	219937	1920	8.73
50 - 54	179948	1952	10.85
55 - 59	176439	4467	25.32
60 - 64	144359	5790	40.11
65+	275449	30379	110.29
Jumlah	3526900	57884	

3. *IMR (Infant Mortality Rate)/Angka Kematian Bayi*

Ukuran Infant Mortality Rate (IMR) menggambarkan Jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun untuk setiap 1000 kelahiran hidup, selama satu periode tertentu. Dalam prakteknya, perhitungan IMR ini sulit dilakukan karena ketidaktersediaan data untuk

perhitungannya. Oleh karenanya, IMR umumnya dihitung dengan metode tidak langsung (yang tidak dibahas dalam buku ini).

$$\text{Rumus: } IMR = \frac{D_0}{B} \times k$$

dimana:

D_0 = jumlah bayi (penduduk usia dibawah 1 tahun)

B = jumlah kelahiran dalam satu tahun tertentu

Misalnya IMR di Propinsi A pada tahun 2005 adalah sebesar 86. Ini berarti pada tahun 2005 terjadi kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun sebanyak 86 orang untuk setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tersebut.

5.3. Ukuran-Ukuran Morbiditas

Sebagaimana halnya pada mortalitas, juga terdapat berbagai ukuran-ukuran morbiditas. Diantara ukuran-ukuran morbiditas yang umum digunakan adalah:

1. *Incidence Rate*

Merupakan ukuran untuk melihat jumlah penderita baru per 1000 penduduk at risk (yang menanggung resiko)

$$\text{Incidence Rate} = \frac{\text{Jumlah Penderita Baru}}{\text{Population at risk}} \times 1000$$

2. *Prevalence Rate*

Merupakan ukuran untuk melihat jumlah penderita lama dan baru per 1000 penduduk at risk

$$\text{Prevalence Rate} = \frac{\text{Jumlah Penderita Lama dan Baru}}{\text{Population at risk}} \times 1000$$

3. *Duration of Sickness*

$$\text{Duration of Sickness} = \frac{\text{Jumlah Hari Kejadian Sakit pada Periode tsb}}{\text{Jumlah kejadian sakit}}$$

5.4. Teori Transisi Epidemiologi

Salah satu teori yang menganalisis kaitan antara mortalitas, morbiditas dan pembangunan adalah teori transisi epidemiologi. Teori transisi epidemiologi memfokuskan pembahasan pada perubahan-perubahan kompleks dalam pola-pola kesehatan dan penyakit dalam masyarakat, serta pada faktor penentu dan akibat keadaan kependudukan dan sosial-ekonomi, masyarakat.

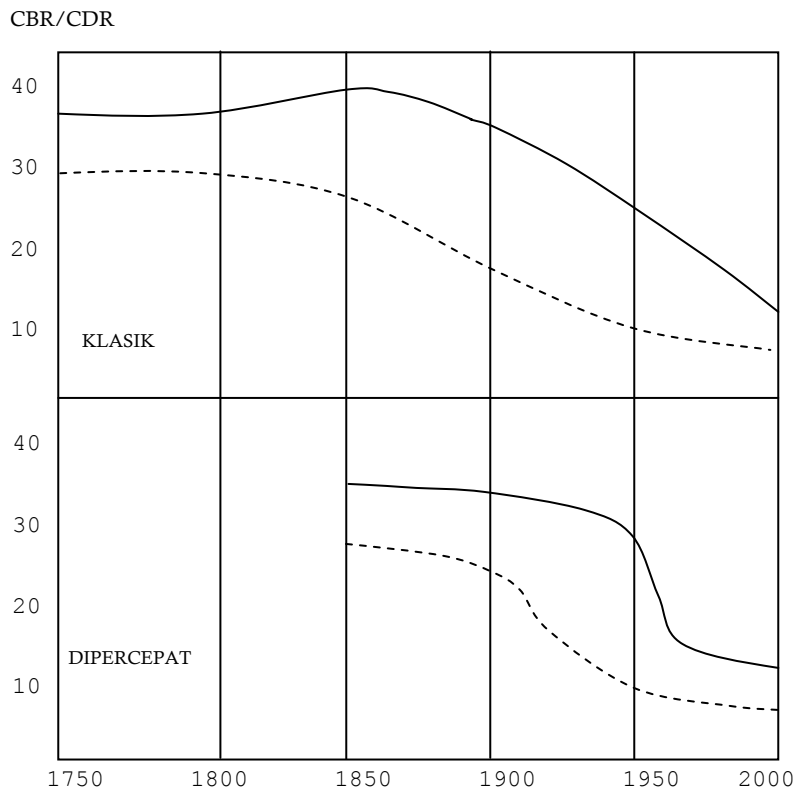
Teori transisi epidemiologi terdiri dari lima dalil (Omran, 1988)

- Dalil 1. Kematian merupakan faktor mendasar dalam dinamika kependudukan.
- Dalil 2. Dalam jangka panjang, selama transisi epidemiologi ini terjadi perubahan pola kematian dan penyakit. Pada awalnya, pandemi penyakit infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian. Kemudian secara berangsur-angsur digantikan oleh penyakit degeneratif dan penyakit buatan manusia.

- Dalil 3. Transisi epidemiologi umumnya lebih menguntungkan kelompok penduduk muda daripada orang tua. Transisi epidemiologi ini juga lebih menguntungkan kelompok penduduk wanita daripada laki-laki.
- Dalil 4. Terdapat perbedaan sifat transisi epideomologi sebelum abad 20, jika dibandingkan dengan abad 20. Sebelum abad 20 (sebagaimana yang pernah dialami oleh negara-negara maju saat ini), pergantian pola kesehatan dan penyakit yang menjadi sifat transisi epidemiologi mempunyai hubungan yang lebih erat dengan membaiknya standar kehidupan dan keadaan gizi, daripada hubungannya dengan kemajuan di bidang kedokteran. Sebaliknya, transisi epideomologi yang dialami oleh negara-negara berkembang pada abad ke 20, dimulai oleh kemajuan di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan program pengendalian penyakit.
- Dalil 5. Terdapat variasi pada transisi epidemiologi baik dalam hal pola, laju, faktor penentu dan akibat perubahan kependudukan. Variasi tersebut dapat dibedakan atas 4 model transisi epidemiologi, yaitu (1) Model Klasik atau Barat; (2) Varian yang dipercepat dari Model Klasik; (3) Model Tertunda, dan; (4) Varian transisi dari Model Tertunda

Model transisi epidemiologi untuk model klasik dan varian yang dipercepat diberikan pada gambar 5.1. berikut:

Gambar 5.1. Model Transisi Epidemiologi (Klasik dan Dipercepat)



Ket: _____ kelahiran
 ----- kematian

Dari gambar 5.1. terlihat bahwa pada model klasik terjadi penurunan dari angka kematian yang tinggi sekitar 30 kematian perseribu penduduk pertahun menjadi angka kematian yang rendah, dibawah 10 kematian perseribu penduduk pertahun. Proses ini terjadi pada masyarakat Barat dalam kurun waktu sekitar 200 tahunan.

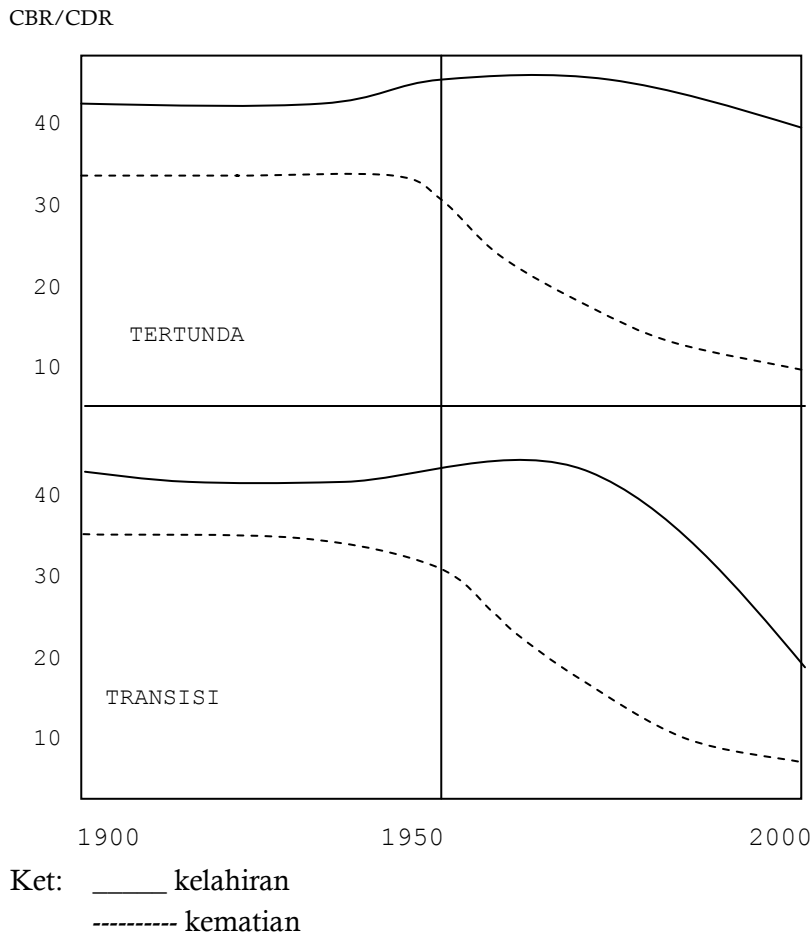
Terjadinya penurunan secara perlahan dari angka kematian disebabkan adanya perbaikan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup serta perbaikan gizi dan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya, selama transisi ini, epidemi berkurang dan penyakit menular berangsur-angsur digantikan oleh penyakit degeneratif dan penyakit buatan manusia (seperti penyakit akibat radiasi, bahan tambahan pada makanan dan pencemaran lingkungan)

Pada model klasik ini, angka kelahiran juga menurun secara berangsur-angsur dan terjadi pada periode 50 sampai 75 tahun sesudah angka kematian menurun. Angka kelahiran mengalami penurunan dari diatas 30 kelahiran perseribu penduduk menjadi dibawah 20 kelahiran perseribu penduduk. Angka fertilitas pada awalnya naik sebelum mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipercepat oleh perubahan sosial dalam masyarakat yang mulai menerima norma-norma mengenai praktek pengendalian kelahiran dan penundaan usia kawin.

Selanjutnya, pada model varian yang dipercepat dari model klasik merupakan gambaran dari pengalaman transisi di Jepang, Eropah Timur dan Uni Soviet. Pada model ini, transisi angka kematian terjadi dalam periode yang lebih pendek. Pada negara-negara ini, proses modernisasi (meskipun masih berjalan lambat) telah mulai sebelum turunnya angka kematian pada abad 20. Hal ini terutama ditentukan oleh perbaikan keadaan sosial, kemajuan sanitasi dan kedokteran. Tidak seperti pada model klasik, pada model varian yang dipercepat ini, praktek pengguguran menjadi faktor yang membantu mempercepat transisi fertilitas.

Model transisi epidemiologi untuk model tertunda dan varian transisi dari model tertunda diberikan pada gambar 5.2.

Gambar 5.2. Model Transisi Epidemiologi (Tertunda dan Transisi)



Model tertunda ini merupakan gambaran dari pengalaman negara-negara berkembang. Penurunan yang cepat dari angka kematian terjadi sejak akhir Perang Dunia ke II, tetapi angka fertilitas relatif tidak berubah pada tingkat yang tinggi. Angka kematian turun sangat cepat disebabkan oleh teknologi kedokteran modern yang dapat diimpor oleh

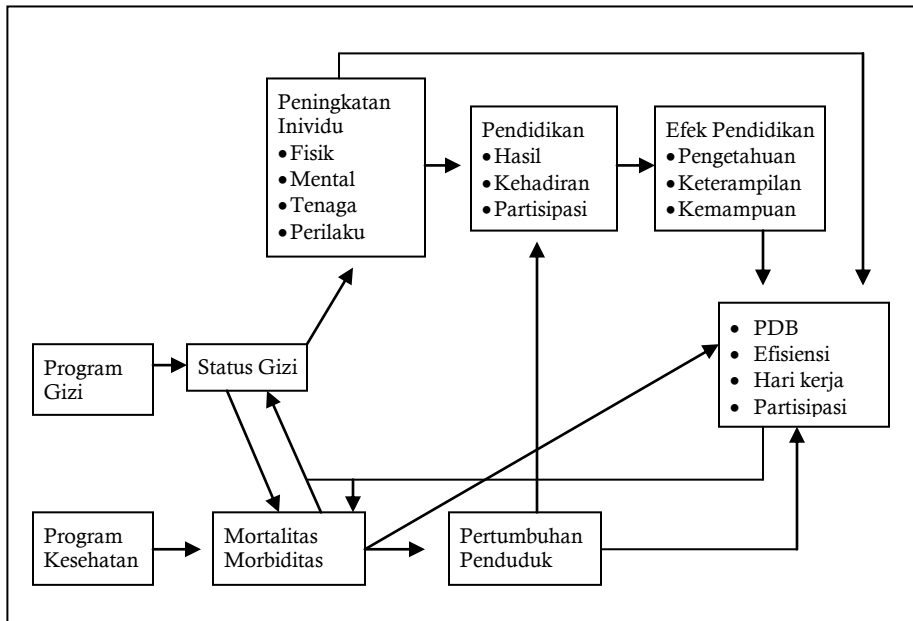
negara-negara berkembang dari negara-negara maju baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Selanjutnya varian transisi dari model tertunda merupakan gambaran transisi pada beberapa negara berkembang seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, Sri Lanka, Jamaica, Mauritius, dan China. Terdapat dua karakteristik utama yang membedakan varian transisi dari model tertunda ini dengan model aslinya (model tertunda). *Pertama*, pada negara-negara ini, angka kelahiran juga mulai menurun, setelah dalam beberapa dasawarsa terjadi penurunan angka kematian. Angka kelahiran mulai menurun karena adanya program keluarga berencana yang dilaksanakan secara efisien dan terorganisir. *Kedua*, penurunan angka kematian, terutama angka kematian bayi dan anak, relatif lebih cepat dibandingkan pada model tertunda. Ini menyebabkan mengecilnya jarak tingkat kesehatan antara negara-negara dalam model ini dengan negara-negara yang berada dalam model klasik.

5.5. Keterkaitan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Derajat kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia. Peningkatan produktivitas ini menjadi input bagi perkembangan perekonomian tersebut.

Cesario dkk (1980) memberikan kerangka berpikir dalam menjelaskan keterkaitan antara derajat kesehatan (program gizi dan kesehatan) dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diberikan dalam gambar berikut:

Gambar 5.3. Keterkaitan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Program gizi akan memperbaiki status gizi. Perbaikan dalam status gizi akan menurunkan tingkat kematian (mortalitas) dan tingkat kesakitan (morbiditas). Hal tersebut akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan hari kerja bagi penduduk yang berstatus bekerja. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa penurunan tingkat kematian akan meningkatkan pertumbuhan penduduk yang berdampak negatif pada pertumbuhan PDB.

Perbaikan dalam gizi dan kesehatan tenaga kerja juga akan meningkatkan efisiensi kerja melalui peningkatan kemampuan individualnya. Kemampuan individual ini mencakup diantaranya peningkatan dalam fisik, perubahan mental, tenaga maupun perilaku.

Selain itu, pengaruh peningkatan gizi dan kesehatan juga akan mempengaruhi PDB melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan, antara lain dalam bentuk peningkatan kehadiran, partisipasi pendidikan dan hasil (performance) dalam lembaga-lembaga pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan ini akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang pada tahap berikutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya berjalan satu arah, tetapi juga bisa sebaliknya, sebagaimana yang terlihat pada gambar 5.3. Peningkatan PDB akan mempengaruhi penurunan tingkat kesakitan dan kematian serta perbaikan dalam status gizi.

Kajian mengenai keterkaitan peningkatan kesehatan terhadap peningkatan PDB (pertumbuhan ekonomi) ini telah mendapat perhatian dari banyak peneliti. Diantaranya Correa dan Cummins (1970) yang melakukan penelitian di beberapa negara Amerika Latin, Eropa dan Amerika Serikat selama periode 1950 – 1962. Dengan menggunakan konsumsi kalori sebagai indikator untuk kesehatan, ditemukan adanya hubungan antara banyaknya konsumsi kalori dengan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan adanya keterkaitan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta peranan yang cukup penting dari pendidikan itu sendiri terhadap peningkatan konsumsi kalori.

Selanjutnya dalam konteks hubungan sebaliknya, Amin (1983) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB) dengan tingkat kematian (dalam hal ini angka kematian bayi). Berdasarkan data time series Indonesia selama 14 tahun yang dimulai dari tahun 1969, ditemukan terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara PDB dengan angka kematian bayi. Dengan kata lain, peningkatan dalam PDB akan menurunkan angka kematian bayi.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa adanya hubungan timbal balik antara pembangunan kesehatan atau derajat kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi peningkatan derajat kesehatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan derajat kesehatan.

MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

Bab ini akan memberikan pemahaman dan menjelaskan konsep dasar (pengertian dan pengukuran) mobilitas penduduk serta keterkaitan mobilitas penduduk terhadap pembangunan dilihat dari beberapa model/teori yaitu Model Dorong-Tarik (Push-Pull Factors), Model Lewis-Fei-Ranis, Hipotesis Transisi Mobilitas dan Tesis Brain Drain.

6.1. Pengertian dan Pengukuran Mobilitas Penduduk

6.1.1. Pengertian dan Istilah Dasar

Mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu mobilitas penduduk vertikal atau perubahan status dan mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk geografis. Mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status seseorang. Perubahan status tersebut baik perubahan status sosial maupun ekonomi. Misalnya status pekerjaan, pendidikan, kekayaan dan lainnya.

Selanjutnya, mobilitas penduduk horizontal atau geografis adalah gerak penduduk dari satu wilayah menuju ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam definisi ini, yaitu mengenai batasan wilayah/ruang (space) dan batasan waktu (time). Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat kesepakatan diantara para ahli dan juga antara negara-negara mengenai batasan ruang dan waktu yang digunakan dalam mendefinisikan mobilitas penduduk horizontal ini.

Mobilitas penduduk horizontal dapat juga dibagi menjadi mobilitas penduduk nonpermanen (atau mobilitas penduduk sirkuler), dan mobilitas penduduk permanen. Mobilitas penduduk nonpermanen ini adalah suatu perpindahan yang dilakukan untuk jangka waktu pendek dengan tujuan kembali ke tempat tinggal biasa. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya Mantra (1992), tidak terlalu menekankan penetapan jangka waktu ini, tetapi lebih melihat pada bagaimana migran pada kategori ini menggabungkan kegiatan di daerah asal dan kegiatan di daerah lain berdasar keperluan musiman akan tenaga kerja. Migran ini akan kembali bekerja di daerah asal, jika tidak terdapat lagi kemungkinan adanya pekerjaan musiman di daerah lain tersebut.

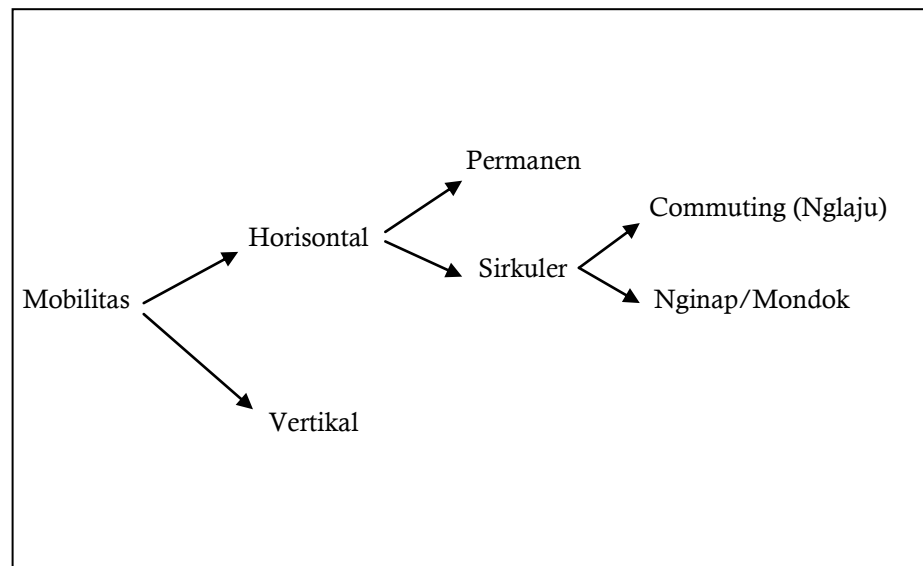
Mobilitas penduduk sirkuler dapat dibagi lagi menjadi mobilitas penduduk ulang-alik (commuting/nglaju) dan nginap atau mondok di daerah tujuan. Pelaju (Commuter), yaitu mereka yang bepergian untuk melakukan kegiatan khusus, biasanya kegiatan ekonomi, namun tempat tinggalnya tetap di daerah asal.

Mobilitas penduduk permanen atau sering disebut migrasi adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi merupakan salah satu

faktor dasar di samping faktor kelahiran dan kematian yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di negara-negara yang sedang berkembang migrasi secara regional sangat penting untuk dikaji secara khusus, mengingat meningkatnya kepadatan penduduk yang pesat di daerah-daerah tertentu sebagai distribusi penduduk yang tidak merata.

Secara skematis, bentuk-bentuk mobilitas ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1. Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk



6.1.2. Ukuran-Ukuran Mobilitas/Migrasi

Beberapa ukuran mobilitas/migrasi yang umum digunakan diantaranya adalah:

1. *Angka mobilitas*

yaitu rasio banyaknya penduduk yang pindah secara lokal (mover) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah penduduk

$$m = \frac{M}{P} \times 1000$$

dimana:

m = angka mobilitas

M = jumlah mover

P = jumlah penduduk pertengahan tahun

Dalam prakteknya, angka mobilitas ini sulit dihitung karena tidak tersedianya data mengenai jumlah penduduk yang pindah secara lokal (mover)

2. *Angka migrasi masuk (In-Migration = IM)*

Menunjukkan banyaknya migran yang masuk per seribu penduduk daerah tujuan dalam satu periode waktu

$$IM = \frac{I}{P} \times 1000$$

dimana: I = jumlah migran masuk

Contoh perhitungan:

Jumlah migran yang masuk ke Propinsi A tahun 2005 sebanyak 48.389 orang. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2005 di Propinsi A adalah 3.526.900 orang.

Dengan demikian: $IM = \frac{48389}{3526900} \times 1000 = 13,7$ perseribu penduduk

3. Angka migrasi keluar (*Out-Migration = OM*)

Menunjukkan banyaknya migran yang keluar per seribu penduduk daerah asal dalam satu periode waktu

$$OM = \frac{O}{P} \times 1000$$

dimana: O = jumlah migran keluar

Contoh perhitungan:

Jumlah migran yang keluar dari Propinsi A tahun 2005 sebanyak 32.447 orang.

$$\text{Dengan demikian: } OM = \frac{32447}{3526900} \times 1000 = 9,2 \text{ perseribu penduduk}$$

4. Angka migrasi neto (*Net-Migration = NM*)

Menunjukkan selisih migran masuk dan keluar per seribu penduduk dalam satu periode waktu

$$NM = \frac{I - O}{P} \times 1000$$

Contoh perhitungan:

Dari data migran masuk dan keluar di Propinsi A, dapat dihitung angka migrasi neto sebagai berikut:

$$NM = \frac{48389 - 32447}{3526900} \times 1000 = 4,5 \text{ perseribu penduduk}$$

5. Angka migrasi bruto (*Gross-migration = GM*)

Menunjukkan banyaknya perpindahan (migran masuk + migran keluar) per seribu penduduk daerah asal dan daerah tujuan dalam satu periode waktu

$$GM = \frac{I + O}{P_1 + P_2} \times 1000$$

dimana:

P_1 = jumlah penduduk di tempat asal

P_2 = jumlah penduduk di tempat tujuan

Contoh perhitungan:

Migrasi keluar dari daerah C ke daerah D tahun 2005 sebanyak 50.000 orang. Migrasi masuk dari daerah D ke daerah C tahun 2005 sebanyak 30.000 orang. Jumlah penduduk daerah C sebanyak 3.000.000 orang dan penduduk daerah D sebanyak 2.500.000 orang.

Dengan demikian angka migrasi bruto adalah:

$$GM = \frac{30000 + 50000}{3000000 + 2500000} \times 1000 = 14,5 \text{ perseribu penduduk}$$

6.2. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan

Kaitan antara pembangunan dan mobilitas penduduk/migrasi, serta dampak kaitan itu telah lama menjadi perhatian para ahli dan perencana pembangunan. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan yang menentukan arah dan volume migrasi, tetapi disisi lain terdapat juga pandangan yang menyatakan arah dan

volume migrasi yang menentukan laju pembangunan. Selanjutnya, dalam konteks dampak kaitan tersebut, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa mobilitas atau migrasi pekerja dapat mendorong pembangunan, tetapi juga terdapat pandangan bahwa migrasi pekerja ini dapat mengganggu proses pembangunan.

Berikut ini diberikan beberapa teori yang memperlihatkan keterkaitan antara mobilitas penduduk dengan pembangunan.

6.2.1. Model Dorong-Tarik (Push-Pull Factors)

Model yang sering digunakan untuk menganalisis mobilitas penduduk di suatu wilayah adalah model dorong-tarik (push-pull factors). Model ini dikembangkan oleh Everett S. Lee yang disajikan pada *Annual Meeting of the Mississippi Valley Historical Association*, Kansas City, 23 April 1965.

Model dorong-tarik ini menyatakan penyebab utama seseorang pindah ke daerah lain adalah karena kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya (needs). Karenanya, prasyarat utama yang akan mendorong seseorang untuk pindah adalah adanya perbedaan nilai kefaedahan wilayah (place utility) antara daerah asal dengan daerah tujuan. Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal. Dengan kata lain, jika dikaitkan dengan pembangunan, berdasarkan kerangka model ini dapat dikemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan faktor yang menjadi pemicu mobilitas penduduk.

Terdapat empat kelompok faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk bermigrasi dan proses migrasi, yaitu (Lee, 1992):

mempengaruhi keputusan seseorang untuk menetap atau pindah dari daerah tersebut.

Beberapa faktor mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, tetapi terdapat juga faktor yang berpengaruh berbeda terhadap seseorang. Oleh karenanya akan terdapat perbedaan sikap antara setiap migran dan calon migran terhadap faktor + dan -, yang terdapat baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Sebagai contoh, bagi orang tua yang mempunyai banyak anak kecil, akan memberikan nilai + pada daerah dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bagus meskipun biaya hidup relatif mahal di daerah tersebut (misalnya karena harga/sewa rumah relatif mahal). Sementara bagi orang yang hidup sendiri mungkin tidak terpengaruh untuk tinggal di daerah tersebut, karena tidak ada anak yang harus disekolahkan.

Keputusan bermigrasi dalam konteks ini merupakan hasil perbandingan faktor-faktor yang terdapat di daerah asal dan di daerah tujuan. Selain itu, diantara dua tempat tersebut selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak terlalu berat, tetapi dalam keadaan-keadaan lain tidak dapat diatasi. Yang paling banyak diteliti diantara rintangan-rintangan tersebut adalah jarak.

Sejumlah rintangan yang sama dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing individu, yang akan mempengaruhi keputusan migrasinya. Selain itu, masih banyak faktor pribadi yang berpengaruh terhadap seseorang yang akan pindah, faktor-faktor itu dapat mempermudah atau memperlambat migrasi.

6.2.2. Model Lewis-Fei-Ranis

Model Lewis-Fei-Ranis (L-F-R) merupakan model yang menggambarkan proses pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga

yang mengalami surplus tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an. Model ini dikembangkan oleh Sir W. Arthur Lewis dan kemudian dirumuskan dan diperluas oleh John Fei dan Gustav Ranis (Todaro, MP, 1992; Todaro dan Smith, 2004)

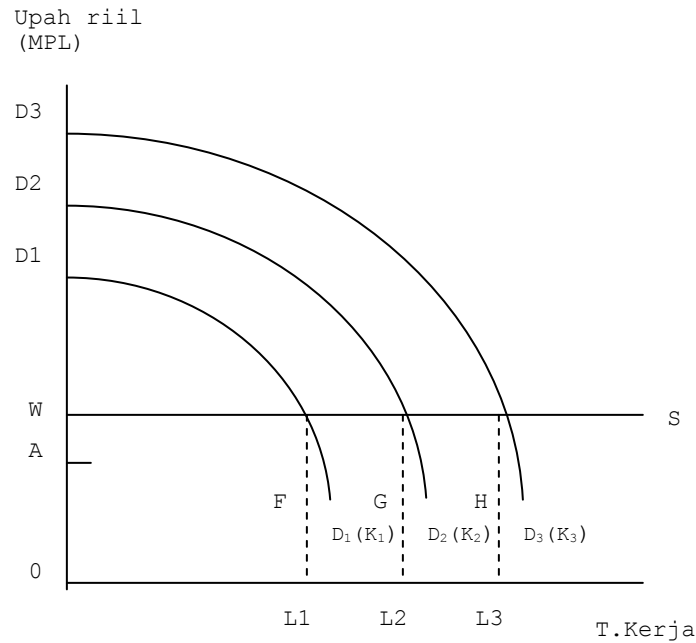
Dalam model L-F-R dinyatakan bahwa perekonomian terbelakang secara sederhana dari dibagi atas dua sektor yaitu: a) sektor tradisional, yaitu sektor pertanian subsisten tradisional di pedesaan. Sektor ini memiliki produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol ini dinyatakan oleh Lewis sebagai penggambaran dari kondisi surplus tenaga kerja, dalam artian jika sebagian tenaga kerja ditarik dari sektor pertanian, maka sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya; dan b) sektor industri modern perkotaan. Sektor ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, dan menjadi sektor penampung dari perpindahan tenaga kerja dari sektor subsisten.

Fokus perhatian dalam model L-F-R adalah pada proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan peluang kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan peluang kerja di kota dipengaruhi oleh perluasan output di sektor modern. Laju dan kecepatan dari transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan peluang kerja ini ditentukan oleh tingkat investasi industri dan akumulasi modal secara keseluruhan pada sektor modern. Investasi ini terjadi karena adanya kelebihan keuntungan sektor modern atas upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. Tingkat upah pada sektor industri di kota diasumsikan konstan dan dengan rata-rata berada diatas tingkat upah di sektor pertanian subsisten tradisional (Lewis berasumsi bahwa upah di kota paling sedikit 30 persen lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di desa agar menarik para pekerja desa bermigrasi ke kota). Dengan tingkat tingkat upah yang

konstan di perkotaan, penawaran tenaga kerja di pedesaan dianggap elastis sempurna.

Ilustrasi model L-F-R diberikan pada gambar berikut:

Gambar 6.3. Model Migrasi Lewis-Fei-Ranis



Sumber: Todaro, MP, 1992

Sumbu vertikal merupakan upah riil dan produk marginal tenaga kerja (upah riil dan produk marginal tenaga kerja ini diasumsikan sama dalam sektor modern yang kompetitif) dan pada sumbu horizontal merupakan kuantitas tenaga kerja. Rata-rata pendapatan subsisten riil di sektor tradisional pedesaan ditunjukkan oleh daerah OA, sedangkan OW menunjukkan upah riil di sektor modern perkotaan. Pada upah sebesar OW ini penawaran tenaga kerja pedesaan diasumsikan “tak terbatas” atau

elastis sempurna. Ini ditunjukkan oleh kurva penawaran tenaga kerja (WS) yang bersifat horisontal. Dengan kata lain, ini juga berarti bahwa pengusaha di sektor modern perkotaan dapat mempekerjakan tenaga kerja pedesaan sebanyak yang dibutuhkannya tanpa khawatir upah akan meningkat.

Dengan asumsi penawaran modal jumlahnya tetap dan sudah tertentu sebesar K_1 , maka pada tahap awal pertumbuhan sektor modern, kurva permintaan tenaga kerja semata-mata hanya ditentukan oleh penurunan produk marginal tenaga kerja. Hal tersebut diperlihatkan oleh kurva $D_1(K_1)$ yang memiliki kemiringan negatif. Pengusaha di sektor modern yang memaksimalkan keuntungan diasumsikan membayar upah para pekerja sampai suatu titik dimana produk fisik marginal tenaga kerja sama dengan upah riilnya (titik potong F diantara kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja). Pada titik ini, total tenaga kerja sektor modern akan sama dengan L_1 . Total output sektor modern pada tingkat tenaga kerja L_1 ini ditunjukkan oleh bidang yang dibatasi dengan titik-titik OD_1FL_1 . Bagian dari total output yang diterima pekerja dalam bentuk upah adalah sama dengan daerah persegi empat $OWFL_1$, sedangkan bidang WD_1F menjadi total keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha di sektor modern perkotaan. Karena diasumsikan bahwa semua keuntungan ini diinvestasikan kembali, jumlah stok kapital pada sektor modern akan naik dari K_1 ke K_2 .

Meningkatnya stok kapital ini menyebabkan naiknya kurva produk total sektor modern, yang kemudian menyebabkan kenaikan dalam kurva permintaan atau produk marginal tenaga kerja. Pergeseran kurva permintaan ini ditunjukkan dengan garis $D_2(K_2)$ dalam gambar 6.2. tersebut. Tingkat keseimbangan baru pada peluang kerja di kota terjadi pada titik G, dengan tenaga kerja yang dipekerjakan sekarang sebanyak L_2 . Output total naik menjadi OD_2GL_2 . Bagian dari total

output yang diterima pekerja dalam bentuk upah adalah sama dengan daerah persegi empat 0WGL2, sedangkan bidang WD2G menjadi total keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha di sektor modern perkotaan. Keuntungan pengusaha sektor modern tersebut (WD2G) kemudian diinvestasikan lagi, sehingga meningkatkan seluruh stok kapital menjadi K3, dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke D3(K3) dan menaikkan tingkat peluang kerja sektor modern menjadi L3.

Proses pertumbuhan berkesinambungan dari sektor modern dan perluasan peluang kerja tersebut diasumsikan berlangsung terus sampai semua kelebihan tenaga kerja di pedesaan terserap di sektor industri kota. Setelah itu, tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi. Kurva penawaran tenaga kerja akan memiliki slope yang positif dan peluang kerja serta tingkat upah di kota akan terus meningkat. Transformasi ekonomi secara struktural akan terjadi dengan keseimbangan aktivitas ekonomi yang bergeser dari pertanian desa menuju industri kota.

6.2.3. Transisi Mobilitas

Transisi mobilitas pada dasarnya memperlihatkan bagaimana pola, volume dan arah mobilitas penduduk yang dikaitkan dengan tahapan-tahapan pembangunan. Hipotesis mengenai transisi mobilitas ini pada awalnya dikemukakan oleh Zelinsky (1971).

Menurut Zelinsky, terdapat lima tingkatan atau fase transisi mobilitas. Kelima tahapan transisi mobilitas tersebut berjalan sejajar dengan fase transisi demografi atau transisi vital. Kecuali itu, fase-fase tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fase-fase tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Transisi Vital	Transisi Mobilitas
<i>Masyarakat Premodern</i>	
Fase A Fertilitas dan mortalitas tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi	Fase I Mobilitas penduduk (tempat tinggal) sangat sedikit, bahkan tidak tampak, kecuali bentuk-bentuk sirkulasi terbatas, seperti tradisi kunjungan sosial, keagamaan dan lainnya
<i>Masyarakat Awal Transisi</i>	
Fase B Mortalitas turun dengan cepat, fertilitas naik, pertumbuhan penduduk tinggi	Fase II Mobilitas desa-kota mulai nampak dilatarbelakangi berbagai aktivitas. Mobilitas antar kota belum terlihat
<i>Masyarakat Akhir Transisi</i>	
Fase C Fertilitas dan mortalitas sama-sama turun, tetapi angka mortalitas lebih cepat turun. Pertumbuhan penduduk alami lebih rendah dibanding fase B	Fase III Mobilitas desa-kota masih dominan, mobilitas antar kota mulai memasuki tahap awal, sirkulasi mulai tumbuh dengan kompleksitas struktural.
<i>Masyarakat Maju</i>	
Fase D Fertilitas turun, mortalitas stabil (tetap), pertumbuhan penduduk mendekati 0.	Fase IV Mobilitas residential bergerak pada tingkat yang tinggi, migrasi desa-kota terus bertambah secara relatif dan absolut, terjadi aliran tenaga kerja tidak terlatih dan semiterampil dari daerah terbelakan, sirkulasi tenaga kerja terampil dan profesional meningkat dalam berbagai variasi.
<i>Masyarakat Awal Transisi</i>	
Fase E Perilaku fertilitas tidak dapat diprediksi karena kelahiran dapat dikontrol oleh individu-individu maupun lembaga politik.	Fase V Mobilitas akan turun karena makin baiknya jaringan komunikasi, sirkulasi meningkat sebagai akibat kemajuan telekomunikasi dan makin baiknya jaringan informasi, lahir bentuk-bentuk baru mobilitas sirkuler.

Hipotesis transisi mobilitas ini kemudian dimodifikasi oleh Skeldon (1990), untuk menganalisis transisi mobilitas di negara-negara sedang berkembang. Dalam modifikasinya, Skeldon membagi atas tujuh tahapan dalam transisi mobilitas sebagai berikut:

1. Tahap Pertama disebut sebagai tahap “masyarakat pra transisi” (pretransitional society)

Pada tahap ini sebagian besar mobilitas yang terjadi merupakan mobilitas non-permanen, yang tidak bertujuan untuk menetap. Meskipun demikian, mobilitas ini tidak harus merupakan mobilitas jangka pendek. Selain mobilitas non-permanen, pada tahap ini juga terjadi mobilitas permanen dalam bentuk kolonisasi ataupun pembukaan daerah pertanian baru.

2. Tahap kedua, yaitu tahap “masyarakat transisi awal” (early transitional society).

Pada tahap ini terjadi percepatan dalam mobilitas nonpermanen ke daerah perkotaan, daerah perkebunan, atau daerah pertambangan. Mobilitas semacam ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan pedesaan. Penghasilan penduduk yang melakukan mobilitas ini membantu peningkatan pendapatan di pedesaan. Secara umum, jaringan transportasi yang luas, murah, efisien, dan cepat merupakan syarat utama terjadinya peningkatan mobilitas nonpermanen, baik sirkulasi maupun ulang alik.

Pada tahap ini juga terlihat adanya mobilitas penduduk dari satu daerah perkotaan ke daerah perkotaan yang lain, dengan kota besar sebagai tujuan utama migrasi dari kota kecil dan menengah. Terjadi peningkatan pesat dalam mobilitas ke daerah-daerah baru. Pada tahap ini migrasi masih didominasi oleh penduduk laki-laki.

3. Tahap ketiga, yaitu tahap “masyarakat transisi menengah” (intermediate transitional).

Pada tahap ini terjadi peningkatan partisipasi penduduk perempuan dalam migrasi penduduk ke kota besar. Selain itu terlihat juga adanya migrasi dari daerah yang berdekatan dengan kota besar ke kota besar itu sendiri. Migrasi dari daerah sekitar kota besar ini menyebabkan stagnasi pada daerah sekitar kota besar tersebut. Mobilitas dari pedesaan ke pedesaan menurun; dan mobilitas dari perkotaan ke perkotaan terus meningkat.

Berbeda dengan tahap kedua, mobilitas dari pedesaan ke perkotaan berubah menjadi migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Para migran mulai menetap di perkotaan. Penghasilan yang diterima di perkotaan dibelanjakan di perkotaan itu sendiri. Sementara itu, akibat migrasi ini, daerah pedesaan kehilangan angkatan kerja yang relatif bermutu. Gejala ini dapat mulai mengganggu pembangunan ekonomi pedesaan.

Peningkatan migrasi dari pedesaan ke arah perkotaan ini juga mendorong cepatnya pertumbuhan kota kecil dan menengah.

4. Tahap keempat, yaitu tahap “masyarakat transisi akhir” (late transitional society).

Pada tahap ini muncul *megacity*, dan jumlah penduduk pedesaan mulai menurun. Mobilitas dari pedesaan ke perkotaan meningkat, dengan kota-kota besar sebagai tujuan utama. Migrasi tidak lagi dari pedesaan ke kota kecil, kota menengah, baru ke kota besar, tetapi langsung dari pedesaan ke kota besar. Migrasi ini didominasi oleh perempuan.

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri mulai terlihat pada tahap ini. Menurut Skeldon, migrasi jenis ini didominasi oleh laki-laki.

5. Tahap kelima, yaitu tahap “masyarakat mulai maju” (early advanced society).

Pada tahap ini angka urbanisasi telah melampaui 50 persen dan mobilitas dari pedesaan ke perkotaan menurun. Mulai terjadi sub-urbanisasi dan dekonsentrasi penduduk perkotaan (peningkatan mobilitas dari kota besar ke daerah sekelilingnya dan penyebaran pertumbuhan penduduk perkotaan). Mobilitas ini tidak berbeda mencolok antara laki-laki dan perempuan. Bersamaan dengan gejala tersebut, mobilitas nonpermanen, terutama ulang-alik, meningkat lagi. Ulang alik ini didominasi oleh laki-laki.

6. Tahap keenam, yaitu tahap “masyarakat maju lanjut” (late advanced society”.

Tahap ini ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan makin menyebar ke daerah perkotaan yang lebih kecil. Pada saat ini juga dapat terjadi peningkatan arus masuk pekerja asing, terutama migran dari negara yang masih berada pada tahap keempat. Ulang alik terjadi dengan pesat. Semua arus mobilitas ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, tanpa perbedaan yang mencolok.

7. Tahap ketujuh, yaitu tahap “masyarakat maju super” (super advanced society).

Pada tahap ini banyak diwarnai oleh adanya teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi. Pada saat ini amat mungkin bahwa mobilitas permanen semakin berkurang dan mobilitas nonpermanen, terutama berujud mobilitas ulang-alik, meningkat. Sistem transportasi diganti dengan sistem komunikasi. Orang tidak perlu lagi berpindah tempat untuk dapat saling berkomunikasi.

6.2.4. Tesis Brain Drain dan Konsep Remittances: *Dampak Migrasi Terhadap Pembangunan Daerah*

Tesis *Brain Drain* menyatakan bahwa migrasi keluar dari angkatan kerja potensial berusia muda dan berpendidikan dari pedesaan (ataupun kota kecil) ke daerah lainnya (umumnya kota menengah atau besar), cenderung membawa dampak negatif bagi daerah yang ditinggalkan. Oleh karenanya, migrasi dari desa ke kota ataupun dari kota kecil ke kota menengah/besar diduga dapat mengganggu dan memperlambat proses pembangunan wilayah.

Selain menyebabkan terjadinya kelangkaan angkatan kerja pada daerah yang ditinggalkan (desa), dampak dari brain drain juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Di daerah tujuan (kota), mobilitas pekerja tidak hanya mempersulit penataan kota, tetapi juga memunculkan kelebihan angkatan kerja yang kemudian memunculkan masalah pengangguran, pekerja miskin di sektor informal, kemiskinan dan kampung kumuh di kota. Oleh karenanya, para perencana pembangunan dan pemerintah berusaha menyusun kebijakan dan strategi, agar migrasi ke luar dari pedesaan dapat dikurangi atau dihambat.

Namun demikian, dampak dari tesis *Brain Drain* ini tidak sepenuhnya berlaku di negara-negara sedang berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mobilitas atau migrasi pekerja merupakan salah satu strategi yang tersedia yang dimanfaatkan oleh rumah tangga pedesaan, untuk turut meraih dan menikmati kue pembangunan yang cenderung menumpuk di kota. Dengan mengalokasikan sumberdaya manusia yang ada, rumah tangga pedesaan berusaha memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di luar desa.

Hasil kerja di luar desa sedapat mungkin ditabung kemudian dikirimkan dan dimanfaatkan di desa.

Kiriman (*remittances*) dari para migran pekerja mempunyai dampak positif bagi rumah tangga pedesaan dan ekonomi pedesaan, khususnya peluang berusaha dan pekerjaan non-farm pedesaan. Pada tahap awal, remitan dari pekerja migran memang sebagian besar hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarga yang ditinggalkan di desa. Namun demikian, pada tahap-tahap selanjutnya, remitan mulai banyak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, sebagai modal berusaha di pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya berbagai aktivitas *off-farm* dan *non-farm* di pedesaan.

Studi yang dilakukan Carol B. Hetler (BIES, 1989) menunjukkan pentingnya remitan bagi rumah tangga di pedesaan. Studi yang dilakukan pada tahun 1984 di daerah Wonogiri menunjukkan bahwa rumah yang memiliki pekerja migran sirkuler umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki pekerja migran sirkuler, meskipun kedua kelompok rumah tangga ini sama-sama tidak memiliki lahan pertanian. Hetler berpendapat bahwa migrasi sirkuler merupakan upaya untuk meningkatkan status ekonomi rumah tangga.

Studi yang dilakukan Saefullah (1992) di Jawa Barat juga mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen responden menyatakan bahwa kehidupan ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih baik setelah bekerja di luar desa. Temuan yang sama juga diperoleh dalam studi yang dilakukan oleh Mundiharno (1996) juga menunjukkan pentingnya peran “uang kota” yang dialirkan oleh para migran sirkuler ke desa mereka.

Remitan tersebut tidak saja dalam bentuk kiriman uang. Sebagaimana yang dikemukakan Connel (1975), hubungan migran dengan daerah asal dinegara-negara berkembang dikenal sangat erat. Hubungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang, barang-barang, bahkan ide-ide pembangunan ke daerah asal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI: Indikator Kualitas Penduduk

Bab ini akan memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai kualitas penduduk dan berbagai indikator yang pernah diajukan dan digunakan dalam rangka mengukur kualitas penduduk di suatu negara atau daerah.

7.1. Pengertian Kualitas Penduduk

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan mendasar tentang paradigma pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Orientasi pembangunan tidak lagi hanya pada pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi itu sendiri hanya dijadikan sebagai alat atau cara dalam rangka mencapai tujuan lain yang lebih mendasar yaitu kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, penduduk selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan sasaran pembangunan. Penduduk yang berkualitas akan mempercepat proses pembangunan. Namun demikian, hasil dari pembangunan juga seharusnya dapat meningkatkan kualitas penduduk.

Terutama sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke IV, pembangunan kualitas penduduk telah menjadi sasaran pokok pembangunan di Indonesia. Namun demikian, belum ada kesepakatan yang dapat diterima semua pihak mengenai ukuran yang digunakan dalam menilai kualitas penduduk. Hal ini berakibat pada sulitnya upaya untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan, dan juga perumusan perencanaan untuk peningkatan kualitas penduduk masa yang akan datang.

Beberapa indikator memang telah diajukan, baik oleh lembaga-lembaga resmi maupun para ahli. Namun karena luasnya batasan kualitas penduduk, indikator tersebut masih mengandung berbagai kelemahan, sehingga berbagai upaya pengembangannya sampai saat ini masih terus dilakukan.

Ancok (1994) mengemukakan, kualitas penduduk dapat dibagi dalam kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Untuk kualitas fisik, minimal dapat dipakai tiga indikator yaitu ukuran antropometrik (tinggi, berat badan dan lainnya), kesehatan serta kesegaran jasmani. Sedangkan kualitas non-fisik dapat berupa kecerdasan, kesehatan mental, pendidikan, religiusitas dan ciri non-fisik lainnya.

Dalam pengukurannya, kualitas penduduk juga dapat dibedakan atas indikator individu dan indikator kelompok. Kualitas individu adalah indikator yang menunjukkan kualitas pada masing-masing individu, sedangkan kualitas kelompok adalah indikator yang menunjukkan kualitas rata-rata sekumpulan manusia yang menjadi penduduk suatu daerah/wilayah. Namun demikian, secara umum indikator kualitas penduduk yang banyak digunakan adalah dalam bentuk ukuran kelompok.

Penggunaan ukuran kelompok dalam melihat kualitas penduduk memiliki keunggulan terutama dari sisi kemudahan indikator ini

digunakan dalam rangka mengevaluasi dan merumuskan intervensi kebijakan. Namun demikian, ukuran ini menjadi kurang tepat jika ketimpangan antar individu dalam kelompok tersebut relatif besar.

7.2. Indikator-Indikator Kualitas Penduduk

Berbagai indikator yang pernah digunakan dalam mengukur kualitas penduduk diberikan dalam bahasan berikut ini:

1. Pendapatan Perkapita

Pada tahun 1950-an, sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan paradigma pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, yakni melalui pembentukan modal dan produksi. Berdasarkan paradigma tersebut, ukuran keberhasilan pembangunan yang digunakan berhubungan erat dengan masalah pembentukan modal dan produksi. Pada masa-masa ini, indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas penduduk adalah pendapatan perkapita.

Namun demikian, penggunaan pendekatan pendapatan perkapita dalam mengukur kualitas penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat ini mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya. *Pertama*, pendekatan ini tidak memasukkan produksi subsisten yang tidak dipasarkan (sehingga tidak memiliki harga dalam satuan uang). *Kedua*, belum dipertimbangkannya aspek distribusi pendapatan yang merupakan unsur paling penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan sekaligus kualitas penduduk. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita yang tinggi dari masyarakat suatu daerah pada dasarnya belum tentu mencerminkan pendapatan yang tinggi untuk masing-

masing individu dalam masyarakat. Ada kalanya (bahkan menjadi kecenderungan umum) bahwa tingginya pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah atau negara lebih disebabkan adanya sebagian kecil masyarakat golongan atas yang mempunyai pendapatan sangat tinggi. *Ketiga*, kualitas penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu hal yang subjektif yang tidak dapat diukur semata-mata melalui pendekatan pendapatan perkapita. Tiap orang mempunyai pandangan, cara dan tujuan hidup yang berbeda, sehingga dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap kesejahteraan mereka.

2. PQLI atau IMH

Pada tahun 1970-an, muncul pandangan bahwa kemiskinan absolut dan relatif yakni kesenjangan merupakan masalah penting yang harus segera diatasi. Paradigma pembangunan pada waktu itu terpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia. Oleh karenanya, untuk mengukur sampai sejauh mana hasil pembangunan mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi peningkatan kualitas fisik kehidupan, digunakanlah beberapa tolok ukur. Berdasarkan hal tersebut, Morris dan Grant pada tahun 1976 mengajukan indikator agregat kualitas penduduk yang dikenal dengan nama PQLI (Physical Quality of Live Index) atau IMH (Indeks Mutu Hidup). Indeks tersebut mencakup tiga parameter pokok yaitu : angka kematian bayi (IMR), angka harapan hidup pada umur 1 tahun, dan tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun atau lebih.

PQLI mencakup aspek fisik maupun non-fisik penduduk. Angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu umur 1 tahun, mengukur kemampuan penduduk secara fisik antara masa bayi dan

masa umur selebihnya. Angka melek huruf merupakan gambaran potensi seseorang untuk beraktivitas dalam kehidupan, karena dengan pendidikan akan mempengaruhi tingkat keilmuan dan ketrampilan yang berkaitan untuk pencarian nafkah atau keperluan budaya lainnya.

Berdasarkan asumsi dasar dan tujuan penyusunan indeks ini, maka PQLI lebih sesuai digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam model pembangunan pemerataan melalui pertumbuhan dan model pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui seberapa jauh suatu masyarakat telah berhasil mencapai sejumlah pemenuhan karakteristik kebutuhan dasar yang dapat menjamin kelangsungan hidup warganya.

Penggunaan indikator PQLI pada dasarnya memang telah dapat mengatasi kelemahan pemakaian pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun demikian, PQLI juga memiliki kelemahan. Indikator ini tidak dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan total (yang didalamnya harus mengandung pengukuran tentang rasa aman, keadilan, hak-hak asasi dan hal-hal lainnya yang tidak memiliki eksistensi material).

Di Indonesia, berbagai modifikasi dari PQLI ini telah dilakukan oleh para ahli. Sayogyo menghitung indikator ini dengan menambah variabel fertilitas (Total Fertility Rate = TFR) sebagai variabel keempat. Ia memberi nama dengan istilah IMH-plus (Indeks Mutu Hidup-plus). Hananto Sigit juga mengukur Indeks Mutu Hidup dengan menggunakan tiga variabel seperti yang diajukan Moris-Grant. Ia memberi nama dengan istilah : Indeks Kualitas Hidup Manusia Indonesia (IKHMI). Hananto Sigit menambahkan variabel

pendapatan (PDRB) sebagai variabel keempat untuk indikator ini yang kemudian diberi nama IKHMI plus atau IKHMIY.

3. HDI atau IPM

Pada tahun 1990, United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan istilah pembangunan manusia melalui Human Development Report (HDR). Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging choices*). Proses perluasan spektrum pilihan manusia, secara mendasar adalah proses untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Dengan dasar tersebut, pada tahun 1990 diperkenalkan suatu indikator yang diberi nama Human Development Index (HDI). HDI ini juga kemudian dijadikan dasar untuk menilai kualitas sumberdaya manusia/penduduk di suatu wilayah (UNDP,1992) HDI di Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai indikator pembangunan yang bersifat universal, ukuran HDI dikembangkan karena adanya kelemahan dari teori-teori pembangunan ekonomi konvensional yang menjadikan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tolok ukur dalam melihat keberhasilan dari suatu proses pembangunan ekonomi. Pada hal, sebagaimana diketahui, banyak indikator-indikator kehidupan penting lainnya seperti tingkat pendidikan, usia harapan hidup sejak lahir, tingkat kesehatan, aspek demokratisasi, transparansi, kebebasan yang juga dapat dijadikan sebagai alat ukur pencapaian hasil-hasil pembangunan, termasuk juga pembangunan ekonomi.

HDI mencakup tiga dimensi pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Dimensi usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf dan rata-rata lama mengikuti pendidikan formal dan standar hidup layak diukur dengan tingkat pendapatan perkapita yang diproksi melalui paritas daya beli (BPS, 2001).

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa HDI memiliki dua sisi penting. Sisi pertama menggambarkan kemampuan umat manusia dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikannya, sedang sisi kedua menggambarkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan kondisi yang dicapai tersebut dalam berkarya, menikmati kehidupan atas hasil karyanya, termasuk aspek sosial, politik dan budaya.

HDI mempunyai angka minimal 0 dan maksimal 100. Semakin tinggi angka HDI (mendekati 100) maka semakin baik kondisi suatu negara atau daerah tersebut.

Perhitungan HDI menggunakan tiga tahapan berikut:

1. Menghitung kesenjangan masing-masing komponen HDI (harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf, rata-rata lama pendidikan formal dan paritas daya beli) dari suatu negara (daerah) terhadap batas terendah dan tertinggi untuk masing-masing komponen. Perhitungan angka maksimum dan minimum tergantung negara atau daerah yang dimasukkan dalam perhitungan. Atas dasar angka maksimum dan minimum ini, maka suatu negara (daerah) akan mendapat nilai 0-100 untuk masing-masing komponen indeks tersebut.

2. Angka kesenjangan dari ketiga indikator dijumlahkan dan kemudian diambil nilai rata-ratanya.
3. Memperoleh angka HDI akhir, yaitu 100 dikurangi angka rata-rata tersebut.

Melalui komponen-komponen yang digunakan, terlihat bahwa terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki indikator HDI dibandingkan indikator lain. Keunggulannya tersebut antara lain adalah bahwa komponen yang digunakan HDI adalah komponen yang mengukur tingkat pembangunan relatif bukan absolut. Selain itu, indikator ini juga berfokus pada hasil akhir pembangunan, jadi bukan semata-mata pendapatan atau GNP perkapita. Dengan menggabungkan data sosial dan ekonomi, konsep HDI memungkinkan suatu negara atau wilayah untuk mengambil ukuran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai gambaran untuk HDI di Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 0,728. Dengan angka HDI tersebut, Indonesia berada pada posisi ke 107 dari 177 negara dan berada pada kelompok negara-negara dengan pembangunan manusia pada tingkat menengah (medium). (UNDP,2007). Berdasarkan perkembangannya, HDI Indonesia sudah menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,677 pada tahun 1999 dan 0,692 pada tahun 2002. Demikian juga jika dibandingkan berdasarkan peringkat antar negara, dimana pada tahun 2002 Indonesia berada pada posisi ke 111 dari 177 negara (catatan: pada tahun 1999, posisi Indonesia relatif lebih baik yaitu pada posisi 102, tetapi dengan cakupan 162 negara) (UNDP,2001 & 2004)

Gambaran HDI di Indonesia diberikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Perkembangan HDI Indonesia Berdasarkan Propinsi Selama Tahun 1999 – 2005

Provinsi	1999	2002	2005
11. Nanggroe Aceh Darussalam	65.3	66	69
12. Sumatera Utara	66.6	68.8	72
13. Sumatera Barat	65.8	67.5	71.2
14. Riau	67.3	69.1	73.6
15. Jambi	65.4	67.1	71
16. Sumatera Selatan	63.9	66	70.2
17. Bengkulu	64.8	66.2	71.1
18. Lampung	63	65.8	68.8
19. Kep. Bangka Belitung	na	65.4	70.7
20. Kepulauan Riau	na	na	72.2
31. DKI Jakarta	72.5	75.6	76.1
32. Jawa Barat	64.6	65.8	69.9
33. Jawa Tengah	64.6	66.3	69.8
34. DI Yogyakarta	68.7	70.8	73.5
35. Jawa Timur	61.8	64.1	68.4
36. Banten	na	66.6	68.8
51. Bali	65.7	67.5	69.8
52. Nusa Tenggara Barat	54.2	57.8	62.4
53. Nusa Tenggara Timur	60.4	60.3	63.6
61. Kalimantan Barat	60.6	62.9	66.2
62. Kalimantan Tengah	66.7	69.1	73.2
63. Kalimantan Selatan	62.2	64.3	67.4
64. Kalimantan Timur	67.8	69.9	72.9
71. Sulawesi Utara	67.1	71.3	74.2
72. Sulawesi Tengah	62.8	64.4	68.5
73. Sulawesi Selatan	63.6	65.3	68.1
74. Sulawesi Tenggara	62.9	64.1	67.5
75. Gorontalo	na	64.1	67.5
76. Sulawesi Barat	na	na	65.7
81. Maluku	67.2	66.5	69.2
82. Maluku Utara	na	65.8	67
91. Irian Jaya Barat	na	na	64.8
92. Papua	58.8	60.1	62.1

Sumber: <http://www.datastatistik-indonesia.com>

4. Indikator Kualitas Penduduk Indonesia Berdasarkan Penjabaran UU No. 10/1992

Menurut UU No. 10/1992, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Kualitas fisik meliputi kebugaran yang dikaitkan dengan kesegaran jasmani, kesehatan serta daya tahan fisik sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif. Kualitas non-fisik meliputi kualitas kepribadian: kecerdasan, ketahanan mental, dan kemandirian; kualitas bermasyarakat; kesetiakawanan sosial dan kemampuan bermasyarakat; kualitas pekerjaan; produktivitas, ketekunan, dan prestasi kerja; kualitas wawasan lingkungan; serta kualitas spiritual keagamaan: iman, keteguhan etik dan moral.

Melalui Rapat Pokja Pembakuan Indikator Kualitas penduduk Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN pada bulan November 1995, Undang-Undang ini telah dijabarkan dalam bentuk variabel dan indikator kualitas penduduk sebagai berikut:

A. Kualitas Fisik

a.1. Kesegaran Jasmani

Rasio fasilitas olah raga terhadap jumlah penduduk ; angka kesakitan penyakit ringan

a.2. Kesehatan

Angka harapan hidup pada saat lahir; Total Fertility Rate (TFR); Jumlah dan jenis penyandang cacat; kurang energi protein total; Gangguan akibat kekurangan Iodium

(GAKI); Anak kekurangan vitamin A; Prevalensi Keluarga Berencana (KB); Berat badan balita dibawah normal; Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR); Angka Kematian Anak (AKA); Angka Kematian Maternal (AKM); angka kesakitan penyakit berat; anemia balita; usia kawin pertama

a.3. Daya Tahan Fisik

B. Kualitas Non-Fisik

b.1. Kualitas Kepribadian

Angka Melek huruf; Tingkat partisipasi Pendidikan Menurut Jenjang; Jumlah anak putus sekolah; Jumlah remaja dan pemuda yang bermasalah; Jumlah penduduk yang mendapat ketrampilan

b.2. Kualitas Bermasyarakat

Jumlah anak terlantar; Angka kenakalan anak dan remaja; Jumlah Nikah Talak Rujuk (NTR); Frekwensi Kunjungan ketempat ibadah; Proporsi anak yang terpaksa bekerja

b.3. Kualitas Kekaryaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Pendapatan perkapita; Jumlah penduduk miskin; Lamanya bekerja; Ratio ketergantungan; Jumlah kepala keluarga wanita; Proporsi wanita yang menjadi pimpinan dalam birokrasi/orpol/ masyarakat; proporsi wiraswasta terhadap jumlah penduduk; tingkat pengangguran; jumlah anggota MPR/DPR dari pemuda

b.4. Kualitas Wawasan Lingkungan

Jumlah masyarakat daerah terpencil

b.5. Kualitas Spiritual Keagamaan

Jumlah penduduk yang melakukan ibadah secara teratur; kemampuan membaca kitab suci; jumlah penduduk yang memberikan sumbangan sosial/sedekah/zakat; jumlah calon haji yang terdaftar; Ratio kitab suci, tempat ibadah, pertemuan keagamaan; proporsi alumnus P4 terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu.

ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI: Ketimpangan Gender

Bab ini akan memberikan pengertian mengenai gender serta teori-teori yang menjelaskan penyebab terjadinya diferensiasi gender. Selain itu, pada akhir dari bab ini akan dibahas secara khusus mengenai fenomena ketimpangan gender dalam dunia kerja.

8.1. Pengertian Gender

Dalam masyarakat, gender sering hanya diidentikkan dengan pengertian seks atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun demikian, sebenarnya pengertian gender tidak sepenuhnya setara dengan pengertian jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang lebih bersifat biologis tersebut. Gender pada hakikatnya merupakan struktur "sosio-kultural" yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Dalam konteks maskulin dan feminim ini, bisa saja terdapat perbedaan dari satu struktur sosial-budaya ke struktur sosial-budaya lainnya. Sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminim dalam budaya lain. Demikian juga sebaliknya, sesuatu

yang dianggap feminim dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai maskulin dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata pada perbedaan jenis kelamin.

Gender merupakan tatanan/norma/aturan bagi berlangsungnya satu masyarakat karena melalui hal tersebut pengaturan gender, persepsi diri mengenai laki-laki dan perempuan, apa dan siapa dirinya dalam masyarakat itu ditentukan, alokasi pekerjaan diberikan, dan pembagian wewenang atau kuasa dilakukan (Hafidz,1995). Sementara itu, ketidakseimbangan berdasarkan gender (gender inequality) mengacu pada ketidak-seimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (Chafetz,1991)

8.2. Diferensiasi Gender

Terjadinya fenomena diferensiasi gender pada dasarnya dapat dijelaskan dari tiga teori dasar yaitu teori neo-klasik, teori segmentasi pasar tenaga kerja dan teori feminist. Teori neo-klasik menerangkan pembagian kerja seksual dengan menekankan perbedaan seksual dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Perbedaan-perbedaan itu meliputi pendidikan, ketrampilan, lamanya jam kerja, tanggung jawab rumah tangga, serta kekuatan fisik. Semua ini didasari asumsi bahwa di dalam persaingan antar pekerja, pekerja memperoleh upah sebesar "marginal product" yang dihasilkannya. Asumsi lain adalah bahwa keluarga mengalokasikan sumberdaya mereka secara rasional.

Konsekuensi logis dari hal ini adalah anggota rumah tangga laki-laki memperoleh investasi *human capital* yang lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya, perempuan memperoleh pendapatan dari produktivitas yang lebih rendah dari laki-laki karena mereka memiliki *human capital* yang lebih rendah. (Anker dan Hein, 1986 dalam Susilastuti dkk, 1994)

Berkaitan dengan aspek perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, Becker dalam Chiplin dan Sloane (1982) mengemukakan bahwa status dalam keluarga dan pembagian kerja di dalam rumah tangga lebih mampu menjelaskan tingkah laku perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perbedaan upah laki-laki dan perempuan dipandang lebih tepat disebabkan oleh status kawin daripada oleh diskriminasi. Suatu perkawinan mempunyai implikasi-implikasi berikut: (i) Adanya upaya untuk memaksimalkan pendapatan rumah tangga menyebabkan laki-laki (suami) bekerja lebih lama dalam pasar tenaga kerja; (ii) Adanya spesialisasi peran dalam rumah tangga dimana laki-laki terspesialisasi untuk pekerjaan-pekerjaan pasar (publik) dan perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan domestik (kerumahtanggaan). Bagi laki-laki, perkawinan dan karier dipandang komplementer, sedangkan bagi perempuan bersifat kompetitif akibat adanya peran domestik perempuan lebih besar.

Terdapat tiga konsekuensi perkawinan bagi perempuan dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja: (i) dengan karakteristik individu yang sama (misalnya pendidikan, umur, keterampilan), pendapatan perempuan lebih rendah manakala pengalaman dalam pasar tenaga kerjanya lebih pendek dari laki-laki; (ii) perempuan cenderung lebih sedikit menggunakan kesempatan untuk pendidikan dan latihan, karena mereka mencurahkan lebih sedikit waktu dalam pasar tenaga kerja; (iii) Frekuensi interupsi selama suatu periode waktu tertentu akan

menyebabkan depresiasi terhadap ketrampilan yang telah dimiliki oleh perempuan, baik dalam nilainya maupun mutunya.

Ada dua kelemahan dalam teori ini. *Pertama*, berkaitan dengan asumsi perbedaan fisik sebagai sumber dari "pekerjaan-pekerjaan khas perempuan". Secara biologis mengandung dan melahirkan memang merupakan pekerjaan khas perempuan, tetapi tidak ada alasan biologis lainnya yang mampu menjelaskan mengapa perempuan harus mengasuh anak atau melakukan pekerjaan domestik. *Kedua*, berkaitan dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja. Asumsi ini tidak mempertimbangkan adanya segmentasi pasar tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan seksual dalam "human capital". Kelemahan pertama ini diperbaiki melalui teori gender atau feminist, sedangkan kelemahan kedua melalui teori pasar tenaga kerja ganda.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja mengatakan bahwa laki-laki pada usia prima (*prime-age*) terkonsentrasi dalam pekerjaan berupah tinggi, stabil dan dengan latihan, promosi dan prospek karier lebih baik ; dan disebut sebagai *primary jobs*. Sedangkan perempuan berada pada segmen *secondary jobs*, yaitu pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki kestabilan bekerja, kompensasi (bayaran) yang rendah serta tanpa prospek untuk berkembang di masa depan (Chiplin dan Sloane, 1982).

Keterlibatan perempuan dalam *secondary jobs* pada dasarnya memperlihatkan perluasan dari ketimpangan gender. Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi antara bidang domestik dan publik, tetapi dalam bidang publik sendiripun terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada segmen yang berbeda. Oleh karena itu, subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk

yang jelas dalam kehidupan ekonomi dimana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki.

Keterbatasan ruang lingkup kerja perempuan diakibatkan oleh karena perempuan tidak mempunyai kapasitas untuk dapat mengakses pekerjaan-pekerjaan yang umumnya didominasi oleh laki-laki (*male-dominated jobs*), sehingga perempuan terkonsentrasi pada kesempatan kerja yang relatif terbatas. Ini menyebabkan tingkat upah perempuan menjadi rendah. Terbatasnya pilihan pekerjaan perempuan ini karena perempuan dibatasi oleh siklus hidup yang dialami karena kewajiban pada aktivitas rumah tangga dan mencari nafkah berbeda-beda pada masing-masing tahap siklus tersebut.

Sebaliknya, Coverman (1988) membahas pasar tenaga kerja ganda dan segregasi pekerjaan berdasarkan seks dalam hubungannya dengan upah pekerja perempuan yang relatif rendah. Dia menunjukkan bahwa perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan lebih disebabkan oleh segregasi pekerjaan berdasarkan seks daripada terkonsentrasinya pekerjaan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu tersebut.

Segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin merupakan bagian dari marginalisasi. Marginalisasi merupakan satu konsep yang penting untuk memahami hubungan antara industrialisasi dengan pekerja perempuan.

Marginalisasi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia. Perubahan hubungan ini mengakibatkan akses salah satu kelompok ke sumber-sumber vital semakin terbatas. Sumber-sumber itu antara lain meliputi modal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam prosesnya, semakin lama sumber-sumber itu semakin dimonopoli oleh sekelompok

kecil orang, dimana perempuan lebih tersisih dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa teori segmentasi pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa pekerja laki-laki dan perempuan tidak bersaing dengan landasan yang sama, sehingga tidak mempunyai akses yang sama ke lapangan kerja. Namun demikian, teori segmentasi pasar tenaga kerja ini dianggap tidak mampu menjelaskan mengapa segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin terjadi. Menurut teori gender atau feminist, kedudukan perempuan yang relatif rendah dalam pasar tenaga kerja ini tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki.

Pengaruh akar sosial budaya dalam mensosialisasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah mengarahkan keterlibatan-keterlibatan perempuan. Proses sosialisasi perempuan yang cenderung mensosialisasikan perempuan dengan kegiatan-kegiatan domestik dan sifat-sifat kewanitaan, menyebabkan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan sifat perempuan. Terdapat kecenderungan bahwa perempuan ternyata terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat "menerima perintah", seperti sekretaris, resepsionis, waitress dan lainnya. Perbedaan perempuan dan laki-laki yang telah disosialisasikan dalam keluarga kemudian terefleksi dalam kecenderungan "menerima perintah" dan memberi perintah". (Collins,1991).

8.3. Gender Dalam Dunia Kerja

Ketidakseimbangan gender dalam lapangan kerja, telah menimbulkan kontroversi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan

dalam dunia kerja. Pekerja perempuan sering dipandang berada pada posisi marjinal, dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal ini, Ehrenberg dan Smith (1988) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari dugaan diskriminasi pasar tenaga kerja adalah adanya segregasi pekerjaan. Segregasi pekerjaan ini ditunjukkan oleh terdapatnya bagian besar dari pekerjaan yang disediakan untuk laki-laki dan sisanya (yang umumnya dengan upah yang rendah) untuk perempuan.

Dalam pasar kerja, terdapat dua pola segregasi. Secara horizontal, perempuan ter-segregasi pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang berstatus rendah. Pekerjaan-pekerjaan sektor modern lebih banyak ditempati oleh laki-laki, sedangkan pada sektor tradisional oleh perempuan.

Diperkenalkannya teknologi baru membuka kesempatan kerja baru bagi laki-laki. Kecenderungan semacam ini biasanya diikuti oleh tergesernya perempuan dari pekerjaan-pekerjaan yang memberikan penghasilan dan kenyamanan kerja baik. Dengan kata lain pekerjaan yang paling menguntungkan kemudian berkembang menjadi pekerjaan laki-laki. Menurut Susilastuti dkk (1994), pada gilirannya proses semacam ini akan menghasilkan "maskulinisasi tenaga kerja", apabila banyak pekerja laki-laki terkonsentrasi dalam pekerjaan yang menuntut ketrampilan tinggi tetapi juga menjanjikan upah tinggi. Proses yang sama juga menghasilkan "feminisasi tenaga kerja" apabila sejumlah besar pekerja perempuan harus berada dalam lapisan terendah dari pekerjaan yang tidak menuntut ketrampilan tinggi, tetapi hanya menawarkan upah rendah. Maskulinisasi dan feminisasi tenaga kerja ini berkaitan erat dengan pilihan pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja laki-laki dan perempuan. Pilihan pekerjaan yang tersedia bagi laki-laki relatif banyak apabila dibandingkan dengan perempuan

Pembagian kerja secara seksual tidak saja dipengaruhi oleh perbedaan biologis, tetapi juga oleh persepsi mengenai pembagian kerja menurut budaya setempat. Jenis pekerjaan dan tingkat upah yang diterima oleh perempuan sebagian ditetapkan dalam batas-batas budaya ini. Pergeseran dalam mengisi lapangan kerja menurut jenis kelamin ternyata diikuti oleh perubahan penilaian dalam pekerjaan. Seseorang pengusaha mungkin hanya akan menyediakan imbalan yang rendah bagi buruh perempuan. Apabila pekerjaan yang sama dikerjakan oleh pekerja laki-laki, imbalannya akan dinaikan sekalipun produktivitas laki-laki dan perempuan tidak berbeda.

Disamping segregasi horizontal, terdapat juga segregasi vertikal dalam pekerjaan laki-laki dan perempuan. Fungsi-fungsi tertentu dari pabrik, dimonopoli laki-laki. Fungsi ini biasanya adalah fungsi dengan kewenangan yang luas, tingkat pengawasan yang tinggi serta kondisi kerja yang lebih baik. Dan seandainya pun, perempuan dan laki-laki ditemukan dalam aktivitas yang sama-- terutama dalam produksi-- mereka sering ditempatkan dalam situasi dan hak pekerjaan yang berbeda.

Adanya segregasi pekerjaan tersebut, baik segregasi secara vertikal maupun segregasi secara horizontal menyebabkan rendahnya status perempuan dalam pekerjaan. Stoler (1977) mengemukakan bahwa status pekerjaan dalam hal ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu aspek "otonomi perempuan" dan aspek "kekuasaan sosial". Dalam konteks aspek otonomi perempuan, hal tersebut dapat memberikan gambaran sejauh mana perempuan mempunyai kekuasaan ekonomi atas dirinya dibandingkan laki-laki. Selanjutnya dalam aspek kekuasaan sosial mencerminkan kekuasaan perempuan terhadap orang lain di luar rumah tangganya.

Status sosial dalam pekerjaan menunjukkan bagaimana posisi perempuan dalam hubungannya dengan pekerja lain dalam perusahaan atau dunia kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, disini diklasifikasikan dua pola mengenai posisi dalam struktur organisasi yaitu pemberi perintah dan penerima perintah. Melalui pengklasifikasian tersebut dapat dilihat bagaimana peluang jabatan atau karir perempuan dalam dunia kerja.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan, terlihat bahwa umumnya pekerjaan tersebut lebih pada posisi sebagai penerima perintah daripada pemberi perintah dalam suatu organisasi. Sebaliknya pada posisi manajerial (yang lebih sebagai pemberi perintah), lebih didominasi oleh laki-laki. Walaupun perempuan telah memainkan peranan yang besar dalam pekerjaan non-tradisional, mereka kurang berperan dalam posisi manajerial. Meskipun terdapat juga perempuan yang berada pada posisi manajer, namun demikian posisi tersebut umumnya adalah posisi pada manajer kelas bawah. Relatif jarang ditemukan perempuan yang berada pada posisi manajer kelas atas maupun kelas menengah.

Pada dasarnya pencapaian status seseorang dalam dunia kerja tergantung banyak hal, terutama sekali kemampuan individu dalam bekerja dan berorganisasi. Namun demikian, pencapaian status oleh perempuan memiliki dinamika yang lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Disamping kemampuan individunya, perempuan dihadapkan pada faktor budaya dan dilema antara tanggung jawab sebagai ibu dan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya dalam pekerjaan non-domestik.

Dalam konteks gender dalam dunia kerja ini, baik sebagai akibat segregasi okupasi maupun tanpa adanya segregasi okupasi (dengan menghilangkan pengaruh segregasi okupasi), juga ditemukan adanya

diskriminasi upah berdasarkan gender. Aigner dan Cain (1977) mendefinisikan diskriminasi ekonomi berlaku ketika pekerja tidak menerima upah atau remunerasi sepadan dengan produktivitasnya. Dengan kata lain, produktivitas yang sama tidak diganjar dengan upah yang sama.

ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI: Penuaan Penduduk

Dewasa ini, isu mengenai penuaan penduduk telah menjadi isu yang diperhatikan secara serius baik di negara maju maupun negara berkembang. Penduduk dunia menjadi semakin tua karena harapan hidup yang lebih panjang yang diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran yang terjadi pada sebagian besar negara.

Transisi penduduk ini telah membawa implikasi luas di banyak bidang dalam masyarakat diantaranya yang terkait dengan pasar tenaga kerja, perawatan anak, perawatan lansia, perawatan kesehatan, dan lainnya. Oleh karenanya, pada bab ini akan dibahas mengenai isu-isu yang terkait dengan penuaan penduduk tersebut.

9.1. Batasan Lanjut Usia dan Pengertian Penuaan Penduduk

Berbagai batasan telah dikemukakan oleh para ahli dan lembaga-lembaga terkait yang membahas mengenai penduduk lanjut usia. Namun

demikian, akhir-akhir ini telah dicapai konsensus yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) bahwa batasan umur lanjut usia adalah 60 tahun. Selain itu, WHO juga membagi penduduk yang berusia 60 tahun keatas ini atas tiga kelompok yaitu:

- Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun,
- Lanjut usia tua (*old*) 75 – 90 tahun
- Usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

Untuk Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia mendefinisikan penduduk lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun. Batasan yang sama juga digunakan dalam pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan di Indonesia pada Tahun 2005.

Selanjutnya, pengelompokan penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran sebagai berikut.

a. Rasio beban ketergantungan penduduk tua

Suatu penduduk disebut sebagai "penduduk tua" jika ratio ketergantungan penduduk tua (DR 60+) sebesar ≥ 10 persen, atau jika angka ketergantungan penduduk muda (DR 0-4) sebesar ≤ 30 persen. Suatu penduduk disebut sebagai "penduduk dewasa" jika ratio ketergantungan penduduk tua (DR 60+) sebesar 5-10 persen, atau jika angka ketergantungan penduduk muda (DR 0-4) sebesar 30-40 persen. Selanjutnya, suatu penduduk disebut sebagai "penduduk muda" jika rasio ketergantungan penduduk tua (DR 60+) sebesar ≤ 5 persen, atau rasio ketergantungan penduduk muda (DR 0-4) ≥ 40 persen.

Rasio beban ketergantungan penduduk tua dirumuskan sebagai:

$$DR_{60+} = \frac{\text{Penduduk usia } 60+}{\text{Penduduk usia } 15-59} \times 100$$

Sedangkan rasio beban ketergantungan penduduk muda dirumuskan sebagai:

$$DR_{0-4} = \frac{\text{Penduduk usia } 0-4}{\text{Penduduk usia } 15-59} \times 100$$

b. Persentase penduduk tua

Suatu penduduk dikatakan berstruktur "tua" jika proporsi penduduk berumur 60 tahun keatas sudah diatas 7 persen; disebut "dewasa" jika proporsinya antara 4-7 persen, dan disebut "muda" jika proporsinya dibawah 4 persen.

c. Umur median penduduk

Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama besarnya. Umur median 25 artinya bahwa lima puluh persen dari penduduk berumur 25 tahun kebawah dan lima puluh persen lainnya berumur 25 tahun ke atas.

Suatu penduduk dikategorikan sebagai "penduduk tua" jika umur median dari penduduk tersebut adalah diatas 30 tahun. Dikategorikan "penduduk dewasa" jika umur mediannya antara 20-30 tahun, dan dikategorikan "penduduk muda" jika umur mediannya dibawah 20 tahun.

Secara ringkas beberapa ukuran tentang penduduk tersebut disajikan dalam Tabel 10.1. berikut.

Tabel 9.1: Kriteria Penduduk Tua, Dewasa dan Muda

Jenis Penduduk	Dependency Ratio		Persen Lansia	Umur Median
	DR Tua	DR Muda		
Penduduk Tua	> 10%	< 30%	7%	30+ thn
Penduduk Dewasa	5-10%	30-40%	4-7%	20-30 thn
Penduduk Muda	< 5%	>=40%	< 4%	< 20 thn

Sumber: Mundiharno, 1997 (Catatan: dalam tulisan aslinya menggunakan batasan usia 65 tahun keatas)

9.2 Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Maju

Perubahan struktur penduduk dari struktur muda ke struktur tua membawa berbagai konsekuensi ekonomi. Di sebagian besar negara-negara maju, proses penuaan penduduk membawa konsekuensi yang besar terkait dengan keberadaan sistem jaminan sosial (*social security system*). Hal ini disebabkan para lanjut usia yang sudah tidak lagi bekerja memperoleh tunjangan sosial dari negara. Tunjangan sosial tersebut diperoleh dari pajak khusus jaminan sosial yang dikenakan pada penduduk yang masih bekerja. Oleh karenanya, dengan proses penuaan penduduk menyebabkan makin banyak penduduk lanjut usia yang harus ditanggung melalui *social security system* sementara di sisi lain proporsi penduduk yang bekerja makin sedikit sehingga proporsi penerimaan pajak *social security* yang diperoleh pemerintah makin kecil.

Schmahl (1990) menganalisis keterkaitan antara perubahan demografi yang terjadi dengan keberadaan *social security system*. Menurutnya perubahan demografi yang disebabkan oleh perubahan fertilitas, mortalitas dan migrasi akan mempengaruhi penerimaan dan

pengeluaran *social security* baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perubahan pasar tenaga kerja. Berkaitan dengan hal tersebut Schmahl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan kondisi demografi tidak saja berpengaruh secara langsung terhadap *social security system*, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung melalui perubahan pasar kerja (penawaran dan permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja dan upah) yang kemudian berpengaruh pada pengeluaran dan penerimaan *social security*.
- b. Hubungan antara kondisi demografi, pasar kerja dan *social security* bersifat saling terkait (*interdependent*). Misalnya, *social security* mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja melalui pajak dan sumbangan. Sementara morbiditas dan mortalitas dipengaruhi oleh sistem kesehatan. *Social security* juga dapat mempengaruhi migrasi.
- c. Perbedaan *social security* seringkali berhubungan secara finansial. Misalnya, antara sistem pensiun dan kesehatan di satu sisi dengan jaminan pengangguran (*unemployment insurance*) di sisi lain.
- d. Tiga faktor utama perubahan demografi --fertilitas, mortalitas dan migrasi-- cenderung mengubah struktur umur dengan cara yang berbeda sehingga memiliki konsekuensi yang bervariasi terhadap *social security*.
- e. Perubahan demografi tidak terjadi secara seragam (*uniformly*) tetapi seringkali secara “bergelombang “ (*waves*) dengan diselingi adanya interupsi struktural. Pembangunan di masa depan tergantung pada struktur umur penduduk saat ini.

Penuaan penduduk juga akan berdampak pada perubahan sistem pensiun. Sistem pensiun di negara-negara barat (maju) yang umumnya

menganut *pay-as-you-go (PAYG) system* mulai disoroti keberadaannya. Verbon (1990) misalnya, menulis tentang evolusi perubahan sistem pensiun sejalan dengan perubahan struktur penduduk yang terjadi. Menurutnya, perubahan struktur penduduk dari struktur muda ke arah struktur tua, kemungkinan akan mengurangi dukungan penduduk muda terhadap sistem PAYG sebab sistem tersebut tidak begitu menguntungkan mereka. Oleh karena itu perlu dicari alternatif-alternatif lain yang memungkinkan lebih terlaksananya sistem *social security* yang selama ini sudah diberlakukan.

Aspek lain yang menjadi topik menarik berkaitan dengan analisis ekonomi penuaan penduduk adalah masalah transfer ekonomi antar generasi. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia berarti beban biaya yang ditanggung oleh negara (yang menganut pandangan *welfare state*) bagi kehidupan lanjut usia menjadi makin besar. Jika semua beban biaya harus ditanggung oleh negara maka tentu saja hal itu akan amat memberatkan beban keuangan negara. Itulah sebabnya perlu dirintis mekanisme pembiayaan lain yang tumbuh dari masyarakat langsung ke penduduk lanjut usia.

9.3. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Berkembang

Selain di negara-negara maju, perhatian pemerintah di negara-negara sedang berkembang terhadap penduduk lanjut usia (lanjut usia) belakangan ini juga terus meningkat. Hal ini karena pesatnya pertumbuhan penduduk lanjut usia di negara-negara tersebut. Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk lanjut usia akan lebih separuh (56,9 persen) dari total penduduk. Peningkatan yang pesat ini secara historis belum pernah terjadi di dunia (Myers, 1988)

Peningkatan penduduk lanjut usia pada dasarnya merupakan dampak positif dari pembangunan. Pembangunan meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup. Namun, di sisi lain pembangunan secara tidak langsung juga berdampak negatif melalui perubahan nilai-nilai dalam keluarga. Perubahan nilai-nilai dalam keluarga ini pada tahap selanjutnya berpotensi menurunkan kesejahteraan penduduk lanjut usia.

Terdapat tiga dampak pembangunan yang berpengaruh kurang baik terhadap kesejahteraan lanjut usia, terutama dalam konteks proses kemajuan pembangunan di negara-negara berkembang. **Pertama**, peningkatan prevalensi migrasi desa-kota. **Kedua**, meningkatnya aktivitas ekonomi wanita dan yang **ketiga** adalah perubahan sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Hal ini selanjutnya menyebabkan terjadinya pemisahan/keluarnya penduduk lanjut usia dari struktur keluarga.

Menurut Weber (1993) dalam Effendi (1996), sebagai dampak dari pembangunan tersebut menimbulkan tiga bentuk pemisahan penduduk lanjut usia dari struktur keluarga yaitu *spatial separation, cultural separation dan economic separation*.

a. Spatial Separation

Peningkatan prevalensi migrasi desa-kota, menyebabkan banyak penduduk lanjut usia yang ditinggal oleh keluarganya. Meningkatnya mobilitas penduduk yang pada umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda menyebabkan banyak penduduk lanjut usia tidak dapat lagi menjadi satu dengan keluarga (*spatial separation*). Kondisi semacam ini berdampak pada kesulitan keluarga untuk tetap menyantuni orang tua mereka pada usia lanjut.

b. Cultural Separation

Pembangunan juga berdampak pada peningkatan pendidikan wanita. Peningkatan pendidikan akan menyebabkan nilai waktu wanita di luar rumah akan lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya alokasi waktu untuk pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan, termasuk mengurus orang tua.

Selain pendidikan wanita, peningkatan pendidikan generasi muda secara keseluruhan dan juga akibat kemajuan komunikasi menyebabkan terjadi perbedaan nilai budaya yang cukup tajam antara penduduk usia muda dan lanjut usia. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan kesulitan untuk menggabungkan kedua generasi tersebut dalam satu kehidupan.

Fenomena peningkatan pendidikan wanita dan generasi muda secara keseluruhan ini juga disertai perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Menurut Effendi dan Sukamdi (1994), dalam suatu keluarga luas, beban sosial dan ekonomi keluarga dapat ditanggung bersama antara orang tua dan anak. Sementara itu, dalam usia lanjut, tugas perawatan orang tua dapat dilakukan oleh anak. Akan tetapi, dalam keluarga inti hal semacam itu telah berubah sama sekali akibat terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi. Peran anak di bidang sosial seperti membantu pekerjaan rumah tangga, akan digantikan oleh orang lain, biasanya pembantu. Demikian juga dalam menemani dan merawat orang tua yang lanjut usia. Peran tersebut tidak lagi dilakukan oleh anak tetapi akan diambil alih oleh institusi atau pemerintah. Apabila hal ini yang terjadi maka lanjut usia pada akhirnya bukan lagi bagian dari suatu keluarga.

c. Economic Separation

Bersamaan dengan proses pembangunan, sistem perekonomian akan mengalami perubahan dari perekonomian tradisional ke

perekonomian modern. Peranan orang tua yang tinggi dalam ekonomi secara tradisional, akan berkurang dalam masyarakat modern. Hal ini disebabkan angkatan kerja muda dengan pendidikan lebih baik lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan akan mempunyai penghasilan yang lebih baik dari orang tuanya. Peningkatan mobilitas vertikal telah menyebabkan perubahan sikap perilaku dan aspirasi mereka terhadap aspek-aspek sosial budaya dan bahkan ekonomi. Hal ini diperkirakan telah menyebabkan berkurangnya rasa tanggung jawab untuk menyantuni keluarga pada usia lanjut. Cowgill (1986) juga menunjukkan perubahan nilai budaya menuju sistim nilai individualistik cenderung mengurangi bantuan keluarga untuk anggota keluarga lanjut usia.

Dilihat dari segi ekonomi, terdapat kecenderungan bahwa rumah tangga sebagai suatu unit produksi bersama (*a unit of production shared*) telah berubah. Terdapat kecenderungan adanya pemilahan produksi antar generasi, bahkan cenderung ke antar individu. Pemilahan produksi ini juga terkait dengan kecenderungan pemilahan kepemilikan aset produksi. Hal ini jelas akan menyebabkan penduduk lanjut usia akan mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Selain dari segi ekonomi, dalam masyarakat modern peranan orang tua sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan telah berkurang. Dalam masyarakat tradisional, peranan orang tua sangat penting dalam meneruskan pengetahuan secara lisan kepada anaknya. Dalam era modern, pengetahuan disalurkan melalui institusi-institusi formal seperti sekolah, perpustakaan, dan media masa. Oleh karenanya para orang tua merasa kehilangan rasa keintiman dan hubungan antar individu dalam keluarga. Ini menyebabkan penduduk lanjut usia merasa diasingkan.

Berkaitan dengan semua perubahan-perubahan tersebut, status orang tua juga mengalami perubahan yang berarti. Status orang tua yang tinggi dalam masyarakat dengan sistim keluarga luas, akan cenderung rendah pada masyarakat dengan keluarga inti. Status penduduk tua yang cenderung tinggi di masyarakat pertanian, menjadi rendah di masyarakat industri

DAFTAR BACAAN

- Agung, I.N dan Harahap A.M.. 1993. "Perubahan Demografi di Indonesia" dalam Ananta, S (ed). *Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. LD-FEUI
- Ahn N, Mira P. 2002. "A note on the changing relationship between fertility and female employment rates in developed countries". *Journal Population Economic*, Vol. 15
- Aigner, D.J. and Cain, G.G. 1977. "Statistical theories of discrimination in labor markets", *Industrial & Labor Relations Review*, Vol. 30 No. 2
- Ananta, A, dkk. 1986. *Mutu Modal Manusia: Suatu Pemikiran Mengenai Kualitas Penduduk*, Jakarta. Lembaga Demografi FEUI
- Ananta, S dan Sirait, H. 1993. "Transisi Demografi, Transisi Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi" dalam Ananta, S (ed). *Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. LD-FEUI
- Ananta, Aris dan Chotib. 2002. "Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Internasional terhadap Sendi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Asia Tenggara: Sebuah Gagasan untuk Kajian Lebih Lanjut". Dalam Tukiran, *et. al. Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Displin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Ananta, Aris.1990. "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Sumberdaya Manusia" dalam Ananta, *Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Lembaga Demografi FEUI dan PAU Bidang Ekonomi UI.
- Ancok, D, 1994. *Kualitas Manusia dan Produktivitas*. Yogyakarta. (paper tidak diterbitkan
- Anker, R. 1997. "Theories of occupational segregation by sex: an overview", *International Labour Review*, Vol. 136 No. 3

- Anker,R dan Hein,C. 1986. "Introduction and Overview". dalam *Sex In Urban Employment the Third World*. London. Macmillan Press
- Apps P, Rees R. 2001. "Fertility, female labor supply and public policy", *IZA. Discussion Paper 409*. Scand J Econ 106
- Ashraf, J. and Ashraf, B. 1998. "Earnings in Karachi: does gender make a difference", *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 36 No. 1
- Becker, GS., 1976. "An Economic Analysis of Fertility" dalam Becker, GS., *The Economic Approach to Human Behaviour*, The University of Chicago
- Becker, Gary S., 1981. *A Treatise on the Family*, Harvard University Press, Cambridge,MA
- Boediono,1985. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, Cetakan ketiga
- Bogue, DJ, 1969, *Principles of Demography*, New York: John Wiley & Sons
- BPS, 2001, *Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta, BPS
- BPS-Bappenas-UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004. The Economic of Democracy*
- Chafetz,J.S. 1991."The Gender Division of Labor and The Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integrated Theory" dalam Blumberg, R.L. (ed), *Gender, Family and Economy, The Triple Overlap*. Newbury Park: Sage Pub
- Cesario F.J dkk. 1980. *The Economics of Malnutrition*. Colombus, Ohio; Betelle Memorial Institute
- Chiplin B dan Sloane PJ. 1982. *Tackling Discrimination at the Workplace: An Analysis of Sex Discrimination in Britain*. London. Cambridge University Press.
- Cigno A. 1991. *Economics of the family*. London, UK. Oxford University Press,
- Collins,R. 1991. "Women and Men in The Class Structure". dalam Blumberg, R.L. (ed), *Gender, Family and Economy, The Triple Overlap*. Newbury Park: Sage Publication

- Connel,J. 1980. *Remittances and Rural Development: Migration, Dependency and Inequality in The South Pacific*. Occasional Paper No.22, Canberra. The Australian National University.
- Connell, J, et al. 1975. *Migration from rural areas: the evidence from village studies*. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex
- Cowgill,DO. 1986. *Aging Around the World*. California: Wadsworth Publishing Company Belmont
- E. Drissen and F. van Winden, 1992. "Social security in a general equilibrium model with endogenous government behaviour" dalam Dieter Bos & Sijbren Cnossen, *Fiscal implications on an Aging Population*, Springer-Verlag, Berlin
- Djojohadikusumo, Sumitro,1974 "Aspek Ekonomi dan Politik Sekitar Masalah Ekologi dan Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal EKI* (Ekonomi dan Keuangan Indonesia), Vol. XXII, No. 2, Juni 1974
- Effendi,S. 1996. "Perubahan Struktur Keluarga dalam Perspektif Pencapaian Keluarga Sejahtera" dalam Agus Dwiyanto dkk (eds). *Penduduk dan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media-PPK-UGM
- Effendi,S dan Sukamdi. 1994. "Perubahan Struktur dan Peranan Keluarga dalam PJP II". *Populasi*. 5(1)
- Effendi,TN. 1993. *Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Ehrenberg, R.G. dan Smith, R.S. 1988. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. London: Scott, Foresman Company
- El-Badry M.A. 1987. *Aging Developing Countries: One More Population Problem ?*
- Francois, P. 1995. "A theory of gender discrimination based on the household", *Queens Institute for the Economics discussion papers*.
- Freedman,R. 1975. *The Sociology of Human Fertility*. New York. Irvington.

- Galor O, Weil DN. 1996. "The gender gap, fertility and growth". *American Economic Review* 86(3)
- Goldstein Sidney, 1980. *Sirkulasi Dalam Konteks Mobilitas Total di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Hafidz. W. 1995."Pola Relasi Gender dan Permasalahannya: Satu Tinjauan Multidimensi" *Makalah untuk Diskusi Gender*. Sekretariat Bersama Perempuan Yogya, 29 April 1995
- Hauser,P dan Duncan,O, 1959. *The Study of Population*. Chicago; University of Chicago
- Hawthorn,G.1970. *The Sociology of Fertility*. London; Collier-Macmillan
- Jones,G. 1977. "Economic and Social Supports for High Fertility: Conceptual Framework" dalam *The Economic and Social Support for High Fertility*. L.Ruzicka (ed). Canberra: Demography Department, Australian National University
- Simanis. J, 1993. "National Expenditure on Social Security and Health in Selected Countries". dalam *Demography and Retirement: the Twenty-First Century*, London. Rappaport & Scheiber (editors), Praeger
- Kammeyer. KC.W. 1971. *An Introduction to population*. San Fransisco: Chandler Publishing Co.
- Kuroda, T dan Hauser P.M. 1981. *Aging of the Population of Japan and Its Policy Implications*, London: NUPRI Research Paper Series No.1 March 1981
- Lee, ES. 1992. *Teori Migrasi*. Yogyakarta. PPK-UGM
- Lee, Ronald D. & Rodolfo A. Bulatao, 1983. "The Demand for Children: A Critical Essay" dalam Bulatao & Lee (Ed.), *Determinants of Fertility in Developing Countries Volume 1 Supply and Demand for Children*, London. Academic Press
- Lucas.D. et.al. 1990. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mantra. I.B. 1994. "Mobilitas Sirkuler dan Pembangunan Daerah Asal". *Warta Demografi*. No.3 Tahun ke 24

- Mantra, I.B. 1992. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota*. Yogyakarta. PPK-UGM
- Maria Gutiérrez-Domènech. 2008. "The Impact of the Labour Market on the Timing of Marriage and Births in Spain". *Journal Population Economic*. Vol. 21
- Mayer.K. 1962. *Social Research*, 29, no.3.
- McFalls Jr, Joseph A,2003, "Population: A Lively Introduction. 4th Edition". *Population Bulletin*. Vol.58 No.4. Population Reference Bureau
- Meadows, Donella *et.al.*,1982 *Batas-batas Pertumbuhan Laporan Untuk Kelompok Roma*,Yayasan Obor Indonesia, Cetakan kedua, Yayasan Obor Indonesia
- Mundiharno, 1998, "Pengertian, Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Analisis Ekonomi Kependudukan: Dengan Penekanan pada Analisis Ekonomi Terhadap Penuaan Penduduk", Jakarta (*makalah tidak diterbitkan*)
- Mundiharno, 1997, "Pengertian, Dampak dan Isu-isu Sekitar Penuaan Penduduk", *paper*, Lembaga Demografi FEUI,
- Mundiharno, 1996. "Kehidupan Pekerja Migran Sirkuler. Studi Kasus terhadap Kehidupan Pekerja Migran Sirkuler Sektor Bangunan di DKI Jakarta Asal Jawa Tengah", *Laporan Penelitian Mandiri* atas sponsor The Toyota Foundation, Jakarta.
- Myers, G.C. 1988. "Demographic Aging and Family Support for Older Person". paper disajikan dalam *The Expert Group Meeting on The Role of The Family in Care of The Elderly*. Mexico City
- Omran R. 1988. "Transisi Epidemiologi". dalam Singarimbun M. (ed) *Kelangsungan Hidup Anak*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Palmore.J. 1989. *Pengukuran Mortalitas*. Yogyakarta.PPK-UGM
- PRB, 2005, *World Population Data Sheet of The Population Reference Bureau*. <http://www.prb.org>

- Rahardjo, TBW dan Priyotomo, Y. 1994. "Permasalahan Kesehatan Lansia dan Upaya Pelayanan Melalui Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut". *Warta Demografi*, No.1 Th. 24. 1994
- Robey, B. 1988. "How Development Program Can Effect Fertility: The Case Bangladesh". *Asia-Pasific Population & Policy*. Vol.9 No.6
- Robey, B. 1987. "How Rapid Decline in Fertility Speeds Economic Development: Evidence from Asia". *Asia-Pasific Population & Policy*. Vol.9 No.3
- Saefullah, A D, 1992. "The Impact of Population Mobility on Two Village Communities of West Java, Indonesia", *PhD Thesis*, Adelaide, The Flinders University of South Australia
- Sauvy, A, 1974. *General Theory of Population*, London. Meuthen & Co Ltd., London
- Sen, A. 1998. "Mortality as an Indicator of Economic Success or Failure," *The Economic Journal*
- Schmahl, W, 1990. "Demographic change and social security. Some elements of a complex relationship" dalam *Journal of Population Economics*, Volume 3, Number 3
- Skeldon, Ronald. 1990. *Population Mobility in Developing Countries*. London: Belhaven Press.
- Stoler, A. 1977. "Class Structure and Female Autonomy in Rural Java". *Sign*. Vol. 3 No. 1.
- Susilastuti, DH. 1994. *Feminisasi Pasar Tenaga Kerja*. Yogyakarta. PPK-UGM
- Thomlinson, R. 1976. *Population Dynamics*. New York; Random House
- Todaro M.P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Todaro M.P. 1992. *Kajian Migrasi Internal di Negara-Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta. PPK-UGM
- Todaro MP dan Smith, SC, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Kedelapan)*. Jakarta. Erlangga

- Tomagola, 1995, *Kerangka Pikir Penjabaran Konsep, Variabel dan Indikator Kualitas Penduduk Indonesia*, Dokumen No.2 Kantor Meneg Kependudukan/BKKBN (tidak diterbitkan)
- Tjiptoherijanto. P. 2005. "Krisis Ekonomi dan Pembangunan Kependudukan". dalam Soesastro H dkk (eds) *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Krisis dan Pemulihan Ekonomi*. Jakarta. Kanisius
- United Nations (UN). 2001. *World Urbanization Prospects: The 2001 revision*. New York.
- United Nations (UN). 1995. *World Population Prospects: The 1994 revision*. New York.
- UNDP, 2007, *Human Development Report 2007/2008*, New York, Oxford, Palgrave Macmillan
- UNDP, 2004, *Human Development Report 2004*, New York, UN Plaza
- UNDP, 2001, *Human Development Report 2001*, New York, Oxford University Press
- UNDP, 1992, *Human Development Report 1992*, Delhi, Oxford, University Press
- Verbon, Herrie A.A., 1990. "Transfer to the old, government debt and demographic change" dalam *Journal of Population Economics*, Volume 3, Number 2
- Weeks.J.R.1986. *Population*. California. Wadsworth Publishing Company.
- WFS (World Fertility Survey). 1977. "Strategies for the Analysis of WFS data". *Basic Documentation*, no. 9
- Zelinsky. 1971. "The Hypothesis of the Mobility Transition". *Geographical Review*, 61



Junaidi, lahir 2 Juni 1967 di Padang. Tamat S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Tahun 1991. Program Magister diselesaikan tahun 1996 pada Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Sejak tahun 2007 sampai saat ini melanjutkan studi Strata 3 (S3) pada Program Pasca Sarjana IPB Bogor. Selain sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, penulis juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya di kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi.



Hardiani, lahir 3 Januari 1966 di Jambi. Tamat S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Tahun 1989. Program Magister diselesaikan tahun 1996 pada Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Mengampu mata kuliah Ekonomi Kependudukan, Analisis Kependudukan, Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Kesehatan dan Matematika Ekonomi baik di Program Diploma 3 (D3) Strata Satu (S1) maupun di Strata Dua (S2) pada almamater yang sama. Pada saat ini, sebagai Sekretaris Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Kependudukan di Jurusan IESP FE-UNJA

Buku Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan ini menguraikan konsep dasar ekonomi kependudukan serta berbagai teori dan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan dinamika penduduk, baik sebagai variabel yang mempengaruhi maupun variabel yang dipengaruhi. Pada dasarnya, teori dan pendekatan yang digunakan dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Namun demikian, buku ini lebih difokuskan pada pembahasan dari sisi makro ekonomi, dan lebih khusus lagi, pada dampak pembangunan ekonomi terhadap dinamika penduduk serta dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, dalam buku ini juga dibahas beberapa isu-isu kependudukan terkini, mengenai indikator kualitas penduduk, isu gender dan penuaan penduduk. Disadari bahwa tidak semua isu-isu terkini dapat dicakup dalam buku ini. Tetapi paling tidak, melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menuntun pembaca untuk menemukan isu-isu lainnya, yang saat ini masih menjadi "embrio" tetapi diperkirakan akan menjadi persoalan krusial yang akan dihadapi pada masa-masa yang akan datang.

ISBN 978-979-19971-2-6